

**JAGA ENERGI
NASIONAL
TERDEPAN DI
MATA GLOBAL**

**BUMN
TRANSFORMASI
SUPAYA SEHAT
DAN CUAN**

**KEMENDAGRI
KOLABORASI
TANGANI PANDEMI,
AWASI KEUANGAN
DAERAH**

**TAHUN
KEBANGKITAN
OLAHRAHA
NASIONAL**

**MPR RI TERUS
BERGERAK
MENJAGA HALUAN
NEGARA**

**KRISIS TUNTAS,
RAKYAT PUAS JOKOWI
LAYAK 3 PERIODE**

**2022 SUMSEL MENUJU
MANDIRI PANGAN**

**TINGKATKAN KEPERCAYAAN
KOPERASI RAKYAT**

**BASUKI HADIMULJONO
MENATAP INFRASTRUKTUR
INDONESIA BARU**

**TETAP SIGAP
MEMBANGUN NEGERI**



Rp75.000,-

info indonesia INOVASI UNTUK NEGERI



IKLAN BACK COVER

RP 75.000.000

IKLAN DISPLAY/HAL

RP 50.000.000

IKLAN ADVERTORIAL/HAL

RP 65.000.000

CENTER SPREAD

RP 80.000.000



*Kami Hadir
Memberikan
info Tersebut*

▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN
PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**

▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET
SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**

▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH
DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**

▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON
UNTUK PARA PELANGGAN**

2022

Momen pergantian tahun adalah salah satu cara umat manusia memudahkan hidupnya di dunia. Ia menjadi titik hitung waktu. Menandai sisi hidup berupa siklus, di samping yang berlangsung secara linear tanpa pengulangan.

Demikianlah kita memasuki 2022 untuk menyusuri kelanjutan kehidupan. Siklus yang berulang dan linear yang berujung, serta gabungan keduanya.

Umat manusia juga memilah kehidupannya dengan berbagai cara untuk, lagi-lagi, memudahkan hidupnya. Aneka pemilahan mulai dari yang sederhana seperti urusan domestik (rumah tangga) dan publik (kehidupan bermasyarakat). Masing-masing segmen memiliki dimensi masing-masing: ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, dan sisi-sisi lainnya yang beragam.

Maka mengawali 2022 kita akan menyusuri tahun ini dengan siklus kelanjutan tahun-tahun sebelumnya dan juga meninggalkan jejak linear, masa lalu yang tak dapat lagi kembali. Pada urusan domestik maupun publik.

Urusan publik pun begitu luas mulai dari tingkat global, regional, nasional, hingga lingkungan terdekat. Di mana posisi kita? Masing-masing memiliki peran dan dapat memilih untuk aktif maupun pasif. Pada titik ini, terlihat mana yang menjadi prioritas atau bukan.

Untuk Indonesia, yang tetap menjadi prioritas tampaknya adalah masalah penanganan wabah dan pemulihan ekonomi. Banyak segi yang menjadi rincian penanggulangan wabah dan pemulihan ekonomi ini. Beriringan dan terkait dengan itu, perjalanan waktu membawa Indonesia ke masa-masa menjelang siklus politik lima tahunan.

Jadi, kita melihat perhatian besar terhadap perkembangan Covid-19 dengan varian Omicron yang mulai menyebar di Indonesia. Kaitannya adalah vaksin booster yang secara politis sudah menjadi kebijakan untuk digratiskan dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Soal kesehatan akan tetap menjadi prioritas karena bangsa yang sakit akan mengganggu eksistensinya sendiri. Sisi penting eksistensi sebuah bangsa adalah kemampuannya bertahan secara ekonomi yang banyak segi lagi tercakup di dalamnya.

Katakanlah ekonomi tak akan lebih baik tanpa kesehatan. Namun, tak kalah penting kualitas manusianya juga. Maka kita berhadapan dengan soal pendidikan. Pendidikan persekolahan maupun informal. Belum lagi kaitannya dengan teknologi.

Alhasil, sepanjang tahun ini kita masih akan berurusan dengan kesehatan, pendidikan, dan prasarana (infrastruktur). Dengan sisi ekonomi dan politiknya yang kental. ●



ALAMAT REDAKSI/IKLAN/PEMASARAN:

Jalan MPR III No. 5B, Kelurahan Cilandak Barat,
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan (12430)
Telp / Fax : 021-278 123 97

Twitter : @1nfoindonesia
Facebook : infoindonesia.id
Instagram : @infoindonesia.idn
Email : redaksi@infoindonesia.id

DAFTAR ISI

DISI
BULAN
JANUARI
2022



6

INFO PARLEMEN

DPR RI resmi mengakhiri masa persidangan II tahun sidang 2021-2022.



24

INFO BUMN

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sepanjang tahun ini bekerja sangat keras. Ditunjuk sebagai pemasok utama vaksin ke Tanah Air, kementerian yang dinakhodai Erick Thohir ini juga terus merampingkan perusahaan milik negara, serta membuat bisnisnya lebih sehat.



36

INFO KEMENDAGRI

Kementerian Dalam Negeri disibukkan dengan beragam pekerjaan yang memerlukan perhatian khusus sepanjang 2021.

94

INFO SUMSEL

Tekad Gubernur Sumsel H. Herman Deru menjadikan Sumatera Selatan sebagai daerah mandiri pangan terus dibuktikan. Keseriusannya itu ditandai dengan Grand Launching Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (SMP) yang dilakukannya secara resmi di Kabupaten Lahat.





48 INFO KEMANTAN

Salah satu program strategis Kementerian Pertanian adalah riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Program riset masuk ke dalam lima Program Kerja Kementan 2021. Adapun, program lainnya antara lain Program Keterse-
diaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan Program Dukungan Manajemen.



74 INFO PUPR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih menjadi ujung tombak dalam program pembangunan infrastruktur pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Maruf Amin.



80 INFO PRESIDEN

Joko Widodo boleh semringah di penghujung tahun yang penuh tekanan ini. Ujian dari berbagai arah teratasi dengan capaian yang cukup memuaskan. Dua tahun pandemi yang melahirkan krisis multisektoral memberikan pelajaran amat mahal.



3 DARI REDAKSI

14 INFO KEMENKOP UKM

30 INFO DPD

42 INFO KEMENPORA

56 INFO KEMENKO MARVES

62 INFO MPR

66 INFO PERTAMINA

88 INFO KHUSUS



DEMI RAKYAT TERUS AWASI PEMERINTAH

DPR RI resmi mengakhiri
masa persidangan II tahun
sidang 2021-2022.



Penutupan masa sidang ini cukup menyita perhatian publik. Pasalnya, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang sudah diambil putusan setelah disetujui delapan fraksi di Badan Legislasi (Baleg) tidak masuk dalam agenda pengesahan. RUU TPKS disepakati akan disahkan pada awal masa sidang berikutnya.

Rapat Paripurna hanya membahas dua agenda yakni pengesahan RUU tentang Perubahan atas UU 38/2004 tentang Jalan serta pidato penutupan masa sidang oleh Ketua DPR Puan Maharani.

Dampak pandemi COVID-19 memberikan tantangan yang berbeda bagi fungsi check and balance DPR.

Sepanjang tahun 2021, kerja pengawasan DPR lebih diperkuat memantau kinerja kementerian dan lembaga dalam menanggulangi pandemi COVID-19 dan dampaknya. Baik itu yang menyangkut urusan bidang kesehatan, perlindungan sosial, ekonomi, UMKM, pendidikan, pilkada, pariwisata, dan bidang lain yang terdampak.

Fungsi ini menjadi krusial agar rakyat Indonesia tetap menjadi prioritas utama pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

Berikut rangkuman kerja-kerja DPR yang penting dan menarik dalam satu tahun terakhir. Apa saja?

JANUARI

Pada awal tahun ini, berbagai peristiwa di Tanah Air mewarnai kerja pengawasan DPR. Mulai dari gelojak harga pada beberapa komoditi

tas pangan seperti kedelai, cabai, telur ayam, hingga daging, bencana alam yang silih berganti, tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 192 rute Jakarta-Pontianak, termasuk pelaksanaan vaksinasi perdana di Indonesia.

Catatan lainnya, persetujuan calon tunggal Kapolri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo yang diajukan presiden untuk

kit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTGB) yang dikerjakan PT Sorik Merapi Geothermal Plant (SMGP). Dalam kejadian tersebut lima orang warga Mandailing Natal, Sumatera Utara meninggal dunia dan puluhan warga lainnya dilarikan ke puskesmas terdekat.

Anggota Komisi VII DPR RI Zulfikar Hamonangan menilai, kebocoran gas

Tengah IV tersebut menggantikan rekan satu fraksinya Eriko Sotarduga dari dapil DKI Jakarta III.

Selain Doflie, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat penetapan juga menetapkan Hendrawan Supratikno sebagai Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggantikan I



menjadi Kapolri dalam Rapat Paripurna DPR.

Kemudian pula, persetujuan DPR atas usulan tiga nama calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Tiga nama calon Dewas LPI yang diajukan Presiden Joko Widodo yakni Darwin Cyril Noerhadi, Yozua Makes, dan Haryanto Sahari.

FEBRUARI

Komisi VII DPR RI menyoroti kebocoran gas Hydrogen sulfide (H₂S) dari pembangunan power plant Pembang-

H₂S dari pembangunan power plant PLTGB yang dikerjakan oleh PT SMGP sehingga menewaskan lima orang seharusnya bisa dicegah dengan cara memberikan tanda batasan-batasan wilayah berbahaya, dengan demikian masyarakat tidak akan terkena dampaknya.

Info Indonesia juga mencatat pada awal bulan ini, Alat Kelengkapan Dewan dari Fraksi PDI Perjuangan mengalami perubahan atau rotasi.

Dolfie ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR. Politisi dapil Jawa

Gusti Agung Rai Wirajaya.

Kemudian terkait rencana pemerintah yang akan mengkaji ulang UU 19/2016 tentang Perubahan atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). "Kami menilai ada situasi yang memang memerlukan penyesuaian UU ITE. Makin naiknya tren saling lapor, pemidanaan pendapat dan pikiran dan kejahatan internet, memang sudah saatnya melakukan kajian ulang UU ITE," kata Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/02/21).



MARET

Pemerintah resmi mengonfirmasi dua kasus mutasi virus COVID-19 dengan kode B117 asal Inggris yang ditemukan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kasus ini menjadi yang pertama sejak varian tersebut mewabah di Inggris pada September 2020

lalu. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin mendesak pemerintah untuk segera mengantisipasi penyebaran mutasi virus tersebut.

Sebanyak 33 RUU masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna

ke-15 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021.

Sementara, Baleg DPR menyepakati penyempurnaan harmonisasi RUU tentang Perubahan atas UU 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Revisi UU Kejaksaan diusulkan langsung oleh Komisi III DPR yang di dalamnya



mengatur penguatan kedudukan jaksa dalam sistem pemerintahan.

APRIL

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menyatakan komitmennya dalam mendukung pengembangan penelitian Vaksin

Nusantara yang dipimpin dr. Terawan Agus Putranto. Dukungan itu ditunjukkan dengan kesediaannya menjadi relawan Vaksin Nusantara. "Sekarang sudah berjalan fase penelitian vaksin di RSPAD, kami (Pimpinan dan Anggota DPR RI) siap menjadi relawan," ungkap Melki yang diamini oleh anggota DPR lainnya saat menerima suntik sel dendritik Vaksin Nusantara di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot

Soebroto, Jakarta, Kamis (22/4/2021).

Komisi IV DPR RI menilai UU 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sudah tidak cukup efektif untuk melindungi sumber daya alam Indonesia yang luar biasa luasnya.

MEI

Panitia Khusus (Pansus) Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Papua Barat



Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin.

“

Kami menilai ada situasi yang memang memerlukan penyesuaian UU ITE. Makin naiknya tren saling lapor, pemidanaan pendapat dan pikiran dan kejahatan internet, memang sudah saatnya melakukan kajian ulang UU ITE.

menyerap masukan terkait RUU Perubahan Kedua atas UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Ketua Pansus Otsus Papua Komarudin Watubun mengakui, meski Otsus Papua telah berjalan 20 tahun, namun belum terakomodir secara baik, karena sejumlah kabupaten dan kota di Papua masih tergolong miskin.

"Oleh karena itu perlu dilakukan Perubahan Kedua atas UU 21/2001 sebagaimana diubah menjadi UU 35/2008 yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI tahun 2021," kata Komarudin saat menyampaikan sambutan dalam pertemuan yang dihadiri Gubernur Papua Barat dan pihak-pihak rapat terkait di

• INFO PARLEMEN

Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari, Senin (3/5/2021).

Membuka Masa Persidangan V tahun sidang 2020-2021, Puan Maharani didampingi pimpinan DPR lainnya memandu pelantikan Anggota Pengganti Antarwaktu (PAW) di sisa periode 2019-2021. Adapun anggota pengganti antarwaktu yang mengucapkan sumpah/janji itu adalah Itet Tridjajati Sumarijanto dari Fraksi PDI Perjuangan dan daerah pemilihan Lampung II, menggantikan

dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) menyepakati asumsi dasar ekonomi makro di antaranya pertumbuhan ekonomi 5,2-5,8 persen; Inflasi 2-4 persen; Nilai tukar rupiah Rp13.900-Rp15.000 per USD; dan Tingkat bunga SUN 10 tahun 6,32-7,27 persen.

Sementara, target pembangunan ditetapkan sebagai berikut, yaitu tingkat pengangguran terbuka 5,5-6,3 persen, Tingkat kemiskinan 8,5-9,0 persen, Gini rasio 0,376-0,378. Kemu-

RI pada Rapat Paripurna lalu, terungkap utang pemerintah mencapai Rp6.074,56 triliun. Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir menilai, besarnya utang tersebut mengindikasikan lampu merah bagi pemerintah.

BPK dalam laporannya, mengungkapkan, rasio utang Indonesia terhadap penerimaan sudah tembus 369 persen atau jauh di atas rekomendasi International Debt Relief (IDR).

Standar IDR, lanjut Hafisz, untuk ra-



Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dan Menkeu Sri Mulyani Raker dengan komisi XI DPR RI.

Bambang Suryadi. Serta Ali Mufhti dari Fraksi Partai Golkar dan daerah pemilihan Jawa Timur VII, menggantikan Gatot Sudjito.

JUNI

Rapat kerja (raker) Komisi XI DPR bersama Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK),

dian, setelah melalui proses diskusi panjang, selanjutnya juga disepakati indikator pembangunan, yaitu Nilai Tukar Petani (NTP) 103-105; dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 104-106.

JULI

Hasil laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020 yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

sio utang yang stabil berada di 92-176 persen. Rasio utang yang terus meningkat 41.65 persen bisa membuat kemampuan pemerintah menurun untuk membayar utang dan bunganya. Sudah terjadi pula kelebihan ambang batas debt to service ratio yang direkomendasikan IMF (IDR) berkisar 25-35 persen. Saat ini saja telah mencapai 46.77 persen.

Sementara itu, Rapat Paripurna DPR RI ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyetujui pendapat fraksi-fraksi yang disampaikan secara tertulis terhadap RUU usul Inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terkait empat RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi, empat RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan lima RUU tentang Pengadilan

Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut adalah RUU Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram.

Serta lima RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi tersebut adalah RUU Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, RUU Pengadilan Tinggi

Merespon hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta masyarakat tidak termakan isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Pemerintah maupun KPU sudah sama-sama membantah bahwa apa yang kemudian berkembang di media massa itu Pemilu yang kemudian diundur 2027, itu kan tidak mungkin karena aturannya tidak mengatur soal itu," kata Dasco kepada awak media di selasar Gedung Nusantara III, Senayan, Jakar-



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Tinggi Agama, untuk menjadi RUU usul DPR RI.

Empat RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi tersebut adalah RUU Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat.

Kemudian empat RUU tentang

Agama Bali, RUU Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, RUU Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan RUU Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

AGUSTUS

Isu Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mundur menjadi 2027 masih ramai menjadi perbincangan di media sosial.

ta, Kamis (19/8/2021).

Politisi Partai Gerindra itu menyatakan, KPU dan pemerintah tengah fokus persiapan Pemilu sesuai tahapan yang telah disepakati yakni 2024. Diketahui, Tim Kerja Bersama yang terdiri dari DPR, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP menyepakati Pemilu tetap diselenggarakan pada 2024 sebagaimana UU 7/2017 dan UU 10/2016. Adapun



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena.

Pemilu digelar pada 21 Februari 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah digelar pada 27 November 2024.

SEPTEMBER

Komisi II DPR RI menyetujui Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tahun 2022, sebesar Rp8 triliun lebih. Angka tersebut jauh lebih kecil dari usulan KPU sebelumnya yang meminta anggaran sebesar Rp13 triliun pada tahun 2022, dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan anggaran tahapan Pemilu 2024 yang dimulai sejak Januari 2022 mendatang.

OKTOBER

Rapat Komisi II DPR RI dengan pemerintah untuk membahas pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 ditunda. Menurut Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, setidaknya ada beberapa isu dan permasalahan

yang telah diinventarisir dalam mensinkronisasi penyelenggaraan Pemilu itu. Beberapa isu tersebut pertama antara lain standar dan mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu, dimana diharapkan waktu penyelesaian dapat lebih cepat.

Kedua, terdapat isu persoalan penentuan masa kampanye baik pileg, pilpres dan pilkada. Ketiga, dari KPU meminta secara khusus ada Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur logistik Pemilu. Sementara itu isu keempat menyangkut digitalisasi tahapan, terutama di bagian rekapitulasi. Pengalaman beberapa kali pemilihan umum sudah ada sistem Sirekap oleh KPU.

Isu terakhir, terkait persoalan data kependudukan, dimana Doli berharap pada 2024 nanti, pemerintah sudah mampu membangun sistem data kependudukan yang baik agar memudahkan penyelenggara pemilu yang saat ini dibebani kerja pemutakhiran

data pemilih.

Kabar baik datang dari kerajaan Arab Saudi yang kembali membuka kesempatan untuk penyelenggaraan ibadah umrah bagi jemaah Indonesia. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai hal tersebut tidak lepas dari semakin terkendalinya penanganan COVID-19 di dalam negeri. Namun, politisi Partai Golkar ini meminta pemerintah segera menyiapkan aturan teknis agar calon jemaah umrah dapat mengikuti aturan yang diterapkan Pemerintah Arab Saudi. Ia pun mendorong Kementerian Agama (Kemenag) segera merespons kebijakan dibukanya kembali ibadah umrah bagi jemaah Indonesia.

NOVEMBER

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-9 DPR RI



Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022.

Revisi tentang nomenklatur anti-doping dan organisasi anti-doping dunia atau WADA akan dicantumkan dalam RUU Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN). Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, revisi merupakan konsekuensi dari The International Convention Against Doping in Sport yang telah diratifikasi melalui Perpres Nomor 101/2007 Tentang Pengesahan International Convention Against Doping in Sport.

DESEMBER

RUU Jalan disahkan menjadi UU, menggenapi capaian RUU yang telah dibahas dan disahkan bersama pemerintah, yakni 6 UU.

Di penghujung masa sidang tahun ini, DPR RI juga telah menetapkan 40 RUU sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun

2022. Rinciannya, 26 RUU diusulkan oleh DPR RI, 12 RUU diusulkan oleh pemerintah dan dua RUU diusulkan oleh DPD RI.

Beberapa kegiatan diplomasi parlemen yang turut dihadiri oleh delegasi DPR RI pada masa persidangan kali ini di antaranya, COP26 Parliamentary Meeting di Glasgow, Skotlandia, untuk turut berkontribusi pada upaya dunia mengatasi persoalan perubahan iklim serta rangkaian pertemuan working group.

Kemudian Pertemuan Tahunan ke-29 APPF untuk mengupayakan sejumlah resolusi bagi berbagai persoalan di kawasan Asia Pasifik. Berikutnya, DPR RI menghadiri rangkaian Sidang the 11th Asia Europe Parliamentary Partnership (ASEP-11), dan Sidang IPU ke-143 di Madrid yang antara lain membahas krisis kemanusiaan dan turut memperjuangkan kemerdekaan Palestina. •

“

Isu terakhir, terkait persoalan data kependudukan, dimana Doli berharap pada 2024 nanti, pemerintah sudah mampu membangun sistem data kependudukan yang baik agar memudahkan penyelenggara pemilu yang saat ini dibebani kerja pemutakhiran data pemilih.



KEPERCAYAAN RAKYAT UNTUK KOPERASI HARUS TINGGI



Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemendukop UKM) sepanjang tahun 2021 banyak melakukan terobosan dalam meningkatkan peran perkoperasian di Tanah Air. Di bawah kepemimpinan Menteri Teten Masduki, Kemendukop UKM bersinergi bersama kementerian/ lembaga lain serta stakeholder terkait berhasil menumbuhkan suburkan jumlah koperasi dan pelaku UKM. Tak lain sebagai bagian upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian nasional, meski didera pandemi COVID-19.

Berikut kinerja cakap Kemenkop UKM selama tahun 2021: **JANUARI**

Di awal tahun 2021 Kemenkop UKM menyiapkan roadmap agar sektor UMKM terus naik level. Dilatarbelakangi optimisme kontribusi ekspor UMKM akan meningkat di masa pandemi. Jika pada 2020 ekspor UMKM berkisar di 14,37 persen dari total ekspor, di 2021 ditargetkan naik jadi 15,12 persen.

Target itu terus dipacu secara bertahap menuju 21,60 persen di 2024. Kemenkop UKM pun memiliki peta jalan (roadmap) pengembangan koperasi dan UMKM 2021-2024. Ada enam indikator strategis untuk mewujudkan koperasi modern dan UMKM naik kelas, sehingga tetap bisa jadi tulang punggung perekonomian nasional. Indikator tersebut untuk meningkatkan kontribusi PDB UMKM, PDB koperasi, ekspor UMKM, pertumbuhan startup koperasi, yang ujungnya koperasi jadi modern dan UKM naik kelas.

Pada 2021 ditargetkan PDB UMKM

menjadi 62,36 persen, PDB koperasi 7,54 persen, kontribusi ekspor UMKM 15,12 persen, pertumbuhan startup berbasis inovasi dan teknologi 900 unit, 150 unit koperasi modern dan 0,55 persen UKM naik kelas. Pada 2024 diharapkan kontribusi UMKM terhadap PDB nasional menjadi 65 persen, PDB koperasi 11,54 persen, kontribusi ekspor UMKM 21,60 persen, startup berbasis inovasi dan koperasi 850 unit, koperasi modern berbasis digital 100 unit dan rasio kewirausahaan 3,95 persen.

Indonesia berada di posisi keempat negara dengan jumlah startup terbanyak. Hal itu menjadi modal besar untuk mewujudkan startup berbasis inovasi dan teknologi.

FEBRUARI

Sejumlah program disiapkan untuk membangkitkan UMKM di tahun 2021. Mulai tahun ini diberikan modal-modal usaha yang bersifat mudah diakses, antara lain KUR dan KUR super mikro. Kemudian Kemenkop UKM juga akan

berupaya di tahun 2021 agar suku bunga KUR bisa dipangkas.

Suku bunga KUR diusahakan bisa lebih rendah, yang sekarang 9 persen bisa diberikan lebih rendah bagi yang terdampak COVID-19. Kemudian pembiayaan melalui LPDB akan dilanjutkan, baik besaran ataupun lebih mudah diakses.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat penting dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 57 persen. Angka itu bisa ditingkatkan karena jumlah pelakunya sangat besar 64,1 juta atau setara dengan 99 persen pelaku usaha di Indonesia. Pada 2021, berdasarkan proyeksi yang ada, perekonomian diharapkan dapat didorong ke tingkat pertumbuhan yang positif, dan memberikan sumbangsih yang besar kepada masyarakat.

Disadari juga bahwa UMKM di Indonesia mengalami sejumlah kendala di antaranya kemampuan memaksimalkan pemasaran, baik offline ataupun online. Makanya, forum-forum yang diselenggarakan berbagai pihak akan



• INFO KEMENKOP UKM

sangat bermanfaat dan dengan melalui inkubator akan memberikan dampak kepada UMKM terhadap manajemen kualitas dan memasarkan produk-produknya. UMKM juga menghadapi masalah inovasi dalam produk dan jasa. Kemenkop UKM berkoordinasi dengan yang lain untuk membantu usaha kecil dalam berinovasi.

Kemudian, keterbatasan UMKM lainnya adalah kemampuan mengakses pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Oleh karena itu,

memberikan dampak pada perekonomian nasional, termasuk koperasi.

"Satu hal yang saya syukuri, waktu di awal-awal pandemi ada ketakutan terjadi rush money atau penarikan dana secara masif. Kebetulan saat itu ada beberapa koperasi besar yang gagal bayar. Tapi alhamdulillah itu tak terjadi, apalagi setelah para pengurus menunjukkan bahwa aset yang dimiliki koperasi mencukupi," jelasnya.

Teten mengatakan, koperasi di Indonesia sudah cukup baik dan menun-

nilai pada kuartal 1 dan 2 tahun 2021 ini, ekonomi belum normal. Karena itu, program tahun 2020 akan dilanjutkan pada tahun 2021 yang merupakan tahun pemulihan ekonomi.

"Kuncinya adalah sejauh mana kita bisa mengatasi COVID-19. Tahun ini juga awal pelaksanaan UU Cipta Kerja berikut dengan PP Nomor 7 Tahun 2021 untuk implementasinya. Saya optimis ini akan bisa mengakselerasi pertumbuhan Koperasi dan UMKM di Indonesia," tegas Teten.



APRIL

Kemenkop UKM kembali mendapatkan amanah untuk menjalankan program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Untuk itu, menggandeng Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait sinkronisasi data pemilih dengan data sasaran pelaksanaan bantuan pemerintah bagi usaha mikro.

BPUM yang telah terlaksana di tahun 2020, dilanjutkan kembali di tahun 2021. Sebanyak 12,8 juta usaha mikro menjadi target penyaluran bantuan senilai Rp1,2 juta. Namun, dia mengakui, dalam pelaksanaannya, belum seluruh pelaku usaha mikro teredukasi dengan baik.

Kemenkop UKM masih menemukan usulan-usulan yang kurang unsur datanya dan diragukan validitasnya. Sehingga, prosesnya belum dapat dilanjutkan untuk ditetapkan sebagai penerima program BPUM. Kerja sama antara Kemenkop UKM dengan KPU diharapkan mampu membantu menjawab kondisi tersebut dan mempercepat penyaluran BPUM tahun 2021.

Dengan diberikannya bantuan permodalan, diharapkan para pelaku usaha mikro dapat bertahan dan kembali menjalankan usahanya. Sehingga, akan mempercepat gerak roda perekonomian nasional. Riset UNDP dan LPEM yang dirilis awal 2021 menyebutkan bahwa UMKM mengalami dampak yang mendalam dan signifikan akibat pandemi. Beberapa temuan kunci dalam laporan ini, antara lain sembilan dari 10 UMKM mengalami penurunan permintaan atas produk mereka selama pandemi. Kemudian, dua per tiga UMKM mengalami penurunan pendapatan selama pandemi.

Kemenkop UKM mendukung peningkatan kapasitas produksi melalui sejumlah stimulus yang dimaksud.

MARET

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengatakan, tingkat kepercayaan masyarakat kepada koperasi terus naik. Hal ini menjadi bekal bagus bagi koperasi untuk memberikan sumbangan lebih signifikan terhadap perekonomian nasional dan diharapkan kontribusi koperasi terhadap PDB bisa naik menjadi 5,5 persen pada 2024 dibanding saat ini 5,2 persen.

Saat membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke 43 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kodanua Tahun Buku 2020, Selasa (16/3/2021), Teten berpendapat bahwa pandemi COVID-19

jukkan asas kekeluargaan yang menjadi pilar koperasi serta kepercayaan masyarakat dan sangat penting dalam menghadapi masa masa sulit.

"Saat ini tingkat pengangguran meningkat, kesejahteraan masyarakat menurun, omzet usaha juga turun. Hal-hal seperti ini yang mungkin harus kita hadapi bersama-sama dan ini bukan di Indonesia saja, tapi juga di banyak negara," katanya.

Teten menambahkan, dibandingkan negara lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih baik.

Menurut dia, Indonesia diprediksi Indonesia yang paling cepat dalam proses pemulihan, asalkan vaksinasi yang tengah dilakukan saat ini terselenggara dengan baik.

Teten menambahkan, pemerintah

Di mana lebih dari 80 persen mencatat margin keuntungan yang lebih rendah dan lebih dari 53 persen UMKM mengalami penurunan nilai aset. Termasuk sebagian besar UMKM kesulitan mendistribusikan produknya.

Ketua KPU RI, Ilham Saputra, menekankan, pihaknya mendukung seluruh program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tengah pandemi COVID-19 dengan memberikan data yang diperlukan bagi kementerian dan lembaga. Ia mengatakan, pemutakhiran data KPU sudah dilakukan sejak lama, yaitu pada 2004, 2009, 2014, 2019 dan 2020.

MEI

Kemenkop UKM telah bekerja sama dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) sejak tahun 2019. Sebagai tindak lanjut nota kesepahaman tersebut, keduanya menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk memfasilitasi UMKM kuliner masuk ke GoFood dan platform pemasaran pemerintah Laman Bela Pengadaan LKPP, Kamis (6/5/2021).

Selain penandatanganan PKS, ada juga penyerahan bantuan jaring pengaman sosial kepada pengusaha warung tegal dan pengusaha warung makan lainnya oleh BAZNAS serta penyerahan santunan kepada anak yatim dan dhuafa. Pedagang warteg dan warung makan merupakan pelaku UMKM yang terdampak pandemi COVID-19.

Melalui program bantuan jaring pengaman sosial, BAZNAS akan memberikan bantuan jaring pengaman sosial senilai Rp1 miliar kepada mereka. Melalui kerja sama dengan marketplace dan LKPP, untuk perluasan jaringan pemasaran, pengusaha makanan didorong untuk bergabung dengan marketplace dan onboarding Laman Bela Pengadaan.

Laman Bela Pengadaan menjadi pasar online yang disediakan pemerintah. Melalui e-Katalog dan Laman Bekan Pengadaan LKPP di platform online tersebut, pelaku UMKM dapat memenuhi kebutuhan belanja pemerintah. Selain itu, ada juga Pasar Digital (PaDi), yang merupakan hasil kerja sama Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian BUMN untuk me-

nyerap produk UMKM melalui belanja barang dan jasa BUMN dengan nilai di bawah Rp14 miliar.

Upaya pemerintah mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dilakukan dengan kebijakan subsidi bunga, penempatan dana restrukturisasi, imbal jasa penjaminan, insentif pajak, tambahan modal kerja kepada koperasi melalui LPDB-KUMKM dan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Dari sisi hilir, pemerintah memperluas akses pasar produk UMKM, terutama

ekosistem bisnis dengan berbagai kemudahan dan fitur-fitur bagi UMKM. Di dalamnya termasuk pelatihan-pelatihan bagi UMKM seperti pelatihan manajemen dan packaging.

JUNI

Menkop UKM, Teten Masduki, melepas keberangkatan sekitar 18 kontainer atau 9,6 ton kopi Arabika Gayo ke pasar AS dan Eropa dengan nilai ekspor mencapai Rp6,5 miliar.

Kopi Arabika Gayo menjadi salah



ma melalui pasar online. Target pemerintah pada tahun 2023, 30 juta UMKM dapat terhubung ke ekosistem digital. Hingga bulan April 2021, tercatat baru sekitar 12 juta atau 18 persen pelaku UMKM yang telah masuk ke dalam ekosistem digital.

Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek), Dyan Shinto E. Nugroho, menjelaskan, pihaknya mencatat ada perubahan perilaku konsumen, di mana banyak orang belanja makanan pindah ke sistem online. Ia mengatakan, selama pandemi ada sekitar 180.000-an UMKM yang bergabung dengan GoFood dan Gojek, di mana 90 persen di antaranya merupakan usaha mikro. Pihaknya juga melakukan langkah dengan menawarkan

satu komoditi unggulan asli daerah Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, yang menjadi pemasok kopi bagi perusahaan kopi dunia asal Amerika Serikat (AS) Starbucks. Varian kopi Arabika Gayo ini dikenal sebagai kopi terbaik dunia.

Teten mengungkapkan, kopi Arabika Gayo sudah tersohor namanya sebagai kopi terbaik. Bukan hanya dari rasa tapi juga aromanya. Tak heran kopi Arabika Gayo dapat menarik minat pasar global.

"Saya juga pecinta kopi Gayo. Kopi di Aceh Tengah ini sudah menjadi komoditas penting karena sekitar 60 persen warganya hidup dari pertanian kopi," ujar Tetendalam sambutan pelepasan 18 kontainer ekspor kopi organik sekaligus kunjungan kerja di

• INFO KEMENKOP UKM

Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan, Takengon, Aceh Tengah.

Yang juga menggembirakan, ekspor kopi Arabika Gayo kali ini dilakukan sepenuhnya oleh Koperasi BQ Baburrayyan. Koperasi tersebut adalah satu-satunya yang memiliki akses langsung penjualan kopi ke Starbucks

“Dengan begitu, petani akan fokus pada kualitas kopinya. Saya Ingin memperkuat kelembagaan koperasi di Gayo khususnya bagi para petani kopi,” katanya.

Teten berkomitmen memperbaiki tata niaga kopi ini agar memiliki nilai kesejahteraan bagi petani yang lebih

Kemenkop UKM berkolaborasi mewujudkan wirausahawan-wirausahawan tangguh, go digital dan go global.

Ada dua pendekatan untuk mendorong UMKM Go Digital yaitu pertama, peningkatan literasi digital, kapasitas dan kualitas usaha. Digitalisasi tidak hanya untuk memperluas pasar namun



tanpa melalui broker atau agen.

Oleh karena itu, ke depan Teten meminta koperasi terus diperkuat kelembagaannya. Caranya, para petani kopi perorangan, bergabung bersama koperasi, sehingga koperasi bisa menjadi offtaker pertama langsung dari petani. Jika koperasinya sehat, nanti akan didukung pembiayaan lewat LPDB-KUMKM. Koperasi juga akan diperkuat dengan resi gudang untuk menyimpan produk yang melimpah dan harga sedang tidak bagus.

baik.

“Kami akan memperkuat kelembagaannya serta pembiayaannya melalui LPDB-KUMKM, KUR, dan perbankan,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah melalui Kemenkop UKM menargetkan kontribusi ekspor UMKM akan meningkat menjadi 21,6 persen. Untuk itu, digitalisasi dalam hal ini platform e-commerce harus dapat dimanfaatkan UMKM untuk memperluas pasar ekspor.

Dalam mewujudkan target tersebut,

juga di dalam proses bisnisnya, melalui penguatan database (basis data tunggal), peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, dan pengembangan Kawasan/klaster Terpadu UMKM (factory sharing).

Kedua, perluasan pasar digital melalui Kampanye BBI, On-boarding platform pengadaan barang dan jasa (LKPP, PaDI), Live Shopping, dan Sistem Informasi Ekspor UMKM. Untuk onboarding UMKM, telah bertambah 4 juta UMKM atau total 12,1 juta UMKM

yang sudah terhubung dengan ekosistem digital (19 persen total populasi UMKM). Di mana, target rasio kewirausahaan tahun ini sebesar 3,55 persen dan sebesar 4 persen di tahun 2024.

Teten mengatakan, digitalisasi dapat menjadi peluang ekspor produk UMKM ke pasar dunia. Ekspor nasional

Hari Koperasi Nasional ke-74.

Moto tersebut didasari semangat untuk membangun kesadaran masyarakat Indonesia bahwa koperasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain peningkatan ekonomi anggota, koperasi diharap-

penduduk menjadi anggota koperasi (8,41 persen). Angka tersebut masih di bawah rata-rata dunia yakni di 16,31 persen. Kedua, yaitu masih rendahnya kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional yang saat ini sebesar 5,1 persen.

Memasuki tahun kedua pandemi



terus membaik, di mana pada Maret 2021 nilainya menjadi USD4.286,5 atau naik 30,47 persen (yoy) dibanding Maret 2020. Sektor non-migas menyumbang 95,06 persen dari total ekspor dengan tiga negara tujuan utama yaitu Tiongkok 21,36 persen, AS (11,86 persen) dan Jepang (7,91 persen).

JULI

Menkop UKM, Teten Masduki, menggaungkan moto Untung Bareng Koperasi dalam rangka memperingati

kan juga menjadi lembaga sosial dan lembaga pendidikan bagi anggota dan masyarakat.

Teten menyebutkan, perjuangan bersama untuk menjadikan koperasi sebagai sokoguru ekonomi Indonesia masih terus berlanjut.

"Perlu kita akui bahwa koperasi belum sepenuhnya menjadi pilihan utama kelembagaan ekonomi rakyat," ucap Teten.

Hal ini ditunjukkan oleh dua faktor. Pertama, masih rendahnya partisipasi

COVID-19, kondisi disruptif terus berpengaruh pada sosial-ekonomi masyarakat. Dampak negatif pandemi COVID-19 tidak hanya memukul sektor kesehatan, namun juga berbagai sektor perekonomian dengan ragam konsekuensi seperti PHK, penurunan omset usaha, dan penerapan kebijakan untuk efisiensi biaya. Koperasi sebagai salah satu badan usaha pun turut terdampak.

"Sejak 3 Juli lalu, pemerintah menerapkan PPKM darurat di pulau Jawa



dan Bali, menyusul beberapa daerah lainnya sebagai langkah yang harus diambil untuk menurunkan dan mengendalikan penyebaran kasus COVID-19. Saya mengajak seluruh kalangan masyarakat untuk secara bersama-sama dukung kebijakan tersebut,” ujar Teten

AGUSTUS

Wakil Presiden RI, Maruf Amin, mendorong agar pelaku UMKM menuju ke

digitalisasi. Menurutnya di era disrupsi ini, digitalisasi semakin relevan dan strategis bagi UMKM untuk tetap bertahan dan berperan sebagai penggerak utama pemulihan ekonomi.

“Pandemi memang telah menghambat sebagian besar bisnis UMKM, namun pandemi juga membawa dampak positif, salah satunya mempercepat digitalisasi UMKM,” katanya dalam Peringatan Puncak Hari UMKM Nasional Tahun 2021 dan Peresmian Logo Baru

Kementerian Koperasi dan UKM.

Digitalisasi UMKM ini harus juga diimbangi dengan dua syarat. Pertama peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha UMKM dan dukungan kebijakan akses pasar bagi produk UMKM.

Wapres menambahkan, untuk mendukung hal tersebut maka dibutuhkan juga komitmen bersama untuk melakukan pembinaan dan pendampingan guna mendorong produktivitas UMKM. Sehingga mampu meningkatkan kapa-



sitas produksi serta kualitas produknya.

"Pendampingan dan pengembangan UMKM khususnya UMKM potensial ekspor, yang didukung dengan fasilitas kemudahan pembiayaan, serta kolaborasi dengan usaha besar," jelasnya.

Wapres juga menyampaikan ucapan selamat serta apresiasi atas Peluncuran SMESCO Indonesia: Center of Excellence. Hal ini sebagai ruang bagi UMKM untuk memamerkan produk-

nya, sarana pendampingan dan pembelajaran, kerja sama kemitraan, serta sebagai sentra pelayanan bagi UMKM untuk mengoptimalkan biaya-biaya logistiknya.

"Berbagai kegiatan dan upaya yang diinisiasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama pihak perbankan dan Asosiasi juga patut kita apresiasi," katanya.

Kegiatan ini harus menjadi jembatan bagi pemerintah dan pelaku UMKM serta stakeholders lainnya untuk menciptakan ekosistem pengembangan UMKM yang berkesinambungan. Wapres juga mendorong dinas-dinas yang membidangi Koperasi dan UKM provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia dapat memanfaatkan fasilitas yang disiapkan Kementerian Koperasi dan UKM ini untuk membantu pelaku UMKM mengembangkan usahanya.

SEPTEMBER

Langkah kerja sama dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Perindustrian bisa membuka jalan agar koperasi, UMKM dan IKM dapat menjadi bagian dari rantai pasok industri nasional dan industri global.

"UMKM perlu segera menjadi bagian dari rantai pasok industri nasional dan industri global. Saya kira dimulai dengan BUMN ini sudah sangat tepat," kata Menkop UKM, Teten Masduki, dalam penandatanganan Nota Kesepahaman Kemenkop UKM dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian BUMN.

Adapun, Kemenkop UKM telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kementerian Perindustrian, dan Kementerian BUMN tentang kemitraan koperasi, UMKM/IKM dalam rantai pasok BUMN.

"Jadi kemitraan UMKM dan BUMN dalam rantai pasok ini saya kira ini salah satu terobosan. Kalau enggak nanti UMKM hanya bikin krapak kripik krukuk terus," ujar Teten.

Dibandingkan dengan UMKM di Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan yang sudah mulai masuk ke produk-produk yang berbasis kreativitas dan inovasi teknologi dan sudah masuk dari pada rantai pasok industri nasional dan global, sehingga ekspornya sig-

nifikan. Sedangkan keterlibatan rasio produk UMKM Indonesia dalam rantai pasok nilai global masih rendah 6,3 persen, jauh di bawah Malaysia yang sudah mencapai 46,2 persen, Thailand 29,6 persen, Vietnam 20,1 persen dan Filipina 21,4 persen,

"Kontribusi ekspor kita UMKM itu masih rendah masih 14 persen, jauh dibandingkan dengan China 70 persen dan Jepang 54 persen," kata Teten.

Oleh karena itu, diharapkan dengan kerja sama ini bisa mendorong koperasi, UMKM dan IKM menjadi bagian rantai pasok industri nasional dan industri global. Meski saat ini baru sembilan UMKM/IKM yang akan bermitra dengan enam BUMN antara lain PT Pertamina, PT PLN, PT kimia Farma, PT Krakatau steel, Perum Perhutani dan PT RNI persero.

"Mudah-mudahan ini makin banyak untuk bisa mendukung kolaborasi dengan UMKM atau IKM," pungkaskan Teten.

OKTOBER

Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) merupakan salah satu program yang dicanangkan pemerintah dalam rangka penanggulangan ekonomi nasional sehingga program ini diharapkan mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi.

Untuk itu, dukungan dan bantuan seluruh stakeholder sangat diharapkan agar program BPUM 2021 berjalan secara akuntabel dan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan bertumbuhnya usaha mikro yang merupakan populasi usaha terbesar di Indonesia.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM, Eddy Satriya, dalam monitoring BPUM 2021 di Bukittinggi menjelaskan, pertumbuhan perekonomian nasional sedang mengalami tantangan yang cukup serius, meningkatnya angka kemiskinan, jumlah pengangguran bertambah akibat PHK, dunia usaha terutama Koperasi dan UMKM mengalami dampak yang berat dari sisi produksi, pemasaran dan pembiayaan.

Karena itulah BPUM diluncurkan, sejak 2020 dan berlanjut pada 2021. BPUM 2021 terbagi menjadi dua tahap, di mana untuk tahap pertama telah terealisasi 100 persen pada bulan Juli

• INFO KEMENKOP UKM

kepada 9,8 juta pelaku usaha mikro dengan total anggaran Rp11,76 triliun. Dan untuk tahap dua, hingga September 2021 telah terealisasi Rp3,4 triliun untuk 2,9 juta pelaku usaha mikro. Sehingga, total realisasi BPUM 2021 berjumlah Rp15,24 triliun yang diberikan kepada 12,7 juta pelaku usaha mikro.

Terkait dengan pencapaian penyaluran BPUM, dinas yang membidangi koperasi dan UKM di daerah menjadi salah satu pendorong suksesnya program ini dijalankan. Maka dari itu, Kemenkop UKM sangat mengapresiasi peran aktif dinas di daerah dan berharap koordinasi yang telah dijalankan selama ini dapat terus berlanjut.

Kemenkop UKM juga menyampaikan apresiasi kepada bank penyalur atas kerja sama dan koordinasi selama ini, dan mengharapkan hal ini terus dijalankan dalam upaya percepatan pencairan BPUM kepada para penerima dengan meningkatkan koordinasi bersama dinas provinsi, kabupaten/kota.

Pemkot Bukittinggi telah mengusulkan BPUM melalui Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan di tahun 2020 sebanyak 6.586 pelaku usaha, diusulkan oleh koperasi sebanyak 662 pelaku usaha, di tahun 2021 sebanyak 2.744 pelaku usaha. Dari SK realisasi penerima bantuan tahun 2020 sebanyak 3.274 dan realisasi 2021 sebanyak 3.330.

"Di Kota kami sendiri, segala sektor perekonomian saling berkaitan satu sama lain. Sektor pariwisata yang mana adalah salah satu sektor yang menjadi unggulan mengalami penurunan drastis dalam jumlah wisatawan yang datang dan ini berdampak pada hal lainnya yaitu sektor perekonomian. Para pelaku usaha mengeluh karena mengalami penurunan jual beli. Namun dengan adanya bantuan yang diberikan dari pemerintah pusat kepada para pelaku usaha ini telah memberikan keringanan dalam permodalan pelaku usaha kita," jelas Walikota Bukittinggi, Erman Safar.

NOVEMBER

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) per November 2021 telah mencapai 83 persen dari total plafon sebesar Rp285 triliun. Realisasi penyaluran berdasarkan data Sistem Infor-

masi Kredit Program (SIKP) mencapai Rp237,08 triliun atau 83,19 persen.

Realisasi KUR tahun 2021 sampai dengan 3 November mencapai 83,19 persen kepada 6.282.042 debitur. Penyaluran terbagi dalam beberapa kategori. KUR Super Mikro sebesar Rp9,02 triliun kepada 1.025.706 debitur, KUR Mikro Rp147,82 triliun kepada 4.841.327 debitur, KUR Kecil/Khusus Rp80,22 triliun kepada 413.886 debitur dan KUR Penempatan TKI Rp17,29 miliar kepada 1.123 debitur.

Peningkatan kuota KUR tahun ini dari Rp253 triliun karena adanya permintaan dan kebutuhan dari masyarakat. Pada tahun 2021 pemerintah juga meningkatkan dukungan akses pembiayaan untuk UMKM beberapa kebijakan tambahan. Seperti, semua sektor ekonomi UMKM dapat diberikan KUR. Plafon KUR Tanpa Jaminan juga bisa Rp100 juta. Selain itu, pada Agustus 2020 pemerintah juga telah menambahkan skema KUR Super Mikro sampai dengan Rp10 juta. Skema ini pun tidak mensyaratkan adanya agunan tambahan, hanya agunan pokok usaha yang dibiayai saja, bagi semua pelaku UMKM yang utamanya dari pekerja yang terkena PHK dan ibu rumah tangga.

Bagi calon penerima KUR Super Mikro, lama usahanya tidak dibatasi minimal enam bulan. Lama usaha dapat kurang dari enam bulan dengan persyaratan mengikuti program pendampingan baik formal atau informal atau tergabung dalam suatu kelompok usaha atau memiliki anggota keluarga yang telah memiliki usaha.

Pemerintah juga memperpanjang pemberian tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen dari Januari sampai Desember 2021. Secara rinci, pemerintah memberikan subsidi bunga KUR masing-masing jenis KUR. Seperti KUR Super Mikro sebesar 13 persen, KUR Mikro sebesar 10,5 persen, KUR Kecil sebesar 5,5 persen dan KUR Penempatan TKI sebesar 14 persen. Sehingga yang dibayarkan oleh nasabah KUR hanya 3 persen.

DESEMBER

Erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang,



Jawa Timur, mengakibatkan banyak warga terdampak bencana, termasuk pelaku UMKM.

Menkop UKM Teten Masduki telah menginstruksikan jajarannya segera melakukan inventarisasi terhadap pelaku UMKM di wilayah terdampak bencana, khususnya pelaku usaha yang memiliki pembiayaan KUR.

"Kami segera melakukan koordinasi dengan Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengetahui pelaku UMKM yang menjadi debitur KUR yang terdampak bencana. Dengan demikian secepatnya dapat dilakukan restrukturisasi kredit terhadap pelaku usaha terdampak bencana," ujarnya.

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 45/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan



Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam, alternatif yang dapat ditempuh untuk meringankan atau menyelesaikan persoalan kredit perbankan yang dialami UMKM korban bencana alam dengan memberikan perlakuan khusus untuk debitur KUR terdampak bencana.

Sementara itu, bentuk restrukturisasi yang dapat dilakukan yakni pertama, perpanjangan jangka waktu kredit. Terhadap debitur KUR yang terdampak dapat diberikan perpanjangan jangka waktu dengan mempertimbangkan kondisi dan prospek usaha, cash flow serta kemampuan membayar debitur.

Kedua, restrukturisasi dengan perpanjangan jangka waktu kredit dilakukan pada kredit yang sama dan tidak diperkenankan untuk penambahan tunggakan bunga ke pokok pinjaman (plafondering). Mengingat, saat ini sis-

tem SIKP belum dapat mengakomodir penambahan outstanding dalam rekening yang sama.

Ketiga, debitur KUR yang akan dilakukan perpanjangan jangka waktu kredit harus diusulkan lebih dahulu ke penyalur KUR. Perpanjangan jangka waktu kredit dapat dilakukan setelah ada konfirmasi dari SIKP atas validitas data rekening KUR yang akan dilakukan restrukturisasi.

Keempat, penambahan plafon kredit. Terhadap debitur KUR yang terdampak dapat diberikan suplesi/kredit baru dengan mempertimbangkan kondisi dan prospek usaha, cash flow serta kemampuan membayar debitur. Restrukturisasi dengan cara penambahan plafon dilakukan dengan menggunakan rekening terpisah atau dibentuk rekening baru untuk tambahan plafon.

Namun, debitur KUR yang akan di-

lakukan penambahan plafon harus diusulkan lebih dahulu ke penyalur KUR untuk dilakukan validasi SIKP dengan melampirkan data. Penambahan plafon kredit dapat dilakukan setelah ada konfirmasi SIKP atas validitas data rekening KUR yang akan dilakukan restrukturisasi.

Sementara, untuk pemberian grace period atau masa tenggang pembayaran utang akan disesuaikan dengan kebutuhan debitur dan memperhatikan jangka waktu restrukturisasi. Selama masa grace periode, debitur dibebaskan dari kewajiban pokok dan bunga.

Lebih dari itu, debitur KUR terkena bencana yang terdampak usaha debitur lebih dari 50 persen dapat diberikan keringanan tunggakan bunga atau denda/penalty maksimum sebatas tunggakan bunga dan atau denda yang belum dibayarkan debitur. ●



MENTRANSFORMASI BUMN BIAR SEHAT DAN CUAN

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sepanjang tahun ini bekerja sangat keras. Ditunjuk sebagai pemasok utama vaksin ke Tanah Air, kementerian yang dinakhodai Erick Thohir ini juga terus merampingkan perusahaan milik negara, serta membuat bisnisnya lebih sehat.



Kinerja luar biasa Erick Thohir di Kementerian BUMN dimulai dari pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) hingga usaha untuk menyelamatkan Garuda Indonesia. Meski persoalan mengenai maskapai berbendera Merah Putih itu belum selesai hingga kini, tapi mantan pemilik klub sepak bola Internazionale Milan itu tak bergeming, dengan terus bekerja merapikan seluruh persoalan di BUMN.

JANUARI

Pemerintah memberi perintah kepada Kementerian Badan Usaha Milik

melindungi kesehatan dan jiwa mereka, namun juga akan makin meningkatkan pelayanan seoptimal mungkin kepada para pasien COVID-19," ujar Menteri Erick Thohir.

FEBRUARI

Pembentukan BUMN Holding Bank Syariah Indonesia akhirnya diresmikan, tepatnya pada 1 Februari 2021. Dengan bergabungnya Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu payung, membuatnya menjadi salah satu perbankan dengan nilai aset hingga Rp214,6 triliun.

Diharapkan dengan dibentuknya BSI akan membuat Indonesia menjadi

yang telah terbukti berhasil membawa tiga bank syariah yang bergabung menjadi bank ini mengarungi krisis pandemi COVID-19, bahkan mampu menorehkan kinerja yang sangat positif dan membanggakan," ujar Erick.

MARET

Di sela kesibukan memastikan pasokan vaksinasi tetap lancar, Erick Thohir berusaha menyetorkan BUMN yang sedang sakit secara bisnis dan keuangan. Salah satunya adalah Garuda Indonesia yang bermasalah karena kontrak sewa pesawat.

Ketua Umum PBSI ini pun akhirnya membatalkan kontrak sewa pesawat



Negara (BUMN) mendatangkan vaksin COVID-19. Realisasi itu akhirnya terjadi pada akhir 2020 lalu, dengan jumlah 1,2 juta dosis vaksin Sinovac.

Vaksin tersebut akhirnya disuntikkan pada pertengahan Januari 2021 untuk tenaga kesehatan dan sejumlah pejabat, terutama Presiden Joko Widodo.

"Saya optimistis, vaksinasi para Nakes tak hanya menguatkan sekaligus

salah satu negara dengan ekonomi syariah paling besar di dunia.

"Kita ingin hasil merger ini bisa membuktikan negara dengan jumlah populasi muslim terbesar ini, memiliki kondisi bank yang kuat secara fundamental dan alhamdulillah ini berjalan dengan baik. Saya berharap BSI dapat energi baru bagi ekonomi Indonesia, yang senantiasa menerapkan prinsip financial justice dan stability in investment,

Bombardier CRJ 1000. Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini, efisiensi menjadi kunci di segala lini.

"Dari data-data dapat disimpulkan bahwa Garuda Indonesia menjadi salah satu perusahaan penerbangan yang leasing cost paling tinggi di dunia, yaitu sebanyak 27 persen," jelas Erick.

• INFO BUMN

Di saat yang bersamaan Erick juga bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengembangkan "whistleblowing system". Kerja sama ini dilakukan untuk memulai langkah transformasi bagi seluruh BUMN.

"Hal ini kita lakukan karena merupakan bagian dari transformasi yang kita sepakati bersama, apalagi ini didukung oleh pihak KPK," ujar dia.

APRIL

Langkah pertama yang dilakukan Kementerian BUMN untuk menjadikan Indonesia sebagai ekosistem kendaraan listrik dunia adalah, pendirian Indonesia Battery Corporation (IBC). Perusahaan ini didirikan sebagai hold-

ingan dan energi, terutama nikel yang menjadi bahan utama baterai EV, mengembangkan ekosistem industri kendaraan listrik, dan memberikan kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, investasi skala besar seperti ini akan membuka banyak lapangan kerja, khususnya untuk generasi muda kita," terang Erick Thohir.

MEI

Langkah tegas diambil Kementerian BUMN yang memecat seluruh direksi Kimia Farma Diagnostika (KFD). Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas kasus antigen bekas yang terjadi di Bandara Kualanamu.

Janji Menteri BUMN Erick Thohir un-



ing mengelola ekosistem industri baterai kendaraan bermotor listrik (Electric Vehicle Battery) yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Pembentukan IBC ditandai dengan penandatanganan perjanjian pemegang saham (shareholders' agreement) yang dilangsungkan pada 16 Maret 2021, oleh empat perusahaan BUMN sektor pertambangan dan energi, yakni Holding Industri Pertambangan, MIND ID, PT ANTAM Tbk, PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero), dengan komposisi saham sebesar masing-masing 25 persen.

"Kita ingin menciptakan nilai tambah ekonomi dalam industri pertam-

tuk turun langsung dalam menangani kasus ini dibuktikan dengan keluarnya surat pemecatan pada seluruh direksi.

Erick menegaskan bahwa apa yang terjadi di Kualanamu adalah persoalan yang mesti direspons secara profesional dan serius. Setelah melakukan penilaian secara terukur dan berlandaskan semangat good corporate governance, maka langkah tegas mesti diambil.

Erick menegaskan seluruh BUMN terikat pada kesepakatan bersama untuk bertindak profesional sesuai dengan core value yang dicanangkan, yakni amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. "Karena



memang sudah tak sejalan dengan core value tersebut, maka tidak memandang siapa dan apa jabatannya, maka kami persilakan untuk berkarier di tempat lain," kata Erick.

JUNI

Kementerian BUMN dibentuknya BUMN Leadership and Management Institute (BLMI), sebuah pusat riset, inovasi, kolaborasi, dan pengembangan manajemen dan kepemimpinan di seluruh klaster BUMN pada 7 Juni 2021. Inisiatif strategis ini bertujuan untuk membangun kapabilitas kepemimpinan di BUMN yang berkelas dunia, berbasis AKHLAK dan mampu bersaing



ditingkat global.

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, "Upaya transformasi yang dicanangkan Kementerian BUMN terhadap perusahaan-perusahaan BUMN menjadi perusahaan yang akuntabel, profesional, dan berkelas dunia, tidak mungkin terjadi tanpa transformasi human capitalnya. Karena itu kami membangun program yang bukan ad hoc, tetapi terstruktur, menyeluruh, dan berkelanjutan, yaitu BUMN Leadership and Management Institute."

Kementerian BUMN telah menunjuk Mandiri Corporate University sebagai koordinator, untuk bersinergi dengan Corporate University dari Telkom, Per-

tamina, dan WIKA dalam membangun peta jalan dan program pengembangan kepemimpinan mulai dari new entry level, manajer tingkat pertama sampai dengan tingkat Direksi dan Komisaris/Pengawas.

JULI

Sebagai bagian dari kontribusi BUMN dalam sektor kesehatan, Erick Thohir turun langsung, dalam kebutuhan oksigen dan obat-obatan. Selain memastikan distribusi, dan harga obat yang memadai lewat BUMN sektor farmasi.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, Perusahaan-perusahaan BUMN

strategis seperti Pertamina Group termasuk di dalamnya adalah PGN, Krakatau Steel dan Pupuk Indonesia Group yang di dalamnya ada Petrokimia dan juga PUSRI. Tak kalah penting, Pelindo ikut aktif dalam infratraktur logistiknya.

"BUMN bergerak cepat di segala lini. Ini terutama untuk membantu ketersediaan oksigen. Beberapa perusahaan BUMN suda menyalurkan oksigen ke sejumlah wilayah yang membutuhkan," ujar Erick Thohir.

Menurut Erick, dengan fasilitas yang dimiliki mulai dari rola material hingga jaringan distribusi, dia menegaskan bahwa fokus BUMN adalah untuk membantu penanganan pandemi. Dia

optimistis langkah cepat yang dilakukan perusahaan-perusahaan BUMN akan cepat dalam merespons kebutuhan di lapangan.

AGUSTUS

Pertamina berhasil menembus kembali daftar 500 perusahaan terbesar dunia versi Fortune. Dalam Fortune 500, menempatkan Pertamina di peringkat ke 287 dengan nilai pemasukan (revenue rating) sekitar USD49,469 miliar.

Prestasi Pertamina menembus kem-

syarat, baik kualitas dan kapabilitas, untuk menunjangnya sebagai salah satu perusahaan besar dunia,” ujar Erick.

Dia memandang bahwa pengakuan dunia akan eksistensi Pertamina adalah bukti berjalannya pembersihan organisasi. Salah satu perubahan yang dinilai penting adalah menerapkan core value perusahaan yang amanah, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selama ini, kata Erick, Pertamina tidak pernah kekuarangan sumber daya yang mumpuni.

positif. Sejak awal tahun, pasar modal Indonesia mengalami pertumbuhan 2,56 persen.

Erick optimistis dengan semakin banyaknya BUMN maupun anak usaha BUMN yang melantai di bursa akan semakin membuat bergeliatnya pasar modal di Indonesia. “Kami mendorong banyaknya nanti korporasi BUMN untuk go public,” kata Erick.

OKTOBER

Kementerian Badan Usaha Milik Negara mendapatkan apresiasi dari



bali daftar Fortune Top 500 dinilai Menteri BUMN sebagai wujud dari kerja keras seluruh elemen perusahaan. Namun Menurut Erick, Pertamina bisa untuk bersaing sebagai salah satu perusahaan terbesar dunia.

“Saya optimistis bahwa kinerja Pertamina dapat lebih baik lagi. Dan frame bagi Pertamina adalah mesti bersaing dengan kompetitor di level dunia. Sebab Pertamina memiliki segala

SEPTEMBER

Erick Thohir mendorong perusahaan BUMN untuk melantai di pasar modal. Misi Erick memacu BUMN untuk go public selaras dengan target untuk menempatkan bursa Indonesia menjadi pasar modal terbesar di Asia Tenggara.

Di saat pasar modal di sejumlah negara dunia melambat, bursa Indonesia justru mampu mencatat pertumbuhan

Komite Aparatur Sipil Negara. Kementerian yang dipimpin oleh Menteri BUMN Erick Thohir tersebut berhasil meraih posisi sebagai instansi pemerintah dengan Sistem Merit terbaik.

Erick Thohir mengatakan, penilaian dari KASN membuktikan bahwa transformasi yang dilakukan di Kementerian BUMN berjalan sangat baik. Meskipun menghadapi situasi pandemi, Kementerian BUMN mampu berinovasi dalam

menciptakan situasi kerja yang aman dan nyaman bagi seluruh pegawai.

Pencapaian Kementerian BUMN ini tidak lantas membuat jumawa. Erick memastikan, hal ini akan semakin memacu Kementerian untuk bekerja lebih baik lagi agar dapat mempertahankan nilai Sistem Merit terbaik.

"Hal ini bukan membuat kami terlena, tetapi justru memacu kami untuk mempertahankannya dan biasanya mempertahankannya itu lebih sulit. Bahwa transformasi BUMN dari segi sumber daya manusia juga dinilai sangat baik," ujar dia.

erjasama dengan Bio Farma dalam alih teknologi pengembangan vaksin mRNA," kata Erick dalam akun Instagramnya @erickthohir.

Menurut dia, ke depan Indonesia akan mampu mendorong produk bioteknologi tanah air semakin berkembang, sehingga bisa mewujudkan kemandirian kesehatan Indonesia.

Pertemuan ini dilakukan bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)

pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Kementerian BUMN dipandang berhasil berkontribusi dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Peran BUMN mampu mendorong UMKM tetap mampu berkompetisi dengan organisasi usaha dengan skala lebih besar.

Erick Thohir menilai penghargaan dari KPPU mesti menjadi pelecuk bagi seluruh BUMN agar terus menggan- deng sektor UMKM dalam proses bisnis. Menurut Erick, BUMN mesti menja-



NOVEMBER

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bertemu dengan pendiri Microsoft sekaligus filantropi Bill Gates. Pertemuan itu membahas kerja sama antara Gates Foundation dan PT Bio Farma (Persero) terkait pengembangan vaksin.

"Selain berdiskusi mengenai isu perubahan iklim, kami juga membahas minat Gates Foundation untuk bek-

Pemimpin Dunia COP26, di Scottish Event Campus, Glasgow, Skotlandia, 1 November.

DESEMBER

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memberikan penghargaan kepada Kementerian BUMN atas kiprahnya dalam mendukung persaingan usaha yang sehat. Ini tergambar dari keberpihakan Kementerian BUMN

di motor yang memelihara iklim bisnis yang sehat.

"Artinya BUMN mesti menjadi motor utama yang tak sekadar memproteksi kepentingan UMKM, tapi sekaligus menumbuhkannya. Proses bisnis BUMN selalu untuk kepentingan yang lebih besar, tak sekadar menciptakan performa finansial untuk perusahaan sendiri tapi memberi manfaat bagi lingkungan," ujar Erick. •



NFO DPD

BERJUANG MENUJU BIKAMERAL EFEKTIF

Sepanjang tahun 2021, DPD RI terus bekerja secara produktif meski situasi masih pandemi COVID-19 seperti pembahasan RUU Daerah Kepulauan, UU BUMDes, dan kontribusi lembaga perwakilan daerah tingkat pusat itu dalam Pansus Otonomi Khusus Papua.



Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga kekuasaan legislatif, DPD RI berperan untuk mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya.

Selain itu, peran lainnya ialah pen-

RUU BUMDES

RUU BUMDes merupakan salah satu RUU yang diinisiasi oleh DPD RI dan telah diserahkan ke DPR RI. Dalam proses pembahasan legislasi antara DPD RI bersama dengan DPR RI dan pemerintah pada tanggal 14 Januari 2021 menetapkan RUU BUMDes termasuk dalam 33 RUU daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2021. Namun, hingga Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang II 2021-2022

pun dalam pembangunan desa.

Kedua, UU 6/2014 tentang Desa dinilai sangat parsial dan tidak ada ketentuan yang secara konkrit mengatur tentang keberadaan BUMDes.

Sedangkan masalah ketiga terkait Peraturan Pemerintah (PP) 11/2021 yang lahir sebagai turunan dari UU Cipta Kerja justru membuat kepala daerah semakin pusing karena aturan yang saling tumpang tindih.

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin me-



gajuan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR dan ikut membahas rancangan tersebut.

Agenda ke depan lembaga wakil daerah ini memperjuangkan kamar kedua atau sistem bikameral yang ideal untuk mengawal pembangunan daerah.

Bila hal tersebut dapat terwujud, DPD RI yakin Indonesia akan menjadi negara strong bicameral yang memiliki check and balances.

belum ada pembahasan lanjutan. DPD RI berharap RUU BUMDes dapat dibahas kembali pada Prolegnas Tahun 2022.

Sebagaimana diketahui, penyusunan RUU BUMDes oleh DPD RI pada awal 2020 lalu ini dilatarbelakangi oleh tiga masalah utama.

Pertama, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih berorientasi pada kuantitas dan tidak memperhatikan aspek kualitas, sehingga berpotensi menyebabkan kerugian dalam pengelolaan keuangan desa dan tidak memberikan implikasi apa-

negaskan RUU BUMDes penting untuk disahkan menjadi UU demi memperkuat perekonomian di perdesaan. "Dampaknya akan sangat besar bagi ekonomi negeri ini karena pertumbuhan itu bersifat riil, masif, dan merata di tiap daerah sehingga nantinya desa tidak lagi hanya bergantung pada APBD kabupaten/kota," katanya, Jumat (20/8/2021).

RUU DAERAH KEPULAUAN

UU 23/014 tentang Pemerintah Daerah belum berpihak kepada wilayah kepulauan, terutama terkait dengan



alokasi transfer anggaran dari pusat kepada daerah yang didasarkan pada jumlah penduduk. Selain itu, perlu diarahkan kepada pemulihan tata kelola wilayah (terutama di laut), kewenangan tambahan, dan dukungan pendanaan khusus yang memadai dalam menjawab tuntutan percepatan pembangunan di daerah kepulauan.

DPD RI memandang pembentukan UU tentang Daerah Kepulauan menjadi jawaban dalam mengejar ketertinggalan pembangunan fisik dan sumber daya manusia. Selain itu, UU Daerah Kepulauan bisa menjadi pendongkrak kebangkitan perekonomian daerah kepulauan di masa pandemi.

"Dengan hadirnya RUU Daerah Kepulauan aksesibilitas terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan yang baik,

serta produktivitas pulau-pulau kecil, investasi pesisir dan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir dapat terwujud," kata Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti saat membuka High Level Meeting Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan dengan DPD RI dan DPR RI di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/10/2021).

REVISI UU DESA

DPD RI sedang membahas revisi UU 6/2014 tentang Desa, salah satu poinnya adalah terbentuknya Majelis Perdamiaian Desa (MPD) yang bertugas mendamaikan perselisihan masyarakat.

Wakil Ketua Komite I DPD RI, Filep Wamafma menjelaskan, insiatif RUU tentang Perubahan Kedua UU Desa

dilatarbelakangi setelah mencermati pelaksanaan UU tersebut selama tujuh tahun ini, masih ditemukan berbagai permasalahan dan kendala. Di antaranya terkait kewenangan desa, penyelenggaraan pemilihan kepala desa, penyusunan perangkat desa, fungsi Badan Permusyawaratan Desa, peraturan desa, majelis perdamaian desa, dan keuangan desa.

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menyebut beberapa pasal yang ada dalam UU Desa justru mendistorsi kewenangan desa yang hakekatnya sudah menjadi institusi yang bertanggung jawab dalam pembangunan desa.

RUU PERUBAHAN IKLIM

Saat ini, sisa cadangan hutan Sumatera sudah berada di bawah angka 30



persen. Dalam menyikapi fenomena perubahan iklim, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengajak semua pihak terkait baik LSM, akademisi maupun pemerintah untuk secara bersama-sama menyusun RUU Perubahan Iklim. Sultan menjelaskan, diperlukan agenda mitigasi perubahan iklim lewat pengendalian laju deforestasi dan degradasi hutan, mengingat Indonesia merupakan negara pemfilter karbon

"Kami sedang mengupayakan, agar DPD RI menjadi inisiator bagi diformulasikannya RUU Perubahan Iklim. Indonesia sangat membutuhkan UU ini, tapi tidak semua lembaga bersedia untuk memulainya," kata Sultan, beberapa waktu lalu.

Dalam perkembangannya, gagasan RUU ini menjadi salah satu rekomendasi eksternal Mutakamar Nahdlatul

Ulama (NU) yang ke-34. Menurut Sultan, perhatian NU terhadap isu perubahan iklim telah memberikan harapan baru pada arah kebijakan Indonesia dalam menyikapi fenomena krisis iklim di masa depan.

Untuk mewujudkan rekomendasi tersebut, Sultan memastikan DPD RI siap untuk menjalin kolaborasi dengan cendekiawan NU untuk menyusun RUU perubahan iklim.

UU OTONOMI KHUSUS PAPUA

DPD RI mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang telah menandatangani UU 2/2021 tentang Perubahan kedua atas UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Selanjutnya, Komite I DPD RI akan memberikan bahan masukan dalam penyusunan RPP agar UU Otsus Pap-

ua dapat diimplementasikan sesuai tujuan pembuatannya.

Senator Papua Barat, Filep Wamafma yang juga sebagai Ketua Pansus Papua DPD menyatakan, UU Otsus harus dapat berjalan efektif pada tahun 2022. Dengan demikian, pemerintah pusat maupun daerah sebagai penanggung jawab perlu memastikannya terimplementasi dengan baik sehingga dengan adanya UU Otsus dapat menjawab kebutuhan masyarakat, terutama Orang Asli Papua (OAP).

Filep mencatat setidaknya ada empat hal penting yang perlu segera dilaksanakan oleh pemerintah. Hal yang mendasar pertama adalah terkait alokasi dana Otonomi Khusus untuk sektor pendidikan.

Kedua, aturan yang berkaitan dengan jaminan kesehatan. Menurut Filep,



dibutuhkan skema yang dengan tegas memberikan kepastian bahwa pemerintah menjamin kesehatan orang asli Papua.

Ketiga, hal yang berkaitan dengan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) migas untuk Papua Barat, yakni bagi 7 suku di teluk Bintuni.

Keempat, pemerintah juga perlu mempersiapkan soal pembentukan kursi pengangkatan di kabupaten dan kota. Filep mengatakan mengingat pembentukan kursi pengangkatan masih cukup lama, maka hal ini juga harus dipercepat perangkatnya.

AMENDEMEN UUD 1945

DPD RI mendukung amendemen terbatas UUD 1945. Yakni, memperkuat posisi lembaga perwakilan daerah tingkat pusat tersebut dalam tugas dan fungsinya.

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti mengeluhkan parpol yang menjadi satu-satunya instrumen untuk mengu-

sung calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, hanya parpol melalui fraksi di DPR RI yang memutuskan UU yang mengikat seluruh warga bangsa. Padahal sumbangsih entitas civil society non-partisan terhadap lahirnya bangsa dan negara ini tidaklah kecil. Tetapi mereka terpinggirkan.

Karena itulah DPD RI ingin melakukan penguatan fungsi kelembagaan. La Nyalla menyebut, langkah penguatan kelembagaan DPD RI dilakukan dengan dua kali mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas UU MD3.

"Tetapi, meskipun sudah ada dua Putusan MK, namun UU MD3 masih saja memuat ketentuan pasal-pasal yang mereduksi kewenangan konstitusional sebagaimana telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi," paparnya dalam acara Forum Komunikasi dan Diseminasi Program Kerja dengan Media dan Refleksi Akhir Tahun DPD RI, di Bandung, Jawa Barat,

Jumat (3/12/2021),

Karena itu, DPD RI berpandangan bahwa untuk melakukan penguatan kelembagaan, memang harus secara konsisten melaksanakan perintah Pasal 22C UUD 1945. Di mana keberadaan DPD RI harus diatur melalui UU tersendiri. Seperti juga perintah kepada DPR RI agar diatur melalui UU tersendiri. Tetapi hal ini tidak mudah, karena penentu akhir pengesahan RUU menjadi UU adalah DPR RI bersama pemerintah.

Upaya selanjutnya, kata La Nyalla, proyeksi penguatan kelembagaan DPD RI harus didorong melalui pintu Amandemen Konstitusi.

PRESIDENTIAL THRESHOLD

Tiga anggota DPD RI yakni Tamsil Linrung dari Sulawesi Selatan, Fahira Idris dari Jakarta, dan Edwin Pratama Putra dari Riau melayangkan gugatan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen di



UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam permohonan bernomor 66/PUU/PAN.MK/AP3/12/2021, Fahira dkk. meminta MK menghapus pasal 222 UU Pemilu. Pasal itu mengatur calon presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan minimal 20 persen kursi DPR RI atau 25 persen suara sah nasional.

Fahira dkk berpendapat presidential threshold bertentangan dengan asas pemilu adil pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Mereka menilai ketentuan itu menghalangi munculnya tokoh potensial alternatif di luar partai politik untuk menjadi pilihan bagi rakyat.

VARIAN OMICRON

Sejak pertama kali dilaporkan ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dari Afrika Selatan pada akhir November 2021 lalu, varian Omicron kini sudah menyebar ke lebih dari 100 negara di dunia.

Bahkan di Afrika Selatan dan Ghana tren dominasi Omicron mulai menggantikan Delta. Di Indonesia, temuan kasus baru varian Omicron bertambah.

Menurut anggota DPD RI Fahira Idris, karena adanya ancaman varian Omicron ini maka berbagai upaya harus dilakukan pemerintah misalnya tes epidemiologi dan tes screening harus semakin ditingkatkan.

Selain itu, kata Fahira, surveilans genomik di daerah-daerah berpotensi lonjakan kasus dan juga daerah-daerah yang jadi pintu masuk semakin dikuatkan. Kebijakan surveilans dan karantina di pintu masuk negara juga harus semakin diperketat.

"Sebisanya mungkin jika memang tidak ada keperluan yang sangat mendesak, rencana perjalanan keluar negeri ditunda dulu untuk sementara. Selain itu, kita yang di dalam negeri juga diharapkan selektif dalam berkegiatan," pintanya.

Kebijakan-kebijakan lain juga perlu

diperkuat misalnya percepatan pemberian vaksin booster. •





PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DI TENGAH PANDEMI

Kementerian Dalam Negeri
disibukkan dengan beragam
pekerjaan yang memerlukan
perhatian khusus
sepanjang 2021.



Kementerian yang dipimpin Muhammad Tito Karnavian ini sejak awal 2021 masih sibuk dengan urusan penanganan pandemi COVID-19 di Tanah Air, khususnya terkait aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), mulai dari skala mikro hingga yang berlevel.

Kemendagri sesuai arahan Presiden Joko Widodo juga melakukan pengawasan serta evaluasi terkait pe-

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 pada 6 Januari 2021. Inmendagri dikeluarkan dalam rangka menindaklanjuti penjelasan kebijakan pemerintah dalam rangka pengendalian COVID-19 yang bertujuan untuk keselamatan rakyat, di antaranya melalui konsistensi kepatuhan protokol kesehatan COVID-19 dan pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.

Pada 20 Januari, Mendagri menda-

korban banjir di Jawa Tengah. Sebelumnya, pelayanan serupa sudah dilakukan bagi korban gempa bumi di Sulawesi Barat dan banjir di Kalimantan Selatan.

Pada 26 Februari, Kemendagri melakukan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2020 tahap pertama kepada sekitar 172 daerah.

MARET

Mendagri Tito Karnavian, pada 19 Maret, mengeluarkan Inmendagri



nyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), di mana masih banyak pemda mengendapkan anggarannya di saat seharusnya dibelanjakan untuk menggenjot perekonomian di daerah.

JANUARI

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan Inmendagri tentang

patkan suntikan pertama vaksin COVID-19 CoronaVac dari Sinovac Biotech Ltd di Ruang MCU, RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat.

FEBRUARI

Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggelar pelayanan penggantian dokumen kependudukan bagi

6/2021 tentang Perpanjangan Masa PPKM Berbasis Mikro, mulai 23 Maret hingga 5 April 2021. Dalam perpanjangan ini, wilayah PPKM Mikro diperluas dari hanya tujuh provinsi di Jawa-Bali, ditambah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Pada 29 Maret, Mendagri menanda-



tangani nota kesepahaman antara Kemendagri, Kementerian Sosial, dan Forum Rektor Indonesia (FRI) di Gedung C Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri. Nota Kesepahaman tersebut, terkait dukungan data dan informasi yang presisi menyangkut tata kelola pemerintah desa/kelurahan dan penyelenggaraan sosial desa/kelurahan.

Kemudian, pada 30 Maret, Kemendagri me-launching aplikasi e-Perda yang merupakan layanan berbasis digital yang digunakan oleh pemerintah. Tujuannya agar proses penyusunan Perda antara pusat dan daerah bisa berjalan lebih efisien.

APRIL

Pada 5 April, Mendagri Tito memberikan teguran keras terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe, lantaran melakukan kunjungan ke Papua Nugini (PNG) tanpa melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mendagri Tito mendorong jajaran Ditjen Dukcapil untuk selalu proaktif memaksimalkan pemberian pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk para transgender.

MEI

Mendagri mengeluarkan SE 800/2794/SJ tentang Pembatasan Kegiatan Buka Puasa Bersama pada Bulan Ramadhan dan Pelarangan Open House/Halal bi Halal pada Hari Raya Idulfitri 1442 H/Tahun 2021 yang ditandatangani 4 Mei 2021.

Kemudian, Kemendagri mendorong Pemda tak ragu dalam membelanjakan APBD-nya untuk belanja sektor produktif dalam rangka penanganan COVID-19.

Belanja pemerintah merupakan tulang punggung utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Belanja pemerintah juga mampu menstimulus belanja pihak swasta.

Upaya percepatan dilakukan dengan menerbitkan SE Mendagri bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan Nomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Ba-



rang/Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

JUNI

Kemendagri melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang digelar secara serentak pada 2020 dan 2021 menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia, karena dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Pada 2020, Pilkades digelar di 1.296 desa yang berasal dari 24 kabupaten/kota, dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 4.221.476 orang. Sedangkan pada 2021, per 25 Mei ada sebanyak 2.394 desa dari 36 kabupaten/kota yang menggelar Pilkades, dengan jumlah pemilih sebanyak 4.183.425 orang.

Pada bulan ini, Kemendagri mampu meraih dan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualitan (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut.

JULI

Kemendagri menerbitkan aturan perpanjangan PPKM berbasis mikro,

yang berlaku di luar Pulau Jawa dan Bali, melalui Inmendagri 17/2021. Perpanjangan PPKM Mikro ini menegaskan perlunya seluruh unsur di desa/keurahan dilibatkan dalam penanganan pandemi COVID-19.

Mendagri Tito menekankan agar penegakan hukum dalam pelaksanaan PPKM harus dilaksanakan secara tegas, namun humanis dan tetap manusiawi.

"Bapak Presiden memberikan penekanan yaitu agar dilakukan dengan cara-cara humanis, santun, manusiawi, tidak berlebihan namun tegas," kata Mendagri dalam "Konferensi Pers Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat" secara virtual, Sabtu (17/7/2021).

AGUSTUS

Pada 6 Agustus, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil



• INFO KEMENDAGRI

Kemendagri menjalin kerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan BPJS Kesehatan mengintegrasikan data kependudukan sebagai upaya mempercepat program vaksinasi.

12 Agustus, Mendagri memberikan apresiasi atas capaian realisasi APBD di 5 provinsi, 5 kabupaten, dan 5 Kota. Dari data yang dihimpun, ke-15 daerah tersebut mampu melampaui angka persentase realisasi belanja daerah secara nasional. Adapun persentase tersebut untuk provinsi sebesar 40,29 persen, sedangkan kabupaten/kota sebanyak 35,88 persen.

Pada 24 Agustus, Kemendagri menyatakan, sejumlah kabupaten/kota berhasil turun level PPKM usai men-

erapkan Inmendagri 31, 32, 34 Tahun 2021.

Meski demikian, Mendagri meminta pemerintah daerah untuk tidak lengah dalam menyikapi penurunan level atau pelonggaran PPKM di wilayahnya masing-masing. Penerapan protokol kesehatan 5M, kemudian 3T atau testing, tracing, dan treatment, serta vaksinasi cakupan tinggi harus tetap dipertahankan.

SEPTEMBER

Sebanyak 183 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2020 mengikuti Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri pada

13 September 2021.

Pada bulan ini, Kemendagri juga melaksanakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021. Jumlah pendaftar untuk Kemendagri mengalami peningkatan, di mana tahun ini peserta yang mendaftar sebanyak 8.755 orang, sementara pada 2019 yang hanya mencapai angka 8.513 orang. Padahal, posisi yang dibutuhkan hanya sebanyak 197 orang.

OKTOBER

Mendagri Tito Karnavian, mengumumkan Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027. Ada 11 nama yang mengisi jabatan pada Tim Seleksi tersebut. Daftar tim tersebut mengacu pada Keputusan



Presiden Nomor 120/P Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Masa Jabatan Tahun 2022-2027, dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Masa Jabatan Tahun 2022-2027.

11 anggota Tim Seleksi tersebut yakni Juri Ardiantoro menjabat sebagai Ketua merangkap anggota, Chandra M. Hamzah sebagai Wakil Ketua merangkap anggota, Bahtiar sebagai Sekretaris merangkap anggota. Sementara 8 anggota lainnya yakni, Edward Omar Sharif Hiariej, Airlangga Pribadi Kusman, Hamdi Muluk, Endang Sulastri, I Dewa Gede Palguna, Abdul Ghaffar Rozin, Betti Alisjahbana, dan Poengky Indarty.



Pada 26 Oktober, Kemendagri meraih kategori Informatif dalam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tiga tahun berturut-turut. Setelah pada 2019 dan 2020 Kemendagri meraih kategori penilaian tertinggi dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tersebut.

NOVEMBER

Mendagri Tito Karnavian melakukan evaluasi dan monitoring terkait realisasi APBD setiap minggu untuk terus mendorong Pemda segera mengakselerasi realisasi APBD.

Kata Mendagri, Presiden Joko Widodo mendorong terjadinya percepatan realisasi APBN dan APBD melalui realisasi belanja pemerintah, baik APBN maupun APBD.

Tito secara tegas meminta Pemda mempercepat realisasi belanja APBD 2021 karena berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional.

"Karena kita tahu bahwa lebih dari 700 triliun anggaran dari pemerintah pusat itu ditransfer ke daerah, dan daerah juga memiliki ruang fiskal dari pendapatan asli daerah maupun dari sumber lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang," ujar Mendagri.

DESEMBER

Mendagri Tito Karnavian minta agar pemerintah daerah mengejar target vak-

sinasi di daerah masing-masing dengan mengeluarkan SE 900/7120/SJ tentang Dukungan Percepatan Vaksinasi dan Pembayaran Tenaga Kesehatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

"Dalam rangka mendukung program nasional penanganan pandemi COVID-19, khususnya pemenuhan target vaksinasi dosis pertama sebesar 70 persen hingga akhir Desember 2021, Pemda agar mempercepat pencapaian target tersebut di daerah masing-masing," ujar Mendagri, 16 Desember 2021.

Tito mengatakan, di akhir 2021, pihaknya akan melakukan evaluasi bagi daerah yang tidak mencapai target 70 persen angka vaksin dosis pertamanya. Evaluasi berupa teguran dan akan diberikan sanksi berupa disinsentif atau tidak akan diberikan tambahan Dana Insentif Daerah. Sebaliknya, bagi daerah yang telah memenuhi target, akan kami usulkan kepada Kementerian Keuangan untuk diberikan tambahan Dana Insentif Daerah dan Dana Alokasi Umum.

Sementara, guna mendorong Pemda mempercepat realisasi belanja APBD2021, Kemendagri melakukan serangkaian langkah strategis. Salah satunya melalui pendampingan dan asistensi kepada daerah yang angka realisasi belanja APBD-nya masih rendah. ●





TAHUN KEBANGKITAN OLAHRAGA NASIONAL

(Kemenpora) menjadi salah satu kementerian yang paling sibuk di tahun 2021. Sepanjang tahun ini, kementerian yang dipimpin Zainudin Amali disibukkan dengan beragam event dan kompetisi olahraga, baik di dalam maupun di luar negeri.





Pandemi COVID-19 yang membuat banyak kegiatan di 2020 terpaksa ditunda dan dibatalkan, menjadi pelajaran dalam menggelar event olahraga tahun ini dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Event olahraga di Tanah Air dimulai dengan dibukanya turnamen Indonesia Basketball League (IBL) 2021 yang dimulai pada 10 Maret hingga 4 Juni 2021. Event yang diselenggarakan di dua lokasi berbeda ini, yakni Bogor dan Jakarta, menerapkan sistem bubble atau gelembung guna mencegah pemain, pelatih, ofisial hingga panitia dan media terkena paparan COVID-19.

Penerapan sistem gelembung tersebut bahkan mendapatkan apresiasi dari Zainudin Amali. Menurutnya, pelaksanaan IBL dengan sistem ini telah berjalan sukses.

"Saya senang apa yang dilakukan

IBL, benar-benar sesuai dengan apa yang disampaikan Direktur Utama IBL, Pak Junas, saat rapat koordinasi bersama lalu. Saya apresiasi kepada IBL dan

Perbasi yang telah memenuhi komitmen. Mudah-mudahan semua kegiatan olahraga setelah ini juga bisa berlangsung dengan baik," ujar Mepora, 3



Juni 2021.

Tak lama berselang dari pembukaan IBL, PSSI juga menggelar turnamen sepak bola bertajuk "Piala Menpora 2021". Turnamen yang dilaksanakan di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, 21 Maret hingga 25 April ini, merupakan upaya untuk kembali memanaskan dunia sepak bola Tanah Air yang sempat vakum selama setahun karena pandemi.

Turnamen Piala Menpora 2021 juga merupakan upaya PSSI dengan ban-

tuan Kemenpora untuk bisa kembali menggelar kompetisi Liga 1 musim 2021/2022. Liga 1 musim ini akhirnya bisa kembali bergulir pada 27 Agustus lalu.

Bahkan, akhirnya pada pertengahan November lalu, Menpora juga mengumumkan bahwa pertandingan Liga 1 bisa dihadiri penonton dengan jumlah terbatas. Namun, uji coba itu hanya akan dilaksanakan di stadion yang memiliki single seat.

"PSSI dan PT LIB sedang meng-

godok, tetapi saya mendapatkan informasi dari PSSI dan PT LIB bahwa itu akan diuji coba di stadion yang ada single seat," ungkapnya, 16 November lalu.

Menurutnya, pemilihan stadion yang memiliki single seat bertujuan agar penerapan protokol kesehatan dapat diterapkan dengan baik, khususnya aturan jaga jarak.

"Itu kan penonton terbatas, tiketnya dijual sesuai nomor kursi. Kalau bangku rata bagaimana penomorannya,



pasti akan berdempetan dan tanda silangnya gimana,” jelasnya.

Selain event di dalam negeri, Kemenpora juga disibukkan dengan kontingen Indonesia yang akan berlaga di Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo 2021. Olimpiade Tokyo dimulai pada 23 Juli hingga 8 Agustus 2021. Sementara, Paralimpiade Tokyo digelar 24 Agustus hingga 5 September 2021.

Pada Olimpiade Tokyo, kontingen Indonesia membawa pulang satu emas, satu perak dan dua perunggu.

Sementara, kontingen Paralimpiade Tokyo membawa pulang dua emas, tiga perak dan empat perunggu.

Menpora pun menyatakan pemerintah telah menyiapkan bonus untuk kontingen Indonesia yang berhasil mempersembahkan medali untuk Merah Putih. Peraih emas mendapatkan Rp5,5 miliar, perak Rp2,5 miliar, dan perunggu Rp1,5 miliar. Nominal tersebut besarnya sama antara kontingen Olimpiade dengan Paralimpiade Tokyo. Pemerintah juga memberikan peng-

hargaan kepada para atlet yang belum berhasil mempersembahkan medali dengan nominal sebesar Rp100 juta.

Zainudin menegaskan pemerintah tak akan membedakan fasilitas dan apresiasi antara atlet yang berlaga di Olimpiade dan Paralimpiade.

“Pemerintah tidak membedakan atlet yang ikut Olimpiade dan Paralimpiade. Perhatian sama, fasilitas sama karena mereka datang ke sana atas nama bangsa dan negara,” kata Menpora.





Event besar lain yang berhasil terselesaikan tahun ini tentu saja Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI Papua 2020. Dua event pesat olahraga terbesar Tanah Air itu seharusnya digelar tahun lalu, namun ditunda akibat pandemi COVID-19.

Dua event yang berlangsung sejak awal Oktober hingga pertengahan November ini berjalan dengan sukses untuk pertama kalinya di Bumi Cenderawasih. Selain banyak memunculkan bibit-bibit atlet, lewat PON dan Peparnas diharapkan fasilitas yang dibangun dimanfaatkan untuk pembinaan olahraga nasional, khususnya atlet

“
Menpora bahkan menyebut upaya Indonesia untuk mencabut sanksi itu lebih baik dari negara lainnya yang juga terkena sanksi.

yang berasal dari Indonesia timur.

Di akhir 2021, Indonesia juga sukses menggelar event berskala internasional. Ajang World Superbike (WSBK) dan Asia Talent Cup (ATC) untuk pertama kalinya sejak 1997 kembali digelar di Indonesia, tepatnya di Sirkuit Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Bahkan, tahun depan Indonesia juga bakal menggelar empat kejuaraan balap dunia. Selain WSBK dan ATC, juga akan ada MotoGP dan MXGP, yang semuanya digelar di Mandalika.

Event olahraga internasional di Tanah Air ditutup dengan turnamen bulu tangkis bertajuk “Indonesia Badminton Festivals (IBF) 2021”. Berlangsung



di Nusa Dua, Bali, ada tiga turnamen yang digelar yakni Indonesia Masters, Indonesia Open, dan BWF World Tour Finals.

Sayangnya, Indonesia juga harus menerima sanksi dari Badan Anti Doping Dunia (WADA) karena dinilai tidak patuh terhadap aturan yang diberlakukan. Akibat hal itu, Indonesia dilarang mengibarkan bendera Merah Putih dalam kegiatan olahraga internasional yang diikuti. Namun, saat ini, Indonesia masih melakukan upaya agar sanksi tersebut bisa segera dicabut oleh WADA.

"Saya dapat informasi perkembangan ke arah positif, bahkan benar-be-



nar terjadi percepatan upaya-upaya dari tim LADI dan unsur pemerintah terhadap pemenuhan complain, sebagaimana yang dipersyaratkan WADA kepada LADI," kata Menpora, Senin (13/12/2021).

Menpora bahkan menyebut upaya Indonesia untuk mencabut sanksi itu lebih baik dari negara lainnya yang juga terkena sanksi.

Selain itu, saat ini Menpora juga tengah berkeliling Indonesia untuk melakukan sosialisasi terhadap Perpres 86/2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Dalam DBON itu, terdapat 10 provinsi yang

akan menjadi sentra pembinaan. Yakni Papua, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Kalimantan Timur.

"Ke depan pembinaan akan terfokus dan target jelas, yakni Olimpiade dan Paralimpiade. Ajang Asian Games, Asian ParaGames, SEA Games dan ASEAN ParaGames itu hanya sasaran antara saja ke depannya. Kemudian cabor-cabor yang dibina untuk menuju target dan ranking Olimpiade serta Paralimpiade sudah jelas," ucap Zainudin. ●



NFO KEMANTAN

PERKUAT HILIRISASI PERTANIAN, DONGKRAK NILAI EKSPOR

Riset dan Inovasi Program Strategis

Salah satu program strategis Kementerian Pertanian adalah riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Program riset masuk ke dalam lima Program Kerja Kementan 2021. Adapun, program lainnya antara lain Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan Program Dukungan Manajemen.



Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, dengan berpatokan pada lima program tersebut dan memperhatikan adanya refo-cusing dan realokasi belanja APBN, Kementan tetap harus menjalankan tugas utama menyediakan pangan bagi

pertanian Indonesia, yakni konsepsi/program, lahan, orang, teknologi/mechanisasi dan korporasi/kerja sama. Generasi muda bidang pertanian memiliki tugas berat untuk membangun Indonesia menjadi bangsa yang besar karena sektor pertanian merupakan modal utama untuk menjadikan Indonesia sebagai negara besar.

dapat menggerakkan sektor pertanian lebih baik adalah orang-orang yang memiliki ilmu dan pengalaman pertanian yang baik, agar dapat memberikan rahmat bagi masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, dengan semakin berkembangnya sekolah pertanian, diharapkan pertanian Indonesia tidak kalah dengan petani muda di negara



seluruh penduduk.

Dua pendekatan pelaksanaan kegiatan Kementan dikategorikan menjadi kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian bertanggung jawab mendukung kegiatan utama melalui penguatan riset dan inovasi teknologi pertanian, seperti akselerasi pemanfaatan teknologi inovasi pertanian melalui penguatan kapasitas riset di daerah, penelitian/perakitan/pemurnian varietas tanaman dan galur ternak unggul dan hilirisasi inovasi.

LIMA POIN PENTING MEMBANGUN PERTANIAN

Terdapat lima poin penting yang dibutuhkan dalam membangun per-

Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini menyebabkan krisis di berbagai negara, namun Indonesia dapat tetap survive karena sektor pertanian menjadi penyangga utama perekonomian bangsa. Pertanian merupakan sektor yang mampu bertahan di tengah situasi luar biasa seperti pandemi. Ketika sektor lainnya terkoreksi, pertanian justru tumbuh sebesar 16,4 persen. Begitu pula dengan ekspor produk pertanian juga menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Nilai ekspor kumulatif selama Januari-Desember 2020 mencapai Rp451,8 triliun atau meningkat 15,79 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp390,2 triliun.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, menyampaikan bahwa yang

lain, seperti Vietnam, Jepang maupun Tiongkok yang memiliki etos kerja dan ilmu pengetahuan yang baik.

PERLUASAN INDUSTRI SUSU SAPI PERAH

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, menghadiri peletakan batu pertama industri susu di Desa Tonasa, Kecamatan Tombolo, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, pada 16 Maret 2021. Kegiatan ini sebagai implementasi kolaborasi pemerintah bersama swasta, dalam hal ini PT Cimory, untuk mengembangkan industri susu sapi secara merata di Indonesia.

Susu adalah sumber nutrisi yang sangat baik untuk menjaga kecerdasan anak-anak Indonesia di masa



mendatang. Apalagi, kondisi persusuan Indonesia baru terpenuhi sekitar 22 persen dari total kebutuhan susu nasional sebanyak 3,4 juta ton.

"Kita harus menguatkan kemampuan kita sendiri supaya mampu memenuhi susu secara mandiri. Karena itu, ke depan kita harus bisa mengembangkan industri susu di wilayah lain agar semua orang bisa berinvestasi. Ini juga menggembirakan karena budidayanya bisa kita lakukan bersama rakyat dan Cimory mengambil peranan sebagai offtaker," katanya.

Kebutuhan susu nasional masih cukup banyak, terutama untuk pemenuhan susu di wilayah Indonesia Timur. Karena itu, Kementan bersama Pemda Gowa menyambut baik upaya PT Cimory dalam membuka akses serapan susu sapi dari para peternak di Gowa.

"Tentunya kalau kita bertumpu ke Pulau Jawa saja, terutama dengan keterbatasan lahan ini tidak akan cukup. Untuk itu, salah satu inisiasi Kementan adalah mengembangkan sapi perah di luar pulau Jawa. Insya Allah kita akan

memulai dengan membangun inkubator dari pengembangan sapi perah di Kabupaten Gowa," kata Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Nasrullah.

PRESIDEN BUKTIKAN PRODUKSI PADI MEMUASKAN

Presiden RI, Joko Widodo, bersama Ketua DPR RI, Puan Maharani; Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo; Dirut Bulog, Budi Waseso, dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meninjau lokasi panen raya padi di



Kabupaten Malang, guna membuktikan langsung kondisi perberasan nasional hasil panen awal tahun 2021. Alhasil, produksi padi di lokasi panen memuaskan hingga mencapai 12 ton Gabah Kering Panen (GKP) per hektare.

Presiden menegaskan upaya memastikan langsung produksi dan stok beras nasional saat ini sangat penting. Pasalnya, kebutuhan beras masyarakat merupakan agenda utama pemerintah yang harus dipenuhi dan menjadi dasar dalam mengambil ke-



bijakan yang tepat yakni impor atau tidaknya.

"Sehingga, kalau itu betul-betul ada barangnya, ada padi yang dipanen dan muncul produksi menjadi beras, sehingga mengenai jumlah betul-betul bisa dihitung. Oleh sebab itu kita tidak perlu yang namanya impor. Tapi itu hitungannya harus benar-benar pasti karena menyangkut masalah perut, masalah makan rakyat," kata Presiden.

Mentan mengatakan, kebutuhan petani sangat penting terkait alat mesin pertanian dan Kementerian mere-

alisasikan dan meningkatkan jumlah bantuan sesuai dengan kebutuhan petani. Penanganan pra dan pasca panen merupakan agenda prioritas Kementan dalam meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani, sehingga ketahanan pangan khususnya beras benar-benar terwujud.

KERJA SAMA BARENG RUSIA

Indonesia dan Rusia menjalin kerja sama sektor pertanian yang meliputi kerja sama teknis, riset, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pro-

• INFO KEMANTAN

mosi bersama serta peningkatan investasi.

Memorandum of Understanding (MoU) bidang pertanian sangat penting bagi kedua negara sebagai payung hukum untuk penyelenggaraan berbagai kerja sama sektor pertanian. MoU sekaligus menjadi landasan bagi otoritas pertanian kedua negara untuk membentuk Kelompok Kerja Tingkat Pejabat Teknis (Working Group on Ag-

pertanian, kerja sama ini juga menjadi kesempatan bagi kedua negara dalam melakukan transfer teknologi yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

EKSPOR PERTANIAN NAIK 33,04 PERSEN

Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor sektor pertanian pada Juni 2021 mengalami kenaikan, yakni

Di samping itu, upah nominal buruh tani secara nasional pada Juni 2021 juga mengalami kenaikan sebesar 0,11 persen. Begitu juga dengan upah buruh tani secara riil yang mengalami kenaikan 0,27 persen. Kenaikan serupa juga terjadi pada upah nominal dan upah riil buruh bangunan.

Sebagaimana laporan BPS, sektor pertanian sejak triwulan II-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 16,24



riculture) yang akan menyusun Rencana Aksi Implementasi (Action Plan) yang bersifat konkret dari berbagai komitmen kerja sama yang disepakati.

Data yang dihimpun, ekspor utama produk pertanian Indonesia ke Rusia yaitu kelapa sawit sebesar USD467 juta, kelapa (USD40 juta), kakao (USD39 juta), kopi (USD37 juta) dan karet (USD32 juta). Sementara, impor utama dari Rusia yaitu gandum (USD16 juta), ketumbar (USD6 juta), gula tebu (USD2 juta), obat hewan (USD3 juta) dan sayuran olahan (USD70 ribu).

Selain ekspor dan impor produk

sebesar 33,04 persen (m to m) atau 15,19 persen secara tahunan (y on y). Kenaikan terjadi setelah komoditas tanaman obat, aromatik, rempah, kopi dan sarang burung walet memberi andil besar.

Secara nilai, ekspor sektor pertanian tercatat mencapai sebesar USD0,32 miliar. Dengan kenaikan tersebut, ekspor nonmigas secara nasional menyumbang sebesar 93,36 persen dari total nilai ekspor Juni 2021 yang mencapai USD18,55 miliar atau naik sebesar 9,52 persen jika dibandingkan ekspor pada bulan Mei.

persen (q to q) dengan nilai ekspor pada Januari-Desember naik 15,79 persen atau sekitar Rp451,77 triliun. Lalu pada triwulan I-2021, sektor pertanian juga tumbuh meyakinkan dengan angka sebesar 2,95 persen (y on y).

BPS mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) pada Mei 2021 mengalami kenaikan signifikan. Bahkan, kenaikan terjadi secara konsisten yang dihitung sejak Oktober 2020 hingga Mei 2021. Menilik angkanya, NTP Oktober 2020 mencapai 102,25, kemudian pada November 102,86, Desember 103,25,

Januari 103,26, Februari 103,10, Maret 103,29, April 102,93 dan Mei 103,29 atau naik 0,44 persen.

Begitupun dengan NTUP yang naik konsisten sejak Oktober 2020 yakni sebesar 1002,42. Lalu pada November mencapai 103,28, Desember 104,00, Januari 104,01, Februari 103,72, Maret 103,87, April 103,55 dan Mei mencapai 104,04 atau naik 0,48 persen.

Konsistennya pertumbuhan sektor

tan Balloci, Sulawesi Selatan. Di sana, lahan porang yang digarap kurang lebih mencapai 550 hektare dari total 1.000 hektare yang disiapkan di dua Kecamatan.

Tanaman porang adalah komoditas unggulan Indonesia yang memiliki potensi besar dalam membuat berbagai produk olahan siap ekspor. Oleh karena itu, Kabupaten Pangkep akan diproyeksikan sebagai salah satu lum-

Tahun 2021 Provinsi Sulsel mendapat alokasi kegiatan penanaman porang seluas 20 hektare di 11 kabupaten, di antaranya Kabupaten Soppeng, Sidenreng Rappang, Wajo, Sinjai, Barru, Maros, Bantaeng, Takalar, Bulukumba dan Luwu Utara dengan bantuan full paket benih dan pupuk.

Meningkatnya penanaman porang dipicu oleh tingginya minat petani bercocok tanam komoditas ini karena



pertanian di masa pandemi tidak lepas dari kerja dan kolaborasi semua pihak dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern. Kenaikan NTP, NTUP dan ekspor pertanian adalah bukti bahwa sektor ini menjadi bantalan perekonomian bangsa di tengah pandemi.

1.000 HEKTARE LAHAN PORANG

Kementerian Pertanian bersama Pemerintah Kabupaten Pangkep mulai menggarap lahan porang di Kampung Celai, Kelurahan Balleanggi, Kecama-

bung porang nasional.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, meminta seluruh eksportir dan unsur pimpinan daerah agar tidak melakukan ekspor bibit porang sebagai upaya bersama dalam menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil porang global.

Pengembangan budidaya porang di Sulsel melalui fasilitasi bantuan pemerintah dimulai pada tahun 2020 seluas 577 hektare, meliputi bantuan seluas 13 hektare untuk pilot project/kebun bibit dan 564 hektare bantuan pupuk yang dialokasikan di enam kabupaten.

adanya keuntungan yang memadai, berkembangnya industri olahan berbahan baku serta didukung oleh kesesuaian lahan.

PERTANIAN KEKUATAN MASA DEPAN INDONESIA

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Dengan potensi tersebut, pertanian bisa menjadi kekuatan utama pembangunan di masa depan. Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, untuk membangun bangsa ini, yang paling siap adalah

pertanian. Di mana, sumber dayanya sudah ada. Tapi semuanya harus dikejar lebih cepat.

Era digital saat ini semakin mendorong percepatan pembangunan pertanian Indonesia. Untuk itu, generasi milenial dapat meninggalkan pola pikir lama dalam bertani. Untuk sukses di pertanian, setidaknya ada sejumlah kriteria yang harus dimiliki oleh petani milenial. Pertama, petani milenial harus terkoneksi, baik dengan alam, manusia dan juga ilmu pengetahuan. Berikutnya, harus mampu berkompetisi sehat. Dalam menciptakan persaingan yang baik,

ficial intelligence. Dengan peralatan modern, bertani bisa dilakukan secara otomatis,” terang Mentan.

PANEN JAGUNG NUSANTARA

Kementerian Pertanian menggelar panen jagung Nusantara dalam memperingati Hari Tani Nasional, sekaligus memastikan dan mengoptimalkan produksi dalam negeri guna memenuhi kebutuhan pakan ternak secara mandiri. Panen jagung nasional berlangsung hingga akhir tahun 2021, di mana perkiraan luas panen September ini 299.059 hektare, Oktober 230.157 hektare, November 207.264 hektare

menambahkan stok akhir Desember 2020 (carry over) sebesar 1,43 juta ton, diperoleh stok jagung 2021 sebanyak 2,85 juta ton.

Ketersediaan jagung dalam negeri dipastikan aman, sebab jagung merupakan komoditas yang mudah ditanam di seluruh Indonesia. Untuk itu, Kementan menegaskan terus menggenjot produksi jagung, khususnya untuk mencukupi kebutuhan pakan ternak secara nasional. Semua pihak, termasuk perusahaan pakan diminta untuk melakukan penyerapan jagung dari petani lokal secara maksimal.



sesama petani tidak boleh saling sikut dan menjatuhkan.

Selain itu, petani milenial harus kritis dan memiliki komitmen tinggi. Dengan tersedianya fasilitas teknologi dan inovasi terbaru, modal terbesar yang harus dimiliki adalah semangat. Untuk itu, generasi milenial diminta tidak ragu terjun ke sektor pertanian. Dengan pemanfaatan teknologi digital, bertani menjadi lebih mudah dan efisien.

“Bertani sekarang bisa dengan gadget, robot construction dan arti-

dan Desember 197.265 hektare. Dengan produksi masing-masing 1,21 juta ton, 916.759 ton, 1 juta ton dan 881.787 ton.

Berdasarkan data prognosa Kementan dan BPS, luas panen jagung nasional periode Januari-Desember seluas 4,15 juta hektare, produksi bersihnya sebesar 15,79 juta ton dengan kadar air 14 persen. Sementara kebutuhan jagung setahun untuk pakan, konsumsi dan industri pangan totalnya 14,37 juta ton, sehingga dengan me-

STOK PRODUKSI PANGAN AMAN

Kementerian Pertanian terus memacu produksi pangan guna memastikan stok terjamin dalam kondisi aman. Terbukti, BPS melaporkan potensi produksi padi 2021 mencapai 55,27 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau mengalami kenaikan 1,14 persen dibandingkan tahun 2020.

Kementan mengupayakan tiada hari tanpa panen dan tanam di berbagai titik di Indonesia. Sesuai arahan Pres-

iden Jokowi, hal ini merupakan upaya dalam memastikan ketersediaan bahan pangan, menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Ke depan, sektor pertanian dunia diterpa berbagai tantangan. FAO melaporkan ada empat tantangan yang akan dihadapi dunia yakni pangan, energi, air dan infrastruktur. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengantisipasi tantangan yang ada dengan berbagai program, inovasi dan research serta teknologi, sehingga sektor pertanian terus eksis dan terus menjawab tantangan pangan.

berkontribusi dalam neraca perdagangan. Nilai ekspor pertanian relatif tumbuh positif setiap bulannya, bahkan dari tahun lalu.

Demikian disampaikan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, saat melepas ekspor pertanian senilai Rp568,7 miliar di Pelabuhan Peti Kemas JICT Tanjung Priok. Tak tanggung-tanggung, ekspor kali ini dengan volume sebanyak 13,19 ribu ton yang dikirim ke 26 negara tujuan, di antaranya Amerika Serikat, Inggris, Polandia, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Thailand, dan Latvia.

Ekspor ini adalah langkah kon-

KEBIJAKAN SEKTOR PERTANIAN TERBUKA DAN TRANSPARAN

Semua kebijakan dan program di lingkup Kementerian Pertanian selalu dilakukan secara terbuka dan transparan. Hal ini dilakukan semata-mata agar publik mendapat lebih banyak kemudahan, terutama dalam hal pelayanan.

Dalam setiap tindakan harus berdasarkan pada tingkat kecepatan dan tingkat kecermatan. Semua harus terkendali dari satu pintu yakni kebijakan yang sesuai dengan kepentingan publik.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata,



Dengan tantangan yang sangat besar diperlukan antisipasi sedini mungkin. Salah satunya dengan menghadirkan pertanian dalam pikiran, pertanian sebagai lapangan kerja, serta menanamkan kepada generasi muda bahwa bertani itu hebat dan menjadi petani itu pasti keren.

BERANI MELOMPAT GENJOT EKSPOR

Meski diterpa pandemi COVID-19, sektor pertanian tetap berproduksi dan

ret dalam melaksanakan instruksi Presiden Jokowi. Untuk itu, pejabat terkait diminta dapat melakukan langkah yang diperlukan, seperti percepatan pelayanan, transparansi dan lainnya agar para pengusaha dapat lebih mudah melakukan bisnis dan ekspor.

Pada saat Merdeka Ekspor 17 Agustus 2021, dalam tujuh hari, ekspor naik Rp7,2 triliun, namun belum semua kabupaten bisa ekspor. Itu yang perlu didorong.

mengingatkan bahwa pentingnya sektor pertanian sebagai sumber kehidupan yang berkelanjutan. Karena itu, ia meminta agar semua program dan kebijakan yang dijalankan tidak dikotori dengan praktik korupsi. Artinya, setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan selalu memenuhi unsur peraturan.

Ia berharap program Kementan yang sudah bagus selama ini tidak dikotori dengan korupsi. Sebab korupsi bisa berdampak pada penyediaan lapangan kerja maupun ketersediaan pangan. •



KERJA NYATA PERKUAT KEMARITIMAN

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di bawah kepemimpinan Luhut Binsar Pandjaitan terus bersinergi bersama kementerian/lembaga terkait dalam upaya memajukan masyarakat dan bangsa Indonesia. Mulai dari memperbanyak lahan food estate di sektor pertanian, konsentrasi pada perubahan iklim, percepatan pembangunan infrastruktur hingga pengembangan energi listrik. Tentu saja, sesuai bidangnya, Kemenko Marves juga terus berupaya memantapkan posisi Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia.



Berikut program-program cerdas dan nyata yang dijalankan Kemenko Marves sepanjang tahun 2021:

JANUARI

Untuk memajukan food estate di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah serta pertanian di Indonesia perlu menggarap sektor pertanian secara modern agar mendapatkan hasil lebih baik. Terdapat tiga pokok utama dalam pengembangan sektor pertanian yaitu pupuk, bibit serta alat dan mesin pertanian (alsintan). Peralatan pertanian yang memiliki potensi full mechanized perlu diupayakan berasal dari produksi dalam negeri untuk mendorong Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) seperti pada pekerjaan persiapan lahan, penanaman, panen dan pascapanen.

FEBRUARI

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves memfasilitasi Asistensi Mekanisme Perizinan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan di Luar Sektor Kehutanan dan Pembahasan Lanjutan Usulan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah di Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Nganjuk. Kedua daerah mengajukan beberapa permohonan pembangunan infrastruktur yang diusulkan menggunakan dana PEN Padat Karya. Usulan mencakup pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan irigasi dan normalisasi sungai, pengembangan kawasan food estate, pengadaan kapal antarpulau dan kawasan ekonomi khusus dan lain-lain.

MARET

Percepatan implementasi Nasional Logistic Ecosystem (NLE) tahun 2021 diatur dalam Inpres Nomor 5/2020. Selain itu didukung oleh SK Menkeu Nomor 56/KMK.4/2021. Dalam hal ini, Kemenko Marves ikut serta dikarenakan adanya kegiatan yang berkaitan dengan pelabuhan.

NLE telah terhubung dan berinteraksi dengan ekosistem nasional dan internasional serta melibatkan lembaga





pemerintah dan swasta. Terdapat empat program membangun sistem logistik nasional, yakni simplifikasi probis layanan pemerintah di bidang logistik, kolaborasi sistem layanan logistik (domestik dan internasional), kemudahan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitasi pembayaran antara pelaku usaha, penataan tata ruang kepelabuhanan dan jalur distribusi barang.

APRIL

Kemenko Marves mendorong pe-

manfaatan teknologi IPAL oleh swasta di sektor publik, mengingat implementasinya dapat mendukung infrastruktur air baku dan pengaman pantai Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN). Teknologi ini akan lebih baik bila dapat dibuatkan modul kecil sehingga nantinya IPAL komunal dapat mudah digunakan di suatu kompleks perumahan warga. IPAL ramah lingkungan dapat mendukung program Citarum Harum yang melibatkan pengolahan terhadap air limbah rumah tangga sebelum masuk ke aliran

sungai.

Contohnya penggunaan IPAL di kawasan industri PT Suryacipta. Di mana, teknologi FCR mengkonsumsi energi yang lebih sedikit, sehingga akan meninggalkan jejak karbon yang lebih kecil, mengurangi pemakaian lahan karena dapat dibangun secara vertikal, mengurangi biaya pembangunan infrastruktur.

MEI

Kapal berbendera Indonesia kini resmi masuk dalam kriteria white list To-



kyo MoU Port State Control in the Asia-Pacific. Sebelumnya Indonesia berada pada posisi grey list dan black list, selama bergabung dengan Tokyo MoU sejak 1993. Keluarnya posisi Indonesia dari black list ke grey list dan sekarang sudah menjadi white list memberikan banyak manfaat terutama dapat menekan biaya logistik. Selain itu kualitas kapal, pelaut Indonesia, pelabuhan dan pemeriksa maritim akan semakin baik.

JUNI

Menko Marves, Luhut Binsar Pan-



djaitan, menyampaikan, pemerintah sangat menaruh perhatian kepada masyarakat dan wilayah yang terkena dampak perubahan iklim global dan menekankan pentingnya edukasi mitigasi bencana. Dalam Rakorbangnas BMKG 2021, ia menekankan pemerintah perlu melakukan inovasi teknologi dan peningkatan kapasitas SDM agar mampu memonitor, menganalisis, memprediksi serta memberikan informasi dan peringatan dini terhadap potensi multi bencana geo-hidrometeorologi secara cepat, tepat dan akurat.

JULI

Menko Marves Luhut B. Pandjaitan melaksanakan kunjungan ke Pabrik Hyundai Motor Indonesia untuk memonitor kemajuan pengembangan kendaraan listrik di Indonesia, persiapan KTT G20 hingga produksi oksigen medis oleh Hyundai. Pemerintah sangat bersemangat untuk pelaksanaan groundbreaking yang akan datang untuk konsorsium Hyundai dengan LG Chem, KIA, Mobiss dan IBC untuk paket baterai dan sel produksi yang akan menciptakan lapangan kerja

• INFO KEMENKO MARVES

dan meningkatkan perekonomian nasional. Dalam hal ini, pemerintah sudah membahas mengenai aspek regulasi dan peta jalan (road map) untuk kendaraan listrik.

AGUSTUS

Kemenko Marves menyusun Haluan Maritim Nasional 2045. Roadmap terus dikuatkan untuk betul-betul mengua-

visi tersebut terdapat dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang kuat dan mewujudkan Indonesia menjadi bangsa bahari yang unggul.

SEPTEMBER

Kemenko Marves berupaya terus mempermudah publik dalam menyampaikan aspirasinya. Yang menjadi

saja. Aplikasi ini dibangun untuk menambah jangkauan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan maupun pertanyaan dan terintegrasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

OKTOBER

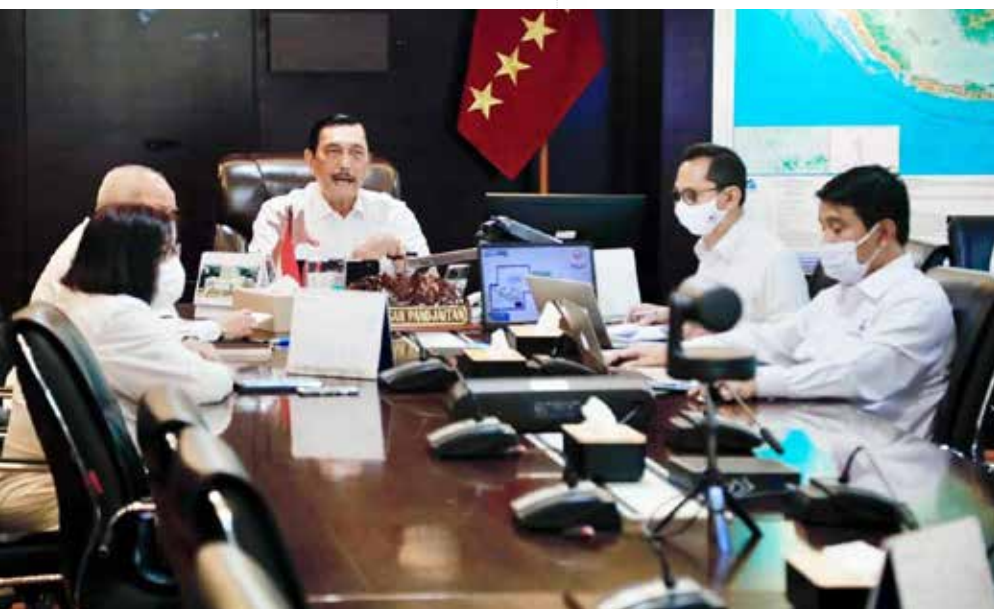
Begitu banyak potensi alam yang dimiliki Indonesia tidak menutup kemungkinan ancaman perubahan iklim ekstrem juga begitu besar. Indonesia terus melakukan berbagai langkah strategis untuk menghadapi hal tersebut. Ketersediaan karbon di Indonesia begitu melimpah dan mampu menjadi pengganti penting bagi minyak bumi dan mengurangi efek emisi gas rumah kaca. Presiden RI telah menandatangani kesepakatan tentang harga karbon demi mendukung pemenuhan target NDC Indonesia.

NOVEMBER

Kemenko Marves memperoleh penghargaan peringkat pertama dalam kategori kementerian dalam Anugerah JDIH Nasional Tahun 2021 yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan HAM. Penghargaan yang diperoleh merupakan bentuk keseriusan dalam memberikan layanan dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat. Dari hasil penilaian yang dilakukan oleh tim nasional BPHN, Kemenko Marves dinilai memiliki keunggulan dan karakteristik tersendiri dalam memberikan pelayanan berbagai informasi hukum yang tidak dimiliki oleh pengelola JDIH Kementerian lainnya.

DESEMBER

Menko Marves, Luhut Pandjaitan, mengajak investor AS untuk menanamkan modalnya di Jalan Tol Trans-Sumatera atau JTTS. Prospek investasi jalan tol di Indonesia di mata investor asing cukup bagus. Untuk Tol Trans-Sumatera, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan untuk dituntaskan. Sekarang, sebagian ruas Tol Trans-Sumatera sudah berjalan sampai ke Betung, Medan dan kemudian sampai Parapat serta dari Medan ke Aceh. ●



sai seluruh aspek. Penyusunan HMN juga dilakukan guna mencapai Indonesia Emas pada 2045. HMN 2045 berisi konsep pembangunan kemaritiman dan investasi, dalam rangka persiapan RPJP tahun 2024-2045. Indonesia memiliki Visi Maritim 2045 untuk menjadi pusat peradaban maritim dunia. Dari

andalan adalah aplikasi PESAN (Pengelolaan Sistem Informasi Aspirasi Kemaritiman) yang telah diluncurkan sejak 4 September 2018. Dengan menggunakan PESAN masyarakat bisa dengan mudah menyampaikan aspirasinya, tidak peduli jarak dan waktu, hanya menggunakan internet



Lautan informasi di dunia maya melalui jaringan internet memberikan banyak referensi **INFO** kepada masyarakat Sumsel



Social media

WEBSITE: @infosumsel.id
 facebook: @infosumsel.id
 twitter: @id_infosumsel
 Instagram: @infosumsel_id
 YouTube: info sumsel

Palembang
 Jl. Puncak Sekuning, Lorong Sahabat
 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I
 Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan 30126

Telp : 0711-7442344
 Email : infosumsel.redaksi@gmail.com



NFO MPR

TERUS BERGERAK MENJAGA HALUAN NEGARA

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terus bergerak dengan menjalankan peran penting dalam proses berbangsa dan bernegara, khususnya di bawah kepemimpinan Bambang Soe-satyo.



Pada 2019 lalu, MPR resmi menunjuk pria yang akrab disapa Bamsoet dari Fraksi Golkar sebagai ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat.

Sementara, wakil ketua yang dipilih fraksi yaitu Ahmad Basarah (PDIP), Ahmad Muzani (Gerindra), Lestari Murdijat (Nasdem), Jazilul Fawaid (PKB), Syarifuddin Hasan (Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS), Zulkifli Hasan (PAN), Arsul Sani (PPP), dan Fadel mhammad dari Kelompok DPD.

Hingga penghujung 2021, MPR telah menjalankan tugasnya sebagai lembaga negara guna menjaga demokrasi, hingga mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Berbagai warna dilalui dan dihadapi MPR, dari amendemen UUD 1945 untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), menggencarkan sosialisasi Empat Pilar MPR, dan memantau segala kebijakan pemer-

intah, khususnya dalam penanganan pandemi COVID-19 yang hampir dua tahun menyebar di Indonesia.

JANUARI

Pada awal Januari, Syarief Hasan meminta agar pemerintah memberikan perhatian terhadap perairan Natuna Utara, dengan meningkatkan pertahanan militer jika sewaktu-waktu terjadi perang terbuka.

Kemudian, Bamsoet mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan realisasi vaksinasi, khususnya dengan kehadiran varian baru corona yang pertama kali terdeteksi di Inggris, yakni varian Under Investigation atau VUI0202012/01.

Bamsoet meminta pemerintah untuk all out mendapatkan 426 juta dosis guna mewujudkan kekebalan komunitas atau herd immunity dalam negeri. Di mana dari jumlah vaksin tersebut harus disuntikkan sedikitnya 188 juta penduduk dari total 259 juta pen-

duduk Indonesia.

Selain itu, MPR juga sempat meminta Kementerian Pertanian untuk menangani kelangkaan pupuk bersubsidi. Hal itu diketahui karena munculnya kebijakan pemerintah untuk melakukan pengurangan kuota pupuk bersubsidi sebesar 50 persen. Sehingga berimbas pada petani, masyarakat kecil, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang pertanian.

FEBRUARI

Di awal Februari, Bamsoet melantik Irwan Ardy Hasman sebagai anggota pergantian antar waktu MPR dari Fraksi Partai Gerindra. Pada pelantikan tersebut, Bamsoet mengingatkan anggota MPR untuk memasyarakatkan Empat Pilar, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Metode sosialisasinya pun harus dilakukan secara menarik dan kreatif. Sehingga tidak menjadikannya hanya



• INFO MPR

sekadar bahan untuk dihafal atau dimengerti saja. Melainkan perlu diterima dan dihayati, dipraktekkan sebagai kebiasaan, bahkan dijadikan sifat yang menetap, hingga menjadi bagian dari kepribadian setiap anak bangsa,” kata Bamsoet.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat juga mengingatkan, perlu pemahaman bersama terkait undang-undang pernikahan dan undang-undang perlindungan anak

menerbitkan dokumen resmi berbentuk perpres baru. Terbitnya Perpres baru setidaknya akan meyakinkan masyarakat, bahwa tidak lagi terjadi seringnya pernyataan publik Presiden Jokowi justru dipersepsikan dan diimplementasikan secara berbeda oleh para pembantunya.

Pada bulan yang sama, Hidayat Nur Wahid menyampaikan dukungan terhadap kritik yang disampaikan Pimpinan Muhammadiyah, NU dan MUI,

masa jabatan presiden dan wakil presiden dari dua periode menjadi tiga periode. Ia menegaskan, pihaknya tidak pernah sekali pun membahas hal tersebut. Terlebih ketentuan masa jabatan kepresidenan diatur dalam Pasal 7 UUD 1945, yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun.

“MPR tidak pernah melakukan pembahasan apapun untuk mengubah Pasal 7 UUD 1945,” ujar Bamsoet.



untuk menghapus praktik pernikahan usia dini di masyarakat.

MARET

Di awal Maret, MPR mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang mencabut lampiran Perpres 10/2021 tentang terbukanya investasi industri minuman keras (miras) atau beralkohol.

Pencabutan Perpres tersebut juga sekaligus agar pemerintah segera

terhadap Visi Pendidikan Indonesia 2035 yang disusun dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), karena tidak mencantumkan frasa agama. Ia menilai, tidak disebutkannya frasa agama berarti tidak sejalan dengan arah dasar UUD 1945 dan UU Sistem Pendidikan Nasional.

Masih di Maret, Bamsoet menanggapi terkait dengan isu perpanjangan

APRIL

Pada awal April, Bamsoet melantik anggota MPR PAW, MF Nuhuda dari Fraksi PKB. Pada kesempatan itu, Bamsoet memandang masih terdapat masalah patogenik besar terkait ideologi negara. Hal itu ditandai dengan adanya bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar. Hal tersebut menurutnya dapat diatasi dengan melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar MPR.

“Sosialisasi Empat Pilar MPR harus dilakukan secara sungguh-sungguh oleh seluruh anggota MPR. Bukan sekadar formalitas bertemu konstituen di daerah pemilihan, tetapi juga dapat menjangkau kelompok masyarakat yang rawan dimasuki oleh paham radikal,” tandas Bamsoet.

Di bulan yang sama, MPR mendukung teknologi telekomunikasi seluler generasi lima atau 5G yang akan mewujudkan peradaban baru butuh dukungan dan

nal Bersenjata (KKB) di Papua.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, selama tiga tahun terakhir, tidak kurang dari 110 warga menjadi korban teror KKB. Sebanyak 95 orang di antaranya meninggal dunia, terdiri dari warga biasa 59 orang, personil TNI 27 orang, dan personil Polri 9 orang.

Dia meminta agar pemerintah perlu memastikan kembali pembangunan di

Sejalan dengan arah perjuangan IMI yang mendukung Perpres 55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

Selain itu, Bamsoet juga sempat menyoroti ketergantungan alat kesehatan dari negara lain. Menurut dia, sudah saatnya pemerintah memberi perhatian serius kepada industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Di bulan Juni, Bamsoet juga mem-



peran signifikan sumber daya manusia (SDM) bertalenta digital dalam jumlah memadai. Talenta digital, menurut Bamsoet, harus direspons pemerintah agar generasi baru dapat kompeten dan kompetitif dalam beradaptasi di tengah perubahan zaman.

MEI

Bamsoet sempat mengungkapkan adanya peningkatan intensitas aksi teror yang dilakukan Kelompok Krimi-

Papua sesuai Inpres 9/2020 dan Kepres 20/2020, termasuk melakukan berbagai operasi bhakti kesejahteraan.

JUNI

Pada awal Juni lalu, Bamsoet diangkat menjadi Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo).

Kehadiran Periklindo tersebut diharapkan mendorong percepatan migrasi Indonesia ke kendaraan listrik.

peringati sewindu wafatnya Bapak Empat Pilar MPRI, Taufiq Kiemas. Ia mengatakan peninggalan Taufiq akan tetap abadi bagi bangsa dan negara Indonesia. Terutama warisan tentang pentingnya memasyarakatkan (sosialisasi) Empat Pilar Kebangsaan, yang kemudian diubah menjadi Empat Pilar MPR.

Warisan Empat Pilar MPR tersebut sangat berguna untuk menjaga keberlangsungan masa depan Indonesia. Sehingga



Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid.

tidak terpecah belah akibat suku, agama, ras, maupun antargolongan (SARA).

"Empat Pilar MPR merajut keberagaman sebagai kekuatan bangsa Indonesia, bukan sebagai sumber pertikaian," ujar Bamsoet

JULI

Hidayat Nur Wahid sempat mengkritisi strategi bantuan sosial pemerintah dalam penyelenggaraan PPKM, di mana terdapat Program Keluarga Harapan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Program Sembako sebanyak 18,8 juta KPM, dan pencairan perpanjangan bansos tunai Mei-Juni untuk 10 juta KPM.

Baginya, ketiga jenis bantuan sosial itu adalah bansos reguler yang sudah diberikan sebelum pemberlakuan PPKM Darurat. Sehingga diperkirakan tidak akan efektif menahan sebagian besar masyarakat untuk tetap di rumah di era PPKM Darurat.

AGUSTUS

Bamsoet sempat menyinggung ihwal amendemen UUD 1945. Menurutnya, UUD 1945 bukan kitab suci, sehingga tidak boleh dianggap tabu jika ada kehendak untuk dilakukan penyempurnaan melalui proses amendemen. Alasannya agar ke depan tidak terjadi ubahan haluan jika terjadi pergantian kepemimpinan.

Pasalnya, memasukkan PPHN tersebut pada saat itu menjadi kekhawatiran akan perubahan pasal-pasal krusial, seperti pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden.

SEPTEMBER

Memasuki September, Bamsoet menegaskan MPR terbuka dengan siapa pun yang ingin menyampaikan aspirasi terkait PPHN. Ia mengatakan dari berbagai aspirasi publik yang diserap MPR, terlihat dengan jelas bahwa Indonesia sangat membutuhkan PPHN

sebagai bintang penunjuk arah pembangunan, guna mencegah negara tanpa arah.

Ia juga menerangkan, pasal 37 konstitusi mengatur secara rigid mekanisme usul perubahan konstitusi, yang tidak dapat dilakukan secara serta merta. Melainkan harus terlebih dahulu diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR, atau paling sedikit 237 pengusul diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya, serta melalui beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Tata Tertib MPR.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan menegaskan MPR belum memutuskan apapun terkait amendemen UUD 1945. Hal itu disampaikan menyusul munculnya PPHN melalui amendemen.

Menurutnya, perlu ketelitian dalam melakukan kajian tersebut. Sebab,



Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan.

MPR sangat memahami bahwa wacana ini jika terwujud, akan sangat besar manfaatnya untuk bangsa.

OKTOBER

Dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Bamsoet menekankan pentingnya memasukan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib bagi siswa sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Menurutnya, setiap negara selalu mempunyai sejarah konflik dalam dinamika kehidupan kebangsaannya, termasuk Indonesia. Bangsa Indonesia harus mensyukuri memiliki Pancasila yang selalu berperan sebagai bagian penting dari resolusi konflik, yang menyatukan seluruh elemen bangsa pada sebuah visi kebangsaan. Pancasila hadir sebagai dasar negara, falsafah, dan pandangan hidup bangsa.

Di bulan ini, Bamsoet juga menerima penghargaan Brevet dan Wing Kehor-

matan Penerbang Kelas 1 dari TNI AU. Sebelumnya, mantan Ketua Komisi III Bidang Hukum & Keamanan DPR ini juga telah mendapatkan penghargaan, mulai dari Brevet Hiu Kencana dan Warga Kehormatan TNI AL, Brevet Warga Kehormatan Korps Brimob Polri hingga Brevet Warga Kehormatan Badan Intelijen Negara (BIN) pada 2019-2020.

NOVEMBER

MPR menyesalkan keluarnya Permendikbudristek 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, menilai peraturan tersebut sarat dengan ketentuan yang tak sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 serta peraturan perundangan di atasnya.

Penolakan terhadap peraturan itu, menurut HNW, telah dilakukan masyarakat luas, sebagaimana dinyai-

takan oleh 13 organisasi yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam (MOI).

Dari DPR, Fraksi PKS juga tegas menolak, karena peraturan tersebut jauh dari nilai-nilai Pancasila yang memuliakan norma agama.

DESEMBER

Pada bulan ini, MPR sempat diramalkan dengan pernyataan Bamsoet yang memprotes Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait pemangkasan anggaran belanja MPR untuk 2022.

Bamsoet pun meminta agar Sri Mulyani dicopot dari jabatannya. Sri Mulyani kemudian memberikan tanggapan bahwa keuangan negara masih difokuskan untuk COVID-19, terlebih dengan adanya varian baru. Pernyataan Bamsoet tersebut sempat viral, namun kemudian muncul foto bersama Sri Mulyani dan Bamsoet dalam acara pembukaan Rapimnas KADIN di Nusa Dua Bali. ●



NFO PERTAMINA

JAGA ENERGI NASIONAL, TERDEPAN DI MATA GLOBAL

PT Pertamina (Persero) konsisten sepanjang tahun ini bekerja mempertahankan performanya, sebagai salah satu perusahaan top dunia yang dimiliki negara. Sekaligus menjaga pasokan bahan bakar minyak, di tengah harga yang melambung.

Konsistensi itu dibuktikan dengan masuknya Pertamina di jajaran Top 500 Fortune, serta prestasi Nicke Widyawati sebagai 100 perempuan paling berpengaruh di dunia oleh Forbes di peringkat ke-27. Pengakuan dunia tersebut, sejalan dengan bisnis BUMN migas tersebut yang pada tahun ini mengambil alih Blok Rokan di Riau.

JANUARI

Mengawali awal 2021, Pertamina terus memperkuat komitmen dalam menjaga kepatuhan dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Keseriusan Pertamina terlihat dari upaya-upaya proaktif dengan meningkatkan keterlibatan institusi hukum pada proses bisnis maupun proyek perusahaan.

Senior Vice President Corporate Communications & Investor Relations Pertamina, Agus Suprijanto mengata-

kan, sepanjang 2020, telah dilakukan kerja sama strategis dengan lembaga penegak hukum baik Kepolisian RI, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Agung RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

FEBRUARI

Mengacu pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Pertamina dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) menetapkan program green transition pada 2035. Program ini merupakan kesiapan Pertamina menghadapi transisi energi global, dengan menjalankan inisiatif strategis untuk pengembangan green energy. Sekaligus mendukung target pemerintah dalam pengembangan energi baru terbarukan.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menjelaskan langkah dan inisiatif strategis yang dilakukan saat

ini sejalan dengan agenda perusahaan minyak dan gas dunia. Seluruh perusahaan energi global bergerak untuk mengantisipasi tren penurunan permintaan minyak yang cukup tajam dan akan terjadi di masa depan. Permintaan dan konsumsi minyak dunia diperkirakan akan turun dari 110 juta barel per hari menjadi sekitar 65-73 juta barel per hari.

MARET

Kebakaran melanda kilang minyak PT Pertamina RU VI Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada 29 Maret 2021. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyatakan, terkait insiden di Kilang Balongan, ditegaskan hanya membakar tangki, bukan kilang.

Penyebab terjadinya kebakaran ini diduga karena petir yang menyambar kilang minyak. Namun, dengan cepat Pertamina berhasil meminimalkan kebakaran, dan memastikan semua operasional di kilang tetap berjalan normal.



• INFO PERTAMINA

Dari kejadian ini, kerugian yang ditaksir Pertamina sekitar USD8 juta atau Rp112 miliar.

APRIL

Pertamina terus mendorong konsumen serta pelanggannya, untuk menggunakan transaksi nontunai. Khususnya dalam melakukan pembelian produk-produk Pertamina, yaitu melalui aplikasi MyPertamina.

Hal tersebut selain merupakan dukungan terhadap pembangunan

produk Pertamina dan terus bertambah.

MEI

Pertamina terus memperkuat tata kelola perusahaan dengan memastikan penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyusutan (SMAP) berjalan dengan baik pada seluruh operasional perusahaan. Langkah ini merupakan upaya perusahaan untuk meningkatkan penerapan Good Corporate Governance dan pencegahan

rektorat Hulu dan telah berhasil memperoleh sertifikat dari badan sertifikasi pada Maret dan Agustus 2020.

Senior Vice President Corporate Communications & Investor Relations Pertamina, Fajriyah Usman menjelaskan penerapan SMAP merupakan bentuk dukungan nyata perusahaan atas kebijakan pemerintah untuk pencegahan korupsi di Indonesia yang tertuang dalam Inpres 10/2016 tentang Aksi Pencegahan, Pemberantasan Korupsi serta Perpres 54/2018



ekosistem ekonomi digital di Indonesia, juga mengedepankan protokol kesehatan di masa pandemi untuk menghindari penyebaran virus melalui uang tunai. Sehingga transaksi nontunai diyakini lebih aman dan praktis.

Sebanyak 10,5 juta konsumen sudah aktif menggunakan MyPertamina dalam melakukan transaksi pembelian

dan tindak pidana korupsi di perusahaan.

Upaya tersebut telah mendapat pengakuan dan sertifikat dari PT SGS Indonesia selaku badan sertifikasi, setelah audit eksternal diselesaikan pada akhir Maret 2021. Sebelumnya pada 2019, penerapan SMAP telah mulai di lingkup Fungsi Procurement dan Di-

tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, serta beberapa surat Kementerian BUMN pada 2019 dan 2020 sebagai pelaksana Inpres dan Perpres tersebut. Pertamina telah ditunjuk sebagai salah satu pilot project untuk melakukan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyusutan (SMAP) berbasis ISO 37001:2016.

JUNI

Secara konsisten Pertamina menjalankan restrukturisasi perusahaan yang membentuk holding dan 6 subholding. Selama hampir satu tahun masa restrukturisasi, langkah tersebut telah menunjukkan manfaat positif dengan operasional yang terintegrasi dan lebih efisien.

Keenam Subholding yang mengelola bisnis inti tersebut yakni Upstream Subholding, Refining & Petrochemical Subholding, Commercial & Trading

control dan pengelolaan anak perusahaan yang dilakukan menjadi lebih optimal. Pada tingkat holding, pasca restrukturisasi organisasi yang sebelumnya 11 direktorat, saat ini hanya 5 direktorat, sehingga organisasi lebih lean dan pengambilan keputusan lebih cepat dan efisien.

"Terjadi stream lining, sehingga kita pun lebih mudah dalam melakukan pengelolaan dan menyusun rencana strategis untuk seluruh bisnis pertamina group," kata Nicke.

"Maka, Pertamina berhasil meningkatkan laba sebesar USD951 juta atau setara dengan Rp13,6 triliun," tutur Pjs Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations Pertamina Fajriyah Usman.

Melansir dari laporan keuangan perseroan, raihan laba tersebut ditopang oleh pertumbuhan penjualan. Tercatat, penjualan dan pendapatan usaha lainnya mencapai USD25,09 miliar. Angka itu naik dari sebelumnya



Subholding, Gas Subholding, Power & NRE Subholding, dan Shipping Subholding telah fokus mengelola bisnis dan aset perusahaan sesuai lingkup masing-masing.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menjelaskan restrukturisasi telah menghasilkan struktur korporasi yang lebih padat, sehingga span of

JULI

Berhasil mencetak laba sebesar USD182,81 juta pada semester I-2021 atau setara Rp2,62 triliun. Kinerja keuangan Pertamina mulai membaik di masa pandemi.

Pasalnya, pada periode yang sama tahun lalu, Pertamina mencatat kerugian senilai USD767,91 juta.

USD20,48 miliar.

AGUSTUS

Pertamina kembali mencatatkan namanya sebagai satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk dalam daftar Fortune Global 500 pada tahun ini. Dengan nilai revenue perusahaan sebesar USD41,47 miliar pada tahun



buku 2020, Pertamina berada di posisi 287.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati mengatakan, dalam tantangan pandemi sejak tahun lalu, perseroan mengalami triple shock, sehingga mengalami penurunan pendapatan secara signifikan. Namun dengan inovasi dan terobosan bisnis yang

dilakukan di seluruh lini bisnis serta transformasi organisasi yang tengah dijalankan, Pertamina mampu meningkatkan pendapatan perusahaan hingga USD41,47 miliar dan mencetak laba USD1,05 miliar pada tahun lalu.

Melalui pencapaian kinerja operasional dan keuangan Pertamina, total pendapatan pemerintah pada 2020

yang dikontribusi dari Pertamina hampir mencapai Rp200 triliun, yaitu melalui setoran Pajak, Deviden, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp126,7 triliun, serta penerimaan negara dari Minyak Mentah dan Kondensat Bagian Negara (MMKBN) dari blok-blok migas Pertamina sebesar Rp73,1 triliun.



SEPTEMBER

Tahap demi tahap proses restrukturisasi Pertamina sebagai Holding BUMN Migas diselesaikan dan secara paralel, telah terlihat dampak pada kemajuan signifikan dan hasil kinerja positif di Pertamina Group. Melalui ini, juga dapat menjalankan operasional dengan lebih efektif dan efisien, salah

satunya melalui integrasi proses bisnis dari hulu sampai hilir.

Roadmap pembentukan Holding Migas di mulai dari 2018, dengan pembentukan Subholding Gas, lalu restrukturisasi dilanjutkan dengan pembentukan lima subholding lainnya. Yaitu Subholding Upstream, Commercial & Trading, Refining & Petrochemical, PNRE serta Shipping, yang dimulai sejak Juni 2020. dan berhasil diselesaikan pada 1 September 2021.

Sesuai dengan roadmap, tugas Pertamina sebagai holding akan diarahkan pada pengelolaan portofolio dan sinergi bisnis di seluruh Pertamina Group, mempercepat pengembangan bisnis baru, serta menjalankan program-program nasional. Sementara subholding akan menjalankan peran untuk mendorong operational excellence dengan mempercepat pengembangan bisnis dan kapabilitas bisnis existing serta meningkatkan fleksibilitas dalam kemitraan dan pendanaan yang lebih menguntungkan perusahaan.

OKTOBER

PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) terus memperluas ekspansi penjualan produknya di pasar internasional. Ini adalah salah satu bagian dari program utama perusahaan, untuk terus memasarkan produknya di pasar luar negeri, salah satunya adalah avtur.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T, Irto Ginting mengatakan bahwa kemitraan strategis bisnis Avtur telah dilakukan sejak tahun 2014, dan melalui skema kemitraan strategis tersebut, secara total Pertamina Patra Niaga telah melayani kebutuhan Avtur di 128 lokasi di dunia yang tersebar di 47 negara.

"Kemitraan strategis yang kami jalankan adalah model Contracting Company Delivering Company atau dikenal dengan Conco Delco, di mana ini adalah skema best practice pada industri aviasi. Sejak tahun 2014, melalui skema Conco Delco kami terus meningkatkan penyaluran Avtur di luar negeri, dengan total penyaluran Avtur tertinggi menca-

pai lebih dari 700 ribu Kilo Liter (KL) pada tahun 2019," jelas Irto.

NOVEMBER

Dua bulan setelah mengelola Wilayah Kerja Rokan, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) telah menyumbangkan penerimaan negara melalui penjualan minyak mentah bagian negara sekitar Rp2,1 triliun dan pembayaran pajak sekitar Rp607,5 miliar, termasuk pajak-pajak ke daerah.

"Kontribusi ini merupakan salah satu bukti nyata bagaimana kehadiran kegiatan usaha hulu migas, dalam hal ini operasi PHR, memberikan manfaat secara langsung bagi negara dan daerah. WK Rokan merupakan aset strategis nasional yang harus didukung kelancaran operasionalnya oleh seluruh pemangku kepentingan," ujar Direktur Utama PHR, Jaffee A. Suardin.

Kehadiran operasi PHR juga memberikan manfaat berganda lainnya seperti pemenuhan kebutuhan energi nasional, penciptaan lapangan kerja, peluang bisnis bagi pengusaha lokal maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Operasional WK Rokan saat ini didukung oleh lebih dari 25.000 pekerja, di mana sebagian besar di antaranya merupakan warga lokal Riau.

DESEMBER

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati kembali masuk daftar 100 wanita paling berpengaruh di dunia versi Forbes 2021. Nicke dinobatkan sebagai wanita paling berpengaruh ke-27 di dunia, mengalahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani di urutan ke-66.

Forbes melihat Nicke masih menjadi pimpinan terbaik sebagai pimpinan perusahaan migas BUMN itu dan mampu melakukan semua tugas yang diberikan.

"Widyawati masih jadi yang terbaik untuk posisinya dan ia mampu menjalankan semua tugas yang diampunya kepadanya," tulis Forbes.

Pada tahun lalu, ia sempat meredam ekspektasi investor dengan mengatakan, 45 persen pendapatan perusahaan terdampak akibat pandemi COVID-19. ●



TETAP SIGAP MEMBANGUN NEGERI

► Tuntaskan 5 Program Prioritas

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih menjadi ujung tombak dalam program pembangunan infrastruktur pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Maruf Amin.

Kondisi pandemi COVID-19 menjadi tantangan kementerian yang dikomandoi Basuki Hadimuljono tersebut dalam membangun infrastruktur di seluruh penjuru negeri.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono optimistis untuk menuntaskan seluruh tugas yang dicanangkan pada 2021,

nyelesaikan tugas-tugas yang diamanahkan kepada kementeriannya meski di tengah masa-masa sulit.

Tahun 2021, pembangunan infrastruktur difokuskan pada lima program, disamping prioritas utama program untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19, serta mempercepat upaya pemulihan ekonomi nasional.

"Kami utamakan pekerjaan-pekerjaan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dan yang dapat segera menciptakan lapangan pekerjaan di masa pandemi ini," kata Basuki.

Program prioritas yang pertama adalah penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah dilaksanakan sejak 2020, antara lain pembangunan



meskipun pandemi COVID-19 masih melanda Indonesia. Mulai dari bendungan, jalan tol, jalan nasional, dan perumahan.

"Saya mengingatkan pada kita semua untuk terus memberikan kontribusi agar kita dapat segera keluar dari pandemi dan ekonomi Indonesia dapat pulih kembali," kata Menteri Basuki dalam sambutannya pada upacara peringatan Hari Bakti (Harbak) PU ke-76 di kantor Kementerian PUPR Jakarta, Jumat (3/12/2021).

Basuki mengaku bersyukur bisa me-

Basuki mengatakan, lima program prioritas yang dikerjakan kementeriannya sesuai arahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Kementerian Keuangan.

SEBARAN JEMBATAN GANTUNG	
Sumatera	: 19 unit
Jawa	: 30 unit
Nusa Tenggara	: 1 unit
Kalimantan	: 8 unit
Sulawesi	: 7 unit
Papua	: 1 unit

48 bendungan, pembangunan 406 km jalan tol, 25.000 hektare daerah irigasi, 2.012 l/detik SPAM, 9.705 unit rumah susun, serta rehabilitasi sekolah/peguruan tinggi/gedung olahraga.

"Total bendungan yang akan diselesaikan pada tahun 2021 ini yaitu 13 bendungan, termasuk Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi yang akan digunakan untuk pengendalian banjir Jakarta," jelas Basuki.

Selain bendungan, tahun ini juga akan diselesaikan beberapa infrastruktur konektivitas, di antaranya Jalan Tol



Serang-Panimbang Seksi 1; 6 ruas dalam Kota Jakarta Seksi A Kelapa Gading-Pulo Gebang; Cibitung-Cilincing Seksi 1; Balikpapan-Samarinda Seksi 1 dan 5; dan Jalan Lingkar Brebes-Tegal.

Program prioritas kedua adalah program Padat Karya Tunai (PKT). Untuk tahun ini, anggaran PKT sebesar Rp21,2 triliun yang menyerap 988.054 tenaga kerja. Sedangkan, untuk paket konstruksi reguler yang dikerjakan dengan pola

padat karya sebesar Rp2 triliun yang menyerap 244.639 tenaga kerja.

Program prioritas ketiga adalah penyelesaian pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), antara lain Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado-Likupang. Basuki memastikan penataan kawasan lima DPSP ini akan dapat diselesaikan pada tahun 2021.

Dalam mendukung pengembangan

5 DPSP, telah dilakukan pembangunan Jalan Lingkar Samosir, Penataan Kawasan Borobudur, Penataan Kawasan Labuan Bajo dan Penataan Kawasan Mandalika sebagai dukungan penyelenggaraan World Super Bike (WSBK) 2021 beberapa waktu lalu.

Program prioritas keempat adalah pengembangan food estate di tiga lokasi, yaitu Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur.



Program prioritas kelima yaitu pengembangan Kawasan Industri (KI) Terpadu Batang, Jawa Tengah.

Basuki optimistis bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat tetap berjalan dengan baik dan diselesaikan sampai tuntas, meskipun adanya dampak dari pandemi COVID-19, salah satunya yaitu refocusing anggaran.

Kementerian PUPR juga telah menyelesaikan tugas khusus pembangunan

BENDUNGAN YANG DIRESMIKAN 2021

1. Bendungan Tukul, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, 14 Februari 2021
2. Bendungan Tapin, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, 18 Februari 2021
3. Bendungan Napun Gete, Kabupaten Sikka, NTT, 23 Februari 2021
4. Bendungan Sindang Heula, Kabupaten Serang, Banten, 4 Maret 2021
5. Bendungan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, 31 Agustus 2021
6. Bendungan Way Sekampung, Kabupaten Pringsewu, Lampung, 2 September 2021
7. Bendungan Bendo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, 7 september 2021
8. Bendungan Passeloreng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, 9 September 2021
9. Bendungan Randugunting, Kabupaten Blora, Jawa Tengah
10. Bendungan Karalloe, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, 23 November 2021
11. Bendungan Gongseng, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, 30 November 2021
12. Bendungan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, 30 November 2021.
13. Bendungan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Desember 2021



prasarana sarana olahraga mendukung Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI di Provinsi Papua.

Terkait pembangunan bendungan, hingga akhir November lalu, sudah ada 13 bendungan yang diresmikan. Bendungan terdiri dari empat lokasi di Jawa Timur, satu di Jawa Barat, satu di Jawa Tengah, satu di Banten, dua di Sulawesi Selatan, satu di Kalimantan Selatan, satu

di Nusa Tenggara Timur, satu di Lampung. Sementara itu, satu bendungan lagi di Sulawesi Tenggara direncanakan akan diresmikan pekan ini oleh Presiden Jokowi.

Dua bendungan di Sulsel, kata Basuki, merupakan bagian dari target pembangunan tiga bendungan di provinsi itu yang merupakan lumbung pangan nasional.

Basuki memprediksi wilayah Sulsel

• INFO PUPR

akan menjadi lumbung pangan nasional, bersama Lampung dan Sumatera Selatan. Untuk itu, bendungan perlu dibangun di daerah tersebut.

"Di Sulawesi Selatan ini minimal ada tiga lagi bendungan yang akan kita bangun dalam 5 tahun ini, yakni Bendungan Pasalloreng, Pamukkulu dan Karalloe. Belum lagi nanti daerah irigasinya juga akan kita bangun mulai tahun depan. Di DIPA 2022 sudah ada untuk memanfaatkan

air embung bisa dipakai untuk air baku di rumah-rumah serta untuk pariwisata masyarakat.

Kementerian PUPR juga optimistis mampu memenuhi target pembangunan satu juta rumah pada akhir tahun ini. Alasannya karena hingga November 2021, pembangunan sudah mencapai 931.592 unit di seluruh wilayah Indonesia.

Program Sejuta Rumah telah berjalan

unit dan non-MBR sebanyak 187.880 unit.

Sementara, pembangunan rumah MBR dilaksanakan oleh Kementerian PUPR sebanyak 131.150 unit, Dana ALokasi Khusus (DAK) Perumahan 22.288 unit, APBD Provinsi dan Kabupaten Kota 47.989 unit, pengembang perumahan 516.927 unit, Dana Desa dan Insentif Daerah 6.058 unit, CSR Perumahan 6.653 unit dan masyarakat



kan di Pasalloreng," kata Basuki di Jenepono, Senin (22/11/2021).

Selain bendungan, Kementerian PUPR juga membangun embung yang tahun ini totalnya dibangun sebanyak 66 embung.

Presiden Jokowi saat meresmikan empat embung di Jawa Tengah, 14 Desember, mengatakan, dengan telah siapnya embung-embung yang ada, produktivitas pertanian bisa lebih baik. Selain untuk pengairan lahan pertanian,

selama enam tahun sejak dicanangkan oleh Presiden Jokowi pada 2015. Jumlah capaian Program Sejuta Rumah hingga akhir 2020 adalah 5.765.387 unit.

Mengutip data Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, per awal November 2021 tercatat pembangunan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 743.712

12.647 unit.

Sedangkan rumah untuk nonMBR berasal dari rumah yang dibangun pengembang perumahan sebanyak 152.725 unit dan masyarakat 35.155 unit.

Basuki mengatakan, hingga November 2021, pihaknya telah menuntaskan pembangunan dan mengoperasikan 101 km jalan tol dari target 190 km.

Dengan demikian, total panjang jalan tol operasional di Indonesia hingga akhir 2021 menjadi 2.529 km.

Beberapa ruas tol yang telah beroperasi antara lain Jalan Tol Serang – Panimbang Seksi 1, Balikpapan – Samarinda Seksi 1 dan 5, dan Semanan – Pulo Gebang Seksi A.

“Kita juga meneruskan pembangunan jalan nasional perbatasan di Kalimantan, Papua, dan NTT. Dari total panjang

akyatannya yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat selain infrastruktur berskala besar.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, hadirnya jembatan gantung akan mempermudah dan memperpendek akses warga masyarakat perdesaan.

“Terutama dalam beraktivitas menuju sekolah, pasar, tempat kerja, mengurus administrasi ke kantor kelurahan atau kecamatan dan akses silaturahmi antar

Tingkat Pemerintah Pusat.

Penganugerahan itu diberikan berdasarkan penilaian interaksi aktif antara Kementerian PUPR dengan unit kerja di KPPU. Hasil penilaiannya menunjukkan kinerja terbaik Kementerian PUPR dalam menciptakan iklim persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan UMKM.

Basuki mengatakan, memasuki tahun 2022, amanah dan kepercayaan yang



perbatasan 3.628 km, akan tersambung jalan sepanjang 3.404 km di akhir 2021. Diharapkan jalan perbatasan dapat tersambung seluruhnya pada akhir tahun 2024,” terang Basuki.

Untuk memudahkan konektivitas masyarakat, tahun ini, Kementerian PUPR juga membangun 66 jembatan gantung yang tersebar di sejumlah provinsi di Indonesia.

Pembangunan jembatan gantung merupakan salah satu infrastruktur ker-

warga,” ujar Basuki dalam siaran pers, Selasa (2/12/2021).

Hingga saat ini, berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, tercatat telah dibangun sebanyak 407 jembatan gantung di seluruh Indonesia sejak 2015-2021.

Menjelang akhir 2021, Kementerian PUPR mendapat penghargaan KPPU Award Tingkat Pratama dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk kategori Dukungan Persaingan Usaha

diberikan kepada Kementerian PUPR semakin besar.

“Kita perlu terus merapatkan barisan dan meningkatkan kekompakan dalam melaksanakan tugas-tugas baru yang kita emban. Persiapan KTT G-20 di Bali, penataan Kawasan Mandalika menyongsong MotoGP 2022, renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dan pembangunan Papua Youth Creative Hub di Papua harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Basuki. •



KRISIS TUNTAS, RAKYAT PUAS JOKOWI LAYAK 3 PERIODE

Joko Widodo boleh semringah di penghujung tahun yang penuh tekanan ini. Ujian dari berbagai arah teratasi dengan capaian yang cukup memuaskan. Dua tahun pandemi yang melahirkan krisis multisektoral memberikan pelajaran amat mahal. Kini, pemimpin politik yang kenyang oleh badai tantangan itu menatap 2022 dengan penuh optimisme membawa Indonesia lebih maju.



Perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh di atas 5 persen pada kuartal IV-2021 dan 3,7 - 4 persen sepanjang 2021. Prediksi ini dipercaya bakal tercapai setelah terjadi perbaikan di berbagai indikator utama dalam perekonomian nasional.

Melandainya penularan atau kasus baru COVID-19 tentu mendorong mobilitas masyarakat dan berpotensi meningkatkan sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur dan perdagangan.

Sektor lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi yakni sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial karena semakin efektifnya penanganan COVID-19 dan meluasnya pelaksanaan vaksinasi.

Kemudian sektor informasi dan komunikasi akibat adaptasi kebiasaan baru yang membutuhkan koneksi internet, serta sektor pertambangan dan penggalan akibat tingginya permintaan ekspor dan penguatan harga komoditas.

Terkait pencapaian penerimaan perpajakan, tercatat per 26 Desember 2021, jumlah neto penerimaan pajak mencapai Rp1.231,87 triliun atau menembus 100,19 persen dari target yang diamanatkan dalam APBN sebesar Rp1.229,6 triliun.

Sementara itu, kinerja investasi di 2021 juga tergolong sangat baik dan menjadi salah satu penopang pertumbuhan. Realisasi investasi pada kuartal III-2021 telah mencapai Rp216,7 triliun atau meningkat sebesar 3,7 persen (yoy), yang terdiri atas PMA sebesar Rp103,2 triliun (47,6 persen) dan PMDN sebesar Rp113,5 triliun (52,4 persen). Sepanjang kuartal I-III 2021, realisasi investasi telah mencapai Rp659,4 triliun atau 73,3 persen dari target realisasi investasi tahun ini sebesar Rp900 triliun.

Membaiknya kondisi perekonomian tentu saja tak lepas dari sokongan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah digulirkan sejak 2020. Klaster Insentif Usaha dan Perlinsos menjadi klaster yang mencatatkan realisasi tertinggi. Misalnya PPh Pasal 25 dan pajak UMKM yang ditanggung Pemerintah, PPnBM, dan PPh yang di-





tanggung Pemerintah untuk properti.

Pertumbuhan ekonomi pada 2022 ditargetkan mencapai 5,2 persen. Target ini sejalan dengan proyeksi dari sejumlah lembaga internasional seperti IMF (5,9 persen), OECD (5,2 persen), dan World Bank (5,2 persen).

Tercapai tidaknya target itu tetap bergantung pada keberhasilan pengendalian pandemi yang didukung kedisiplinan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan, jangkauan vaksinasi yang diprogramkan pemerintah, dan pembatasan kerumunan. Kemudian, respons kebijakan ekonomi yang tepat dari sisi fiskal dan moneter serta penciptaan lapangan kerja dan kesiapan bertransformasi.

Menurut data Kemenko Perekonomian, sejumlah risiko tetap harus diwaspadai agar tidak mengganggu momentum pemulihan ekonomi ke depan. Risiko tersebut diantaranya kenaikan harga energi dan inflasi, disrupsi, krisis Evergrande di Tiongkok, dan normalisasi kebijakan moneter negara maju.

Ekonom dari Universitas Surakarta, Agus Trihatmoko, mengatakan, kinerja ekonomi makro pada 2021 di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo dapat dikatakan sudah sangat baik.

Dalam hal ekonomi mikro, capaiannya terlihat dari setiap pertumbuhan ekonomi sektoralnya. Secara mengejutkan sektor pariwisata dan hotel, restoran serta UMKM memiliki kontribusi signifikan di tahun ini. Meski demikian, masih ada peluang yang belum dapat digerakkan karena terbentur pandemi. Misalnya, kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka.

Sektor lain yang aktif adalah industri dan perdagangan, baik untuk pasar daerah, nasional dan ekspor. Termasuk sektor pertanian dan kebutuhan konsumsi bahan pokok.

"Tahun 2022, konsentrasinya Presiden adalah mengendalikan pandemi dan terus menekan laju penyebaran risiko baru. Penuntasan vaksinasi secara nasional harus ditargetkan beres. Dari situ perekonomian akan terus bergerak normatif untuk menjadi lebih baik dan kontinu," kata Agus kepada Info Indonesia, Kamis (30/12/2021).

Harus diakui pula bahwa sektor in-

frastruktur masih menjadi ikon keberhasilan pembangunan yang dipimpin Jokowi sepanjang 2021. Pembangunan waduk, infrastruktur pelabuhan, kawasan wisata, serta jalan tol menjadi sarana penting untuk kemajuan ekonomi. Meskipun dalam jangka pendek dampaknya belum signifikan, tetapi cukup jelas prospeknya bagi jangka menengah dan panjang.

Sayangnya, masalah pembiayaan dan permodalan infrastruktur masih mengandalkan utang negara. Menurut Agus, hal itu perlu dikendalikan lagi agar beban negara di masa depan tidak terlalu berat.

Dalam wawancara terpisah, peneliti senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai, proses pembangunan infrastruktur memberikan multiplier effect atau efek berganda terhadap perekonomian. Jika dilihat hingga kuartal III-2021, PDB sektor konstruksi telah tumbuh sekitar 2,43 persen dan ikut berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi sampai dengan kuartal III tahun ini.

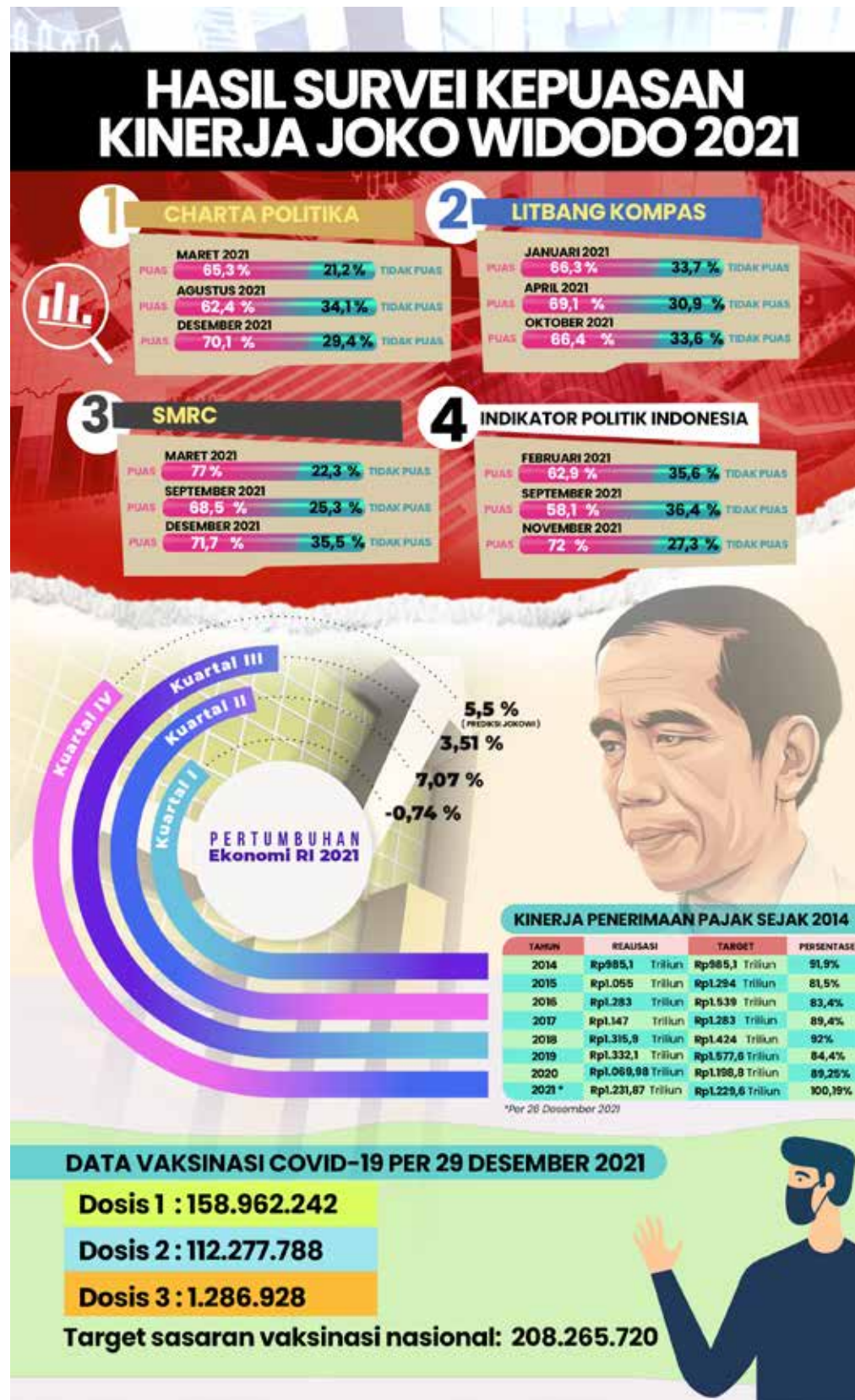
Penjualan semen juga ikut meningkat selama proyek infrastruktur dijalankan oleh pemerintah. Di sisi lain, upah buruh juga mengalami peningkatan meskipun masih di level yang lebih terbatas.

"Kita juga tahu bahwa sektor infrastruktur atau konstruksi merupakan salah satu sektor yang diperbolehkan masih beroperasi selama masa PPKM diberlakukan pemerintah. Jadi puncak pandemi atau gelombang kedua (pada Juli 2021) sebenarnya tidak begitu memengaruhi dari pembangunan infrastruktur itu sendiri," kata Yusuf.

MEREDAM WABAH

Perkembangan positif dari upaya penanggulangan pandemi COVID-19 terlihat pada kuartal terakhir tahun ini. Setelah serangkaian tindakan, termasuk pembatasan sosial yang signifikan, dapat dikatakan intervensi tersebut berhasil mengurangi penyebaran virus secara nasional dan mencegah skenario terburuk dari krisis selama gelombang kedua COVID-19 di Tanah Air.

Setelah ancaman signifikan terhadap kesehatan masyarakat, pencabutan bertahap pembatasan kegiatan



DATA VAKSINASI COVID-19 PER 29 DESEMBER 2021

Dosis 1 : 158.962.242

Dosis 2 : 112.277.788

Dosis 3 : 1.286.928

Target sasaran vaksinasi nasional: 208.265.720

sosial dan ekonomi menunjukkan respons Indonesia mengalami perubahan yang dinamis selama pandemi.

Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University Australia, Dicky Budiman, mengatakan, Indonesia sukses me-

anggapi pandemi COVID-19 dengan menunjukkan beberapa faktor kekuatan utamanya.

Pertama, pemerintah telah mengambil pelajaran dari tahun pertama pandemi dengan merespons dan memperkuat aksi bersama antarke-



menterian dan lembaga untuk segera meningkatkan langkah-langkah kesehatan masyarakat guna menahan, mengurangi, dan mencegah COVID-19.

"Skenario terburuk tidak terjadi akibat pemerintah cepat mengambil kebijakan. Mulai dari penerapan PPKM darurat hingga penguatan-penguatan intervensi. Selain itu, penerapan 3T juga sudah meningkat dari tahun 2020. Itu pada akhirnya bisa membantu menyelamatkan orang banyak," kata Dicky kepada Info Indonesia.

Kata Dicky, efektifnya pelaksanaan kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial diikuti oleh relaksasi bertahap oleh pemerintah Indonesia, memperlambat penyebaran virus corona. Kedua, respons dini Indonesia terhadap diplomasi vaksin memastikan akses paling awal ke vaksin COVID-19 dibandingkan dengan banyak negara berkembang lain.

Ketiga, pemerintah telah memanfaatkan infrastruktur publik yang ada seperti sekolah, hotel, kantor, dan gedung yang tidak digunakan

sebagai bangsal isolasi atau pusat karantina. Keempat, orang Indonesia memiliki tradisi memikul beban bersama dengan saling membantu, atau gotong royong. Yang disebutkan terakhir ini memegang peranan penting dalam ketahanan masyarakat.

"Apalagi semangat, motivasinya dan pengorbanan tenaga kesehatan, relawan, dan masyarakat dalam menghadapi bencana sangat menggembirakan," kata dia.

Terkait penanganan varian Omicron, Kepala Bidang Pengembangan Profesi



Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI), Masdalina Pane, menilai, kebijakan pemerintah harus tepat. Kebijakan yang tepat itu akan menentukan arah penanganan COVID-19 secara umum di 2022.

Menurut dia, selama dua tahun belakangan, pemerintah kerap kali mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang keliru. Mulai dari mengeluarkan kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat, seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga pembelaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1-4.

Sementara kebijakan yang tepat ialah mengendalikan mobilitas di pintu-pintu masuk Indonesia. Kebijakan tersebut dinilai Masdalina jauh lebih mudah, murah, dan efektif, dibandingkan menunggu kasus masuk di komunitas dan melakukan 3T (testing, tracing, dan treatment).

"Akhirnya setelah dua tahun baru berhasil menyadarkan pemerintah untuk menjaga pintu masuk negara dibandingkan sibuk menganalisis mobilitas orang. Standar pengendalian itu sederhana, yaitu protokol kesehatan, 3T, dan vaksinasi," kata Masdalina.

Seperti diketahui, pemerintah memperpanjang PPKM luar Jawa-Bali selama 11 hari, mulai 24 Desember 2021 hingga 3 Januari 2022. Menyusul kebijakan tersebut, terbit Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 69/2021. Beleid itu ditandatangani Mendagri, Tito Karnavian, pada 23 Desember 2021.

Aturan itu salah satunya memuat tentang pembatasan pintu masuk penumpang internasional warga negara Indonesia (WNI), baik melalui jalur udara, laut, dan darat.

Kemudian, pemerintah juga melakukan pembatasan pintu masuk perjalanan internasional bagi warga negara asing (WNA), baik melalui jalur udara maupun laut.

"Sekarang kan terlihat, hampir semua kasus Omicron didapat di pintu masuk. Ada rembesan dikit ke komunitas, tapi itu lebih mudah dikendalikan," kata dia.

Selain menentukan kebijakan yang tepat, lanjut Masdalina, pemerintah juga harus memilih ahli kesehatan ataupun ahli epidemiologi yang tepat. Memilih ahli yang tepat guna membantu pembuatan kebijakan akan berdampak baik kepada masyarakat.

"Analisis yang excessive dan misleading menyebabkan salah dalam kebijakan, dampaknya tentu pada masyarakat," ujar Masdalina.

SEMAKIN BERSINAR

Keberhasilan di bidang ekonomi dan kesehatan tentu berdampak besar pada persepsi publik terhadap kepemimpinan politik Jokowi. Berdasarkan survei terbaru Saiful Mujani Research

and Consulting (SMRC), tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden Jokowi mencapai 71,7 persen.

Dalam survei yang dilakukan Desember ini, mayoritas warga atau 71,7 persen sangat atau cukup puas dengan kerja Presiden Jokowi. Yang kurang atau tidak puas hanya sekitar 25,3 persen. Sementara yang tidak menjawab masih ada sekitar 3 persen. Tingkat kepuasan ini cenderung stabil dalam dua tahun terakhir.

Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas, menyatakan, hasil survei positif itu dinilai publik bukan karena Presiden Jokowi akan menjabat lagi atau tidak, tapi soal seberapa baik mantan Wali Kota Solo itu menunjukkan kinerjanya dan seberapa baik menjalankan amanatnya sebagai eksekutif.

Dia melihat, dalam setahun terakhir kepemimpinan Presiden Jokowi ada perbaikan yang nyata. Dari sisi kinerja pemulihan ekonomi, terus membaik sejalan dengan penurunan angka kasus COVID-19. Lalu, kepuasan publik dalam penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah.

Kemudian, kepuasan yang sangat tinggi terkait dengan kebijakan di sektor pendidikan, pangan, Infrastruktur, dan kebebasan beragama.

"Itu sebabnya tingkat kepuasan publik kepada kinerja presiden mencapai di atas 70 persen per Desember. Sangat baik. Itu modal politik bagi presiden yang sangat kuat dan positif," kata Sirojudin kepada Info Indonesia.

Selain itu, lanjut Sirojudin, ada perbaikan opini publik dalam enam bulan terakhir terhadap Presiden Jokowi dan pemerintahannya.

"Artinya, secara umum, sebagian masyarakat melihat keadaan politik kita relatif kondusif sepanjang 2021," kata dia.

Ia menjelaskan lebih rinci soal perbaikan politik di 2021. Paling tidak, kata dia, ada tiga hal yang membuat situasi politik membaik di Tanah Air. Pertama, hubungan kerja antara pemerintah dan partai politik relatif baik, terutama dalam konteks hubungan legislatif dan eksekutif di DPR maupun di DPRD. Mulai dari perumusan UU, anggaran, peraturan daerah, APBD, dan sebagainya. Selama 2021, tidak ada ganja-

lan serius.

"Itu menciptakan kondisi politik yang kondusif dalam hubungan eksekutif dan legislatif," ujarnya.

Kedua, ruang kebebasan masyarakat sipil untuk berpartisipasi politik mengalami perbaikan dalam setahun terakhir, misalnya ihwal kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, dan berserikat untuk mengemukakan pendapat. Masyarakat memandang, kebebasan berbicara dan berkumpul itu sangat penting. Publik melihat, kebebasan berbicara dan berkumpul tahun 2021 jauh lebih baik dibanding tahun-tahun lalu.

Ketiga, terkait dengan seberapa bebas masyarakat melakukan kritik terhadap pemerintah dan seberapa takut mereka akan ditangkap oleh aparat. Secara umum, publik yang merasa takut masih cukup tinggi. Hal ini harus jadi perhatian karena cara aparat merespons gerakan oposisi perlu lebih sensitif dengan hal-hal politik dan iklim demokrasi.

Kendati demikian, dia memberikan catatan yang harus diperbaiki Presiden Jokowi di tahun 2022. Pertama, presiden harus tetap fokus pada pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, dan perbaikan dalam hal penegakan hukum.

Selain itu, tren persepsi publik pada penegakan hukum masih agak negatif karena menguatnya opini yang menyebut perilaku korupsi semakin merajalela di era Jokowi. Lalu, masih adanya opini publik yang mengkritik kinerja penegak hukum karena masih jauh di bawah harapan.

"Agenda-agenda besar itu yang patut menjadi prioritas pemerintah di tahun berikutnya," katanya.

Sementara itu, peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Jati, berpandangan, cahaya Presiden Jokowi yang semakin bersinar karena ia mampu mengontrol dampak dari pandemi.

Peran sentral Presiden Jokowi dalam pembuatan kebijakan efektif terkait dampak pandemi sangat dirasakan di sepanjang tahun ini.

"Rehabilitasi ekonomi tetap jadi prioritas Presiden Jokowi di 2022 dan mungkin meminta para menternya

fokus bekerja mengawal pemerintahan hingga 2024," terang Wasisto.

Modal positif dan sangat kuat di atas telah lama berjalan seiring dengan wacana Jokowi Tiga Periode yang setahun terakhir semakin menggema.

Beberapa waktu lalu, dua hasil survei politik dari lembaga terkemuka membuktikan bahwa wacana Jokowi Tiga Periode masih hidup. Meski masih minoritas dan terganjal aturan konstitusi, gagasan ini terus bersemi.

September lalu, hasil penelitian Saifull Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa 34 persen publik menginginkan Jokowi menjabat presiden satu periode lagi. Jika dirinci maka sebanyak 4 persen responden menyatakan sangat setuju bila Jokowi kembali maju pada Pilpres 2024, sedangkan 30 persen lainnya menyatakan setuju.

Survei SMRC memiliki jumlah responden 1.220 orang, berusia 17 tahun ke atas dengan metode multistage random sampling. Survei diketahui memiliki margin of error survei yang diperkirakan 3,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. SMRC melakukan wawancara lapangan pada 15 hingga 21 September 2021.

Sebelumnya survei nasional dan pemuka opini yang dilakukan Indikator Politik, dirilis pada 13 Oktober 2021, menunjukkan fenomena serupa. Yang menandakan peluang Jokowi untuk menjabat tiga periode masih cukup besar bila berdasarkan suara publik.

Survei Indikator Politik menemukan mayoritas elite dan masyarakat sama sekali tidak setuju masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Namun, penolakan di kalangan elite atau pemuka opini terlihat lebih kuat ketimbang penolakan dari masyarakat awam.

Elite yang sama sekali tidak setuju jika masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode berjumlah 79,9 persen, sementara publik yang sama sekali tidak setuju hanya 36,9 persen. Elite yang kurang setuju 14,7 persen, sedangkan publik 34,4 persen.

Sebaliknya, publik yang setuju jabatan presiden menjadi tiga periode berjumlah 21,1 persen, sedangkan elite hanya 4,2 persen. Sementara



itu, publik yang sangat setuju jabatan presiden menjadi tiga periode berjumlah 2,8 persen, sedangkan di kalangan elite berjumlah 0,6 persen.

Survei juga menemukan mayoritas kalangan elite dan publik kurang atau tidak setuju sama sekali jika Jokowi harus kembali menjadi calon presiden untuk ketiga kalinya di Pilpres 2024. Namun, lagi-lagi, penolakan di kalangan pemuka opini itu terlihat lebih kuat dibandingkan di kalangan rakyat awam.

Modal positif dan sangat kuat di atas



telah lama berjalan seiring dengan wacana Jokowi Tiga Periode yang setahun terakhir semakin menggema.

Beberapa waktu lalu, dua hasil survei politik dari lembaga terkemuka membuktikan bahwa wacana Jokowi Tiga Periode masih hidup. Meski masih minoritas dan terganjal aturan konstitusi, gagasan ini terus bersemi.

September lalu, hasil penelitian Saifull Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa 34 persen publik menginginkan Jokowi menjabat presiden satu periode lagi.

Jika dirinci maka sebanyak 4 persen responden menyatakan sangat setuju bila Jokowi kembali maju pada Pilpres 2024, sedangkan 30 persen lainnya menyatakan setuju.

Sebelumnya survei nasional dan pemuka opini yang dilakukan Indikator Politik, dirilis pada 13 Oktober 2021, menunjukkan fenomena serupa. Yang menandakan peluang Jokowi untuk menjabat tiga periode masih cukup besar bila berdasarkan suara publik.

Survei Indikator Politik menemukan mayoritas elite dan masyarakat

sama sekali tidak setuju masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Namun, penolakan di kalangan elite atau pemuka opini terlihat lebih kuat ketimbang penolakan dari masyarakat awam.

Publik yang setuju jabatan presiden menjadi tiga periode berjumlah 21,1 persen, sedangkan elite hanya 4,2 persen. Sementara itu, publik yang sangat setuju jabatan presiden menjadi tiga periode berjumlah 2,8 persen, sedangkan di kalangan elite berjumlah 0,6 persen. •



ANTARA SYAHWAT DAN POLITIK

Lansekap politik memang tak pernah sepi dari sisi skandal terkait syahwat. Pemulihan citra merupakan pilihan untuk mengurangi dampak destruktifnya.

Mulai dari poligami, perselingkuhan, hubungan sejenis, hingga yang belakangan menjadi isu mengemuka seperti jenis buaya pemangsa, bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Itu jenis-jenis skandal yang terkait syahwat dan akan lebih ramai di media jika menyangkut kontestasi atau pemilihan pejabat politik.

Begitulah. di penghujung 2021 dan berlanjut ke awal 2022 skandal perselingkuhan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan perempuan bernama Rifa Handayani muncul di sejumlah media. Namun, kaitannya juga pada Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan peluangnya untuk maju sebagai salah satu calon presiden pada pemilihan 2024 mendatang.

Memasuki pertengahan Januari, sejumlah masyarakat yang tergabung

dalam Aliansi Peduli Rifa Handayani (APRH) menggelar aksi demonstrasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan depan Istana Negara. Dalam aksinya yang berlangsung pada Selasa, 11 Januari 2022 itu, muncul desakan agar Airlangga meminta maaf serta mendesak pula Presiden Joko Widodo mencopot Pak Menteri dari jabatannya karena perselingkuhan.

"Kami meminta kepada Bapak Presiden RI Hi. Jokowi Widodo untuk kemudian jika Airlangga Hartarto tidak mampu memberikan klasifikasinya ke publik maka satu saja kami minta pecat Airlangga dari menteri perekonomian. Sepakat kawan," ujar salah satu pengunjuk rasa yang berorasi.

"Kami juga meminta kepada Jokowi memberikan instruksi yang tegas karena dugaan kami ini merupakan dugaan yang sudah lama kawan-

kawan", lanjutnya.

Sebelumnya, pada pertengahan Desember 2021, Rifa Handayani melaporkan Airlangga dan istrinya Yanti K Isfandiary ke Bareskrim Mabes Polri. Keduanya dilaporkan atas tuduhan ancaman dan intimidasi yang dilakukan di media sosial dengan sangkaan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Setelah melapor ke Mabes Polri pada Selasa, 14 Desember 2021, Rifa juga meminta perlindungan ke Komnas HAM lantaran merasa jiwanya terancam oleh intimidasi itu.

Toh Rifa menyangkal sengaja memilih momentum politik dalam pengaduannya. "Tahun sebelumnya saya sedang program bayi dan terhalang pandemi Covid-19 juga," kata Rifa, Jumat, 12 Desember 2021.

Tambahan pula, lanjut Rifa, kasus ini sebenarnya sudah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)

DPR RI sekitar Oktober 2013 lalu. Saat itu, Airlangga masih menjabat anggota DPR RI. Tak hanya ke MKD, suami Rifa juga sempat bersurat ke Ketua Umum Partai Golkar masa itu.

"Secara hukum, ada Undang-Undang yang menyatakan bahwa buat ancaman hukuman yang lebih dari tiga tahun itu waktu daluwarsanya 12 tahun, jadi saya tidak telat. Walaupun, sudah lama tapi belum daluwarsa," kata Rifa. Rifa menjelaskan, pihaknya tak menimbang tahun yang menjelang tahun politik sebagai momen pelaporan.

Lagi pula, dia dan suaminya lebih banyak berada di Jepang dan tidak memantau perpolitikan nasional. "Suami saya, nama presiden aja kadang gak ingat," ujarnya.

Namun, implikasi politik pengaduan Rifa jelas tak terelakkan. Kasus itu pun kemudian ramai di berbagai platform media sosial, salah satunya twitter yang memunculkan beberapa kali trending topic terkait skandal di partai besar itu.

Tagar AH Selingkuh (#AHSelingkuh) pun diperbincangkan oleh 3.372 netizen dan menjadi tema yang paling banyak ditwit pada hari itu. Tak selesai di situ, perbincangan soal AH juga masih terus berlanjut hingga muncul hashtag Selamatkan Golkar yang juga ramai diperbincangkan dan menjadi trending topic di sosial media Twitter

di penghujung 2021. Juga tagar #AHSelingkuh dan #AHHarusJawab yang sempat juga ramai beberapa hari belakangan.

Sejumlah media massa ikut meramaikan kasus ini. Tak ketinggalan video 'Cinta, Rahasia, dan Politik Indonesia' yang dibahas pegiat media sosial Ade Armando di Cokro TV. Ada pula pengamat maupun internal partai asal Airlangga ikut berkomentar di berbagai media.

Alih-alih menanggapi isu itu secara frontal, Airlangga menggunakan media sosial menebar foto bersama keluarga di akhir pekan di tengah serangan isu perselingkuhan itu. Melalui akun Instagram @airlanggahartarto_official, Airlangga membagikan foto dirinya dikelilingi empat anaknya.

Ia bercerita bahwa momen berbin-cang dengan anak-anak menjadi hal yang dapat membuatnya bahagia. "Kalau kata mereka, 'weekend bersama Bapak'. Ngobrol dan mendengar cerita anak-anak merupakan hal membahagiakan," tulis Airlangga dalam unggahannya, Minggu, 19 Desember 2021.

Ketika bertemu, tulisnya, anak-anak kerap bercerita tentang sekolah maupun aktivitas di tengah pandemi Covid-19. Tak jarang anak-anaknya mengungkapkan curhatan maupun kritikan yang membuat Airlangga tersenyum ketika mendengarnya.

Keluarga adalah urusan domestik,

berbeda dengan ranah publik. Nah, di ranah publik, Airlangga menanggapi dengan tenang di markas partainya.

Dalam acara organisasi sayap Kogoro di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa, 11 Januari 2022, ia berbicara tentang Pilpres dengan gaya milenial. Perhelatan Pemilu Presiden (Pilpres) yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 terbilang masih cukup jauh. "Ya agenda masih lama, Belanda masih jauh lah. Pemilu masih jauh, sekarang masih konsentrasi saja untuk G20," ucap Airlangga di hari yang sama dengan penyelenggaraan demo Aliansi Peduli Rifa Handayani di seberang Istana.

Menurut dia, Pemilu 2024 masih dua tahun lagi dan Golkar masih fokus untuk suksesi G-20 (kelompok 20 negara dengan ekonomi terbesar) yang saat ini Indonesia menjadi tuan rumah karena pergiliran presidensi. Ia menegaskan, Partai Golkar masih fokus terhadap pelaksanaan G20 terlebih dahulu ketimbang memfokuskan diri pada Pilpres 2024. "Pemilu kan jadwalnya 2024," tandas Airlangga.

Jelas pemulihan citra sedang berlangsung menanggapi kampanye negatif di lansekap politik Indonesia. Bagaikan coret dan poles silih berganti, ini akan berlanjut hingga 2024.

Tak cuma Airlangga saja tentunya. Juga bukan sekadar urusan syahwat belaka isunya. •





ROMANTISME AIRLANGGA DAN POLITIK INDONESIA

Romantisme dapat menimbulkan salah paham. Pengertian akademis juga dapat berbeda dengan pemahaman awam. Katakanlah terkait Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan pelaporan Rifa Handayani ke Mabes Polri.

Di mana letak romantisme dalam urusan itu? Tentu saja di masa lalu. Saat ini yang mencuat adalah eksekunya.

Dari tayangan video yang beredar di WhatsApp, selain melaporkan Menteri Airlangga, Rifa juga melaporkan istri dengan tuduhan ancaman dan intimidasi yang dilakukannya di media sosial dengan sangkaan UU ITE. Selanjutnya Rifa pun meminta perlindungan ke Komnas HAM lantaran merasa jiwanya terancam.

Rifa mengungkapkan kronologi

awal hubungannya dengan AH yang juga menjabat sebagai menteri saat ini berkenalan pada akhir tahun 2012 lalu, di sebuah konser internasional di Ancol, Jakarta Utara. Saat itu, AH meminta pin BlackBerry Messenger dan nomor handphone dirinya.

Namun, Rifa mengakui saat itu tidak mengetahui sosok AH, yang masih menjadi kader sebuah partai dan belum menjadi menteri ini. Masalah datang bulan Juni tahun 2013, Rifa mengaku mendapat teror dan intimidasi dari AH. Dia pun kemudian melakukan blokir terhadap nomor ponsel AH.

Akan tetapi selang beberapa bulan kemudian, kata Rifa, intimidasi kembali datang dari istri Airlangga. "YA juga meneror saya di media sosial melalui direct message," kata dia.

Karena terus diteror, Rifa akhirnya menceritakan masalah tersebut ke sang suami, yang akhirnya melakukan konfirmasi ke Airlangga. Belakangan beredar pula rekaman yang berisi perbincangan diduga antara Airlangga dengan suami sah dari Rifa Handayani.

"Saya sudah terima suratnya, kalau saya pikir, kalau kita kan maunya tidak menimbulkan persoalan. Artinya ka-



FOTO-FOTO:INSTAGRAM

lau memang ada persoalan-persoalan kita selesaikan secara silaturahmi saja, kekeluargaan begitu,” ungkap isi rekaman yang diduga ucapan Airlangga

Selain itu muncul pula ajakan agar masalah yang terjadi diselesaikan secara objektif dengan keluarga masing-masing. “Tentunya hal-hal tersebut tidak perlu kita besar-besarkan, artinya tentu kita menginginkan objektif dari masing-masing kita, sehingga jadi pertimbangan utama kita. Ya intinya kalau masalah keluarga kembali kepada keluarga masing-masing, kan begitu,” ujar suara dalam rekaman itu.

Selanjutnya ikut terdengar permohonan maaf dalam rekaman itu. “Mungkin kalau yang terkait keluarga saya, saya mohon maaf. Ini kan ada masalah-masalah yang sifatnya emosional.”

Untuk urusan keluarga, liputan media beberapa kali menunjukkan pasangan Airlangga-Yanti yang romantis. Dalam video yang diunggah perancang busana, Ai Syarif lewat kanal YouTube-nya, Yanti Airlangga membagikan resep selalu terlihat romantis bersama Airlangga Hartarto.

Rupanya di balik sosoknya yang berwibawa, Airlangga Hartarto adalah sosok pria yang memang romantis. “Bapak tuh sebenarnya orangnya sangat romantis, tapi tertutup,” ujar wanita yang juga Ketua Umum Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) itu.

Lebih lanjut Yanti Airlangga mengatakan, Airlangga adalah sosok yang pendiam, serius, serta senang belajar dan membaca. Sementara Yanti Air-

langga adalah wanita yang menyukai musik dan kesenian.

“Jadi Bapak itu orang yang selalu belajar-belajar, baca-baca, kalau saya senang dengan aneka kesenian, musik, dan lagu. Bapak juga senang musik dan lagu,” kata dia.

Dalam mengarungi rumah tangga, Yanti Airlangga selalu berusaha menyatukan energi masing-masing. Sehingga kini, ia lebih menikmati hidup





bersama Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

"Dari situ, kita compare pelan-pelan. Akhirnya kita enjoy hidup kita. Justru dari segala perbedaan itu, kita kolaborasi hobinya dan hobi saya," kata Yanti Airlangga.

Walau sudah lama menikah dan kini telah memiliki cucu, Yanti Airlangga pun tak sungkan memamerkan kekompakannya bersama sang suami lewat akun Instagram-nya.

Romantisme memang lebih menonjol sisi emosional atau perasaan.

Namun romantisme di luar kehidupan keluarga akan sangat berbeda. Saat peristiwa berlangsung, emosi atau perasaan romantis kerap mengguguli akal sehat yang memikirkan akibatnya di masa depan.

Maka, sekitar 10 tahun berlalu sejak pertemuan Rifa dan Airlangga dalam konser musik di Ancol, Jakarta Utara. Romantisme masa lalu itu harus berhadapan dengan kenyataan implikasi politiknya.

Sebagai contoh, simak saja pandangan pengamat politik Zaki Mubarak dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Menurut dia, skenario Partai Golkar yang tetap akan mengusung Ketua Umumnya, Airlangga Hartarto sebagai calon presiden 2024.

Zaki mengakui, mengajukan ketua umum sebagai calon presiden wajar saja bagi partai politik seperti Golkar yang selalu berada di urutan tiga besar dalam lima kali Pemilu sejak 1999, pasca Reformasi.

Namun untuk Airlangga, di mata Zaki, elektabilitasnya belum memadai. "Meski terus didongkrak, gerak elektabilitasnya seperti jalan siput, lambat sekali naiknya," jelas Zaki Mubarak, Kamis, 13 Januari 2021.

Apalagi, Survei IPO menampilkan Airlangga berada di urutan ke-29 dengan persentase dipilih oleh responden hanya sebesar 0,1 persen. "Dia (Airlangga) perlu terobosan untuk menaikkan lagi elektabilitasnya," tegas Zaki Mubarak.

Toh akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta menyebut hal tersebut tidak mudah. "Beberapa elite berpengaruh Golkar juga tidak semua setuju mengusung Airlangga," ungka-

nya.

Buktinya, kata Zaki, Airlangga Hartarto terus diganggu dengan skandal perselingkuhannya. "Jadi tantangan internalnya adalah membangun soliditas, eksternalnya adalah mendongkrak elektabilitas yang stagnan itu," tandasnya.

Nah, skandal romantis seperti yang dikemukakan oleh Rifa bukanlah hal baru dalam politik. Banyak nama yang dapat dikemukakan.

Di masa lalu, pengendalian terhadap media lebih mudah menyembunyikan skandal seperti itu. Namun saat ini, selain media massa, peran media sosial menjadi signifikan dalam penyebaran kisah skandal itu.

Karena munculnya Internet dan outlet media baru memasuki abad ke-21, telah terjadi peningkatan dramatis dalam jumlah skandal romantis politisi yang terungkap. Implikasinya, kandidat dan pejabat publik terpilih saat ini perlu memiliki standar moral yang jauh lebih tinggi daripada pejabat terpilih yang berkampanye sebelum masa munculnya internet dan media sosial.

Toh meskipun skandal tersebut tercakup di tingkat nasional, secara teoritis para politisi dianjurkan berbicara dengan konstituennya secara khusus, dan memenuhi pesannya untuk mencerminkan nilai dan norma dari orang-orang yang dia wakili. Dalam hal ini, untuk memenangkan kembali publik sasaran mereka, dia harus membangun keselarasan antara nilai-nilai sosial yang terkait dengan tindakan mereka dan norma perilaku yang dapat diterima di wilayah tempat membidik suara.

Memang, pada akhirnya, publik pemilih yang akan menentukan nasib sang politisi yang pernah terlilit skandal. Dalam kajian William L. Benoit, sejumlah pejabat publik dapat menggunakan aneka cara untuk menghadapi isu skandal yang melilitnya.

Pertama, penyangkalan, bahkan sampai membantah peristiwa itu pernah terjadi.

Kedua, menghindari tanggung jawab: Ketika seseorang tidak dapat menyangkal dengan tegas tuduhan skandal, menghindari tanggung jawab dapat menjadi pilihan mengurangi

tanggung jawabnya.

Pilihan ketiga, mengurangi serangan: Upaya ini mencakup banyak cara berbeda untuk tetap memiliki opini publik yang positif. Keempat, tindakan korektif: Jika seseorang yang terlilit skandal itu berkomitmen untuk memperbaiki masalah, dan menjelaskan bagaimana mereka akan melakukannya.

Sedangkan yang kelima adalah Mortifikasi: Pada strategi ini, pejabat mengaku dan memohon maaf.

Dalam kajian Margaret Moran, yang paling banyak menjadi pilihan ternyata mengurangi serangan terhadap isu skandal itu. Sedangkan yang paling sedikit mendapat pilihan ada-



lah penyangkalan dan penghindaran tanggung jawab. Pilihan dua cara yang jarang dipilih ini, menurut Moran, berkemungkinan menjerumuskan pejabat itu dalam kebohongan berkelanjutan.

Upaya mengurangi serangan, kata Moran, merupakan cara mempertahankan reputasi positif dalam kaitannya dengan skandal. Namun, dalam kajian yang sama, secara umum, skandal romantis tetap lebih sering menjungkalkan yang terlilit ketimbang bertahan di posisinya.

Apapun, kajian-kajian itu lebih mencakup dinamika politik di Amerika Serikat. Meski begitu, kajian itu tetap dapat menjadi cermin untuk perpolitikan di

Indonesia yang dinamikanya akan semakin meningkat sejak tahun ini hingga pemilihan presiden berikutnya.

Pada konteks ini, Zaki Mubarak melihat masih ada peluang Airlangga maju dalam Pilpres sebagai calon wakil Presiden. Ia menjelaskan, berdasarkan elektabilitasnya, Ganjar Pranowo jauh melampaui Airlangga Hartarto. "Jadi, formula yang pas adalah Ganjar-Airlangga. Bukan sebaliknya," kata Zaki.

Menurut dia, jika hal tersebut memberikan benefit politik, tidak ada salahnya dilakukannya. Namun, untuk bisa survive, Ganjar Pranowo harus keluar dari PDIP. "Sebab, menurut saya, dia punya magnet dan konstituen sendiri," sebut Zaki Mubarak.

Apalagi, Ganjar Pranowo dinilai sebagai politisi dan aktivis. Oleh karena itu, Zaki Mubarak menyinggung partai yang sudah membesarkannya akan rugi besar kalau Ganjar Pranowo keluar.

Relatif masih tersedia waktu dan dinamika menjelang Pilpres berikutnya. Seperti yang dikemukakan oleh Airlangga, "Belanda masih jauh lah. Pemilu masih jauh, sekarang masih konsentrasi saja untuk G20," ucapnya.

Yang jelas, dinamika politik Indonesia kini juga semakin ketat seleksinya dengan mengintroduksi standard moral dan etika. Meskipun kompetensi yang terpilih belum menjadi jaminan juga. ●



TEKAD HD 2022 SUMSEL MANDIRI PANGAN

Tekad Gubernur Sumsel H. Herman Deru menjadikan Sumatera Selatan sebagai daerah mandiri pangan terus dibuktikannya. Keseriusannya itu ditandai dengan Grand Launching Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (SMP) yang dilakukannya secara resmi di Kabupaten Lahat, beberapa waktu lalu.

Gerakan Sumsel Mandiri Pangan sudah ada sebanyak 240 desa yaitu satu desa perkecamatan karena gerakan ini baru akhir tahun ini dilaksanakan. Tapi tentunya semakin tahun semakin meningkat secara berkelanjutan.

Sementara di tahun tahun 2022 ditargetkan 50 persen jumlah desa di kecamatan di Sumsel telah melakukan

mandiri pangan.

Launching Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (SMP) di Kabupaten Lahat ini juga juga dilakukan hingga ke kabupaten/kota lainnya di Sumsel.

Dengan gerakan serentak ini diharapkan target meminimalisir terjadinya kerawanan pangan serta menekan angka kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat segera terwujud di Bumi Sriwijaya.

Outputnya yang sangat positif bagi ketahanan pangan di daerah menjadikan program inisiasi Gubernur Sumsel H Herman Deru inipun menuai dukungan dan apresiasi dari semua pihak.

Melalui gebrakan Gubernur Terinovatif itu pula diharapkan dapat mengubah mindset masyarakat dari yang sebelumnya konsumtif menjadi produktif.

"Program gerakan Sumsel Mandiri Pangan benar kita luncurkan. Target

kita dimasa yang akan datang kita melepaskan ketergantungan atas komoditas yang dikirim dari luar seperti sayur-mayur, cabai, tomat komoditas lainnya," kata Gubernur Herman Deru saat melaunching Gerakan Sumsel Mandiri Pangan yang terpusat di Pelataran Plaza Sungai Lematang Kabupaten Lahat, dan secara bersamaan diikuti oleh Kabupaten/Kota se Sumsel secara virtual.

Dia mengatakan kemandirian pangan di Sumsel sendiri akan dimulai dari kemandirian pangan pada tingkat rumah tangga. Hal itu mengingat masyarakat mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi keluarga melalui pengembangan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumber daya setempat secara berkelanjutan.

"Saya mengajak kepada masyarakat untuk menghasilkan sendiri saja dengan tidak perlu ketergantungan dengan orang lain," ungkapnya.

Tanpa disadari lanjutnya apa yang dilakukan melalui gerakan Sumsel Mandiri Pangan adalah gerakan yang sederhana tapi yang peduli kepada seluruh masyarakat tidak hanya pada segmen tertentu tapi tertuju pada kesejahteraan rakyat.

Melalui gerakan Sumsel Mandiri Pangan ini juga Bapak Pembangunan itu menyebutkan sebagai upaya untuk mengubah pola pikir masyarakat dari biasa hanya menjadi pembeli berubah menjadi produsen atau penghasil.

"Apapun gerakan kita untuk kesejahteraan masyarakat. Saya bersama teman-teman dan berbagai mitra untuk mengejar kesejahteraan itu secara konkrit tanpa berbasabasi. Ini adalah jalan pintas untuk mengubah mindset yang tadinya jiwa pembeli kita bergeser ke penghasil," ucapnya.

Untuk itu dalam menggerakkan SMP ini Herman Deru meminta semua pihak bertanggung jawab tak terkecuali organisasi-organisasi seperti TP. PKK, Ikatri, Persit, Bhayangkari dan organisasi lainnya. Termasuk CSR semua korporasinya sudah mengarah ke SMP dan enam bulan dievaluasi.

"Titik sasaran pada SMP ini adalah ibu-ibu rumah tangga. Artinya semua

pihak mempunyai tanggungjawab. Jadi kita butuh kerja konkrit dan otentik," tutupnya.

Sementara itu Bupati Kabupaten Lahat, Cik Ujang menyambut baik atas program gerakan SMP yang diinisiasi Gubernur Sumsel Herman Deru.

"Kami masyarakat Kabupaten Lahat mengucapkan terima kasih dipilihnya sebagai tempat pelaksana launching Gerakan SMP," ungkapnya.

Cik Ujang menyebutkan pihaknya akan sangat mendukung program

produsen," katanya.

Menurutnya program gerakan SMP adalah loncatan yang luar biasa memandirikan masyarakat untuk memenuhi sebagai kebutuhan pangannya.

"Melalui gerakan Sumsel Mandiri Pangan agar kita konsumsi pangan di perkarangan di rumah masing-masing dan gerakan ini harus diikuti oleh seluruh masyarakat. Bahkan dari gerakan Sumsel Mandiri Pangan ini dapat berdampak pada penurunan kemiskinan," ujarnya.



gerakan SMP karena program ini luar biasa.

"Program ini luar biasa, Pak Gubernur mengajak kita untuk menanam di sekitar rumah. Paling tidak kita tidak membeli. Kita juga siap menjalankan gerakan SMP untuk setiap Desa di perkarangan rumah," tutupnya.

Sementara Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Dr. Ekowati Retnaningsih menjelaskan, gerakan SMP adalah ide cemerlang dari Gubernur Herman Deru dalam mewujudkan Sumsel Maju Untuk Semua dalam penyediaan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan berbasis kebutuhan masyarakat.

Dia menilai gerakan ini menjadi solusi keperihatinan terhadap masyarakat yang sudah terpolah untuk menjadi konsumen dalam memenuhi kebutuhan pangan didalam kehidupan sehari-hari.

"Gerakan SMP ini akan merubah mainset kita dari konsumen menjadi

Eko menyebutkan gerakan Sumsel Mandiri Pangan di tahun 2021 ini ada sebanyak 240 desa yaitu satu desa perkecamatan karena gerakan ini baru akhir tahun ini dilaksanakan. Tapi tentunya semakin tahun semakin meningkat secara berkelanjutan. "Pada tahun 2022 target kita 50 persen jumlah desa di kecamatan di tahun 2023 target kita 70 persen 2024 sebesar 90 persen dan 2025 diharapkan 100 sudah mencapai persen," ucapnya.

Pada launching ini juga Gubernur Herman Deru memberikan bantuan benih padi ramah lingkungan, bantuan program IPDMIP. Kemudian Bupati Lahat Cik Ujang memberikan bantuan 400 ekor sapi, gerobak dorong 115 unit, bantuan mesin jahir karung 5 unit. Serta CSR Bank Sumsel Babel paket budidaya tanaman sebanyak 2.500 unit, budidaya ikan sebanyak 85.000 bibit dan unggas sebanyak 3.500 ekor untuk 17 kabupaten/ kota di Sumsel.

•rhd/***

GERAKAN SMP CEGAH KERAWANAN PANGAN

Ada misi penting dari gerakan Sumsel Mandiri Pangan (SMP) yang telah disosialisasikan secara merata ke 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan yakni selain meminimalisir terjadinya kerawanan pangan, juga ditargetkan dapat menekan angka kemiskinan serta meningkatkan perekonomian warga Sumsel.

Menurut Herman Deru, kemandirian pangan di Sumsel akan dimulai dari kemandirian pangan pada tingkat rumah tangga karena masyarakat mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi keluarga melalui pengembangan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumber daya setempat secara

berkelanjutan.

"Program Sumsel Mandiri Pangan ini sangat penting agar biaya hidup masyarakat dapat ditekan dan penghasilan semakin tinggi, sehingga masyarakat dapat semakin sejahtera," ujar mantan Bupati OKU Timur dua periode tersebut.

Agar program itu dapat berhasil, diperlukan dorongan gerakan menaam berbagai kebutuhan dasar secara

mandiri. Hal ini bisa dicontohkan oleh pejabat publik dengan menanam kebutuhan seperti sayur, cabai, bawang dan lainnya mulai dari pekarangan rumah.

"Ini upaya kita untuk mengubah pola pikir masyarakat dari yang tadinya hanya sebagai pembeli menjadi produsen," tuturnya.

Diketahui, berbagai poin kemandirian pangan yang dapat dilakukan masyarakat yang terdapat dalam program yang diinisiasi Gubernur Herman Deru tersebut, seperti budidaya tanaman, budidaya ikan dan budidaya ternak dengan skala kecil.

Sasarannya yakni seluruh lapisan masyarakat mulai dari masyarakat miskin dan masyarakat non miskin. Selain untuk mengubah pola pikir masyarakat, program SMP tersebut juga dilakukan agar masyarakat bisa menghasilkan sendiri sebagian dari kebutuhan pangan untuk konsumsi keluarga melalui pemanfaatan pekarangan rumah.

"Lewat upaya tersebut diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan di Sumsel. Karena masyarakat mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi keluarga melalui pengembangan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumber daya setempat secara berkelanjutan," tandasnya.

Untuk mensukseskan gerakan ini, Gubernur Herman Deru terus melakukan sosialisasi diberbagai kunjungan kerjanya, seperti saat berkunjung ke Kabupaten Muara Enim Sumsel. Dimana dia mengharapkan seluruh warga



Sumsel mengubah mindset pembeli menjadi penghasil bahkan penjual.

"Sebagai Gubernur dan Pemimpin daerah ini, Saya berharap desa ini akan dapat lebih maju masyarakat, sehingga desanya akan lebih sejahtera," terangnya saat ke Kecamatan Panang Enim dalam rangka Sedekah Dusun Desa Lebak Budi.

Dia berharap nantinya gerakan Sumsel Mandiri Pangan bisa menjadi pilot project atau percontohan bagi desa-desa lainnya. Untuk itu harus bersama-sama mewujudkan apa yang telah dicita-citakan.

"Kita bangun Sumatera dengan Selatan Menurut Herman Deru, kemandirian pangan di Sumsel akan dimulai dari kemandirian pangan pada tingkat rumah tangga karena masyarakat mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi keluarga melalui pengembangan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumber daya setempat secara berkelanjutan.

"Program Sumsel Mandiri Pangan ini sangat penting agar biaya hidup masyarakat dapat ditekan dan penghasilan semakin tinggi, sehingga masyarakat dapat semakin sejahtera," ujar mantan Bupati OKU Timur dua periode tersebut.

Agar program itu dapat berhasil, diperlukan dorongan gerakan menanam berbagai kebutuhan dasar secara mandiri. Hal ini bisa dicontohkan oleh pejabat publik dengan menanam kebutuhan seperti sayur, cabai, bawang dan lainnya mulai dari pekarangan rumah.

"Ini upaya kita untuk mengubah pola pikir masyarakat dari yang tadinya hanya sebagai pembeli menjadi produsen," tuturnya.

Diketahui, berbagai poin kemandirian pangan yang dapat dilakukan masyarakat yang terdapat dalam program yang diinisiasi Gubernur Herman Deru tersebut, seperti budidaya tanaman, budidaya ikan dan budidaya ternak dengan skala kecil.

Sasarannya yakni seluruh lapisan masyarakat mulai dari masyarakat miskin dan masyarakat non miskin. Selain untuk mengubah pola pikir

masyarakat, program SMP tersebut juga dilakukan agar masyarakat bisa menghasilkan sendiri sebagian dari kebutuhan pangan untuk konsumsi keluarga melalui pemanfaatan perkandangan rumah.

"Lewat upaya tersebut diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan di Sumsel. Karena masyarakat mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi keluarga melalui pengembangan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumber daya setempat secara berkelanjutan," tandasnya.

Untuk mensukseskan gerakan ini,



Gubernur Herman Deru terus melakukan sosialisasi diberbagai kunjungan kerjanya, seperti saat berkunjung ke Kabupaten Muara Enim Sumsel. Dimana dia mengharapkan seluruh warga Sumsel mengubah mindset pembeli menjadi penghasil bahkan penjual.

"Sebagai Gubernur dan Pemimpin daerah ini, Saya berharap desa ini akan dapat lebih maju masyarakat, sehingga desanya akan lebih sejahtera," terangnya saat ke Kecamatan Panang Enim dalam rangka Sedekah Dusun Desa Lebak Budi.

Dia berharap nantinya gerakan Sumsel Mandiri Pangan bisa menjadi pilot project atau percontohan bagi desa-desa lainnya. Untuk itu harus bersama-sama mewujudkan apa yang telah dicita-citakan.

"Kita bangun Sumatera dengan

Selatan berbasis ekonomi kerakyatan menggerakkan ekonomi masyarakat sector pertanian, industry dan UMKM, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi, jujur dengan menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan dan integritas," imbuhnya.

Herman Deru menegaskan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki komitmen yang tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat yang tertuang dalam visi dan misi Sumatera Selatan Maju Untuk Semua.

"Oleh sebab itu saya tidak mau kalau sampai desa tidak tersalurkan listrik, karena bisa mengganggu proses

kegiatan belajar dan mengajar. Dengan adanya listrik, anak-anak dapat belajar di malam hari dengan penerangan lampu yang cukup sehingga kualitas pendidikan kita juga meningkat. Saya sudah minta Bupati membuat surat untuk diteruskan ke Gubernur, nanti saya perintahkan PLN untuk mengatasinya," tambahnya.

Gubernur Herman Deru menghimbau kepada Camat Penang Enim, di kecamatan baru tidak semudah di kecamatan lama, karena harus kerja lebih ekstra dengan keterbatasan fasilitasnya.

"Jangan pernah ragu untuk melayani masyarakat, meskipun fasilitas masih kurang. bersama-sama warga menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan desa dengan menjaga ketahanan pangan, serta menjadi persatuan dan

kesatuan bangsa,” imbuhnya.

Sementara Penjabat Bupati Kabupaten Muara Enim Dr. H. Nasrun Umar mengucapkan terimakasih atas kunjungan Gubernur Provinsi Sumsel terlebih, kKunjungannya ke Kabupaten Muara Enim usai dilaunchingnya Sumsel Mandiri Pangan yang akan mengubah mindset masyarakat, yang tadinya membeli menjadi penjual.

“Alhamdulillah terimakasih Pak Gubernur, untuk diketahui kami Pemkab Muara Enim mendukung program Sumsel Mandiri Pangan dengan telah memberikan bantuan bibit ikan, tanaman, jagung dan kangkung yang cocok diwilayah Muara Enim,” tambahnya

“Kami berkomitmen mendukung apa yang menjadi keinginan Bapak Gubernur mengenai Sumsel Mandiri

Salah satunya menyaksikan langsung pengukuhan Kelompok Petani Milenial Andalan di Kabupaten OKU Timur. Melalui petani-petani milenial inipula Herman Deru berharap mindset masyarakat di Sumsel dapat diubah dari semula konsumtif menjadi produktif.

Selain mengedukasi masyarakat untuk membiasakan diri mandiri dalam pemenuhan kebutuhan pangan, petani milenial ini juga ditargetkan dapat lebih menggerakkan semangat dna membuka wawasan para petani di Sumsel. Dengan demikian petani tidak lagi menjadi buruh di tanahnya sendiri melainkan menjadi pengusaha.

“Coba kita pikir selama ini jika ingin masak mie kita pasti butuh membeli cabai. Padahal cabai kita bisa tanam

Bantuan dari Bank Indonesia itu meliputi hand tractor, mesin pompa diesel dan alat pengelola pupuk dengan nilai hampir setengah miliar. Sementara itu CSR Bank Sumsel Babel juga diberikan dalam bentuk, benih ikan, bibit, dan banyak lagi lainnya.

Sementara itu Kepala BI Perwakilan Sumsel Hari Widodo mengungkapkan kehadiran mereka kali ini meeupakan tindaklanjut pertemuannya dengan Bupati OKU Timur beberapa waktu lalu. Dimana menurut Hari, Bupati OKU Timur sangat antusias menggerakkan ekonomi masyarakat melalui gerakan SMP yang diinisiasi Gubernur Herman Deru.

Menurut Hari, ini adalah bentuk sinergi dalam membangun ketahanan pangan di Sumsel khususnya OKU Timur. Pada kesempatan itu la juga sempat memuji akses infrastruktur Palembang-OKU Timur yang sangat baik. Sehingga mereka hanya memerlukan waktu sekitar 3 jam perjalanan saja untuk sampai.

Sementara itu terkait penyerahan Pogram Sosial BI ini tak lain bertujuan untuk mendukung pengembangan potenai ekonomi di daerah OKU Timur.

Terkait inovasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan yang digagas sepenuhnya oleh Gubernur Sumsel Herman Deru menurut Hari memang efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tinggal lagi komitmen masyarakat juga ikut ditingkatkan agar program ini berjalan sukses.

Pada penyerahan kali ini, BI menyalurkan bantuan bagi 8 Gapoktan. Setelah ini rencana bantuan akan diberikan pada 12 Gapoktan.

“Kami berharap bantuan dari BI dapat menjadi motivasi masyarakat menggerakkan ekonomi kerakyatan terutama yang berbasis pertanian,” jelas Hari.

Bantuan ini siharapkan bermanfaat seluasnya kepada maayarakat dan menambah semangat warga si tengah pandemi untuk tetap tidak surut berkarya.

“Semoga OKU Timur dapat men-sukseskan gerakan ini dan meningkatkan kesejahteraan yang ujungnya mendukung pertumbuhan ekonomi di Sumsel,” beber Hari. ●rhd/**



Pangan. Sekedar informasi di tahun 2021, Bapak Gubernur telah memberikan bantuan Gubernur sebesar Rp 25 milyar kepada kabupaten Muara Enim diluar ada kewenangan yang menjadi tanggung jawab provinsi, hal ini dilakukan secara reguler,” pungkasnya.

Libatkan Petani Milenial

Guna mempercepat terwujudnya gerakan Sumsel Mandiri Pangan (SMP), Herman Deru melakukan berbagai cara. Tak hanya melibatkan perusahaan swasta, BUMN dan BUMD untuk pemberian bantuan bibit, benih, pupuk dan lainnya, tapi la juga melibatkan petani milenial di berbagai daerah di Sumsel.

sendiri. Nah kedepan mind set ini yang kita ubah, kita jangan lagi berpikir membeli tapi menghasilkan cabai itu,” terang Herman Deru.

Dengan gerakan SMP yang diinisiasinya ini Herman Deru menargetkan dapat menurunkan biaya hidup masyarakat. Sehingga diharapkan maayarakat semakin sejahtera bahkan dapat bermuara pada penurunan angka kemiskinan.

Selain menyaksikan pengukuhan petani milenial di OKU Timur, pada kesempatan itu juga Herman Deru juga menyerahkan bantuan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan CSR dari Bank Sumsel kepada masyarakat untuk mensukseskan gerakan SMP.



www.infoindonesia.id

INOVASI UNTUK NEGERI

info indonesia

Network

**INFO
PASANG
IKLAN**
KIKI IBRAHIM
+62 818 931 562



Lautan
informasi
di dunia maya
melalui jaringan
internet
memberikan
banyak
referensi
iNFO
kepada
masyarakat

JALAN MPR III NO. 5B
KELURAHAN CILANDAK
BARAT, KECAMATAN
CILANDAK, JAKARTA
SELATAN (12430)
TELP 021-27812397



INOVASI UNTUK NEGERI
info indonesia

<https://infoindonesia.id>

EDISI #16 JANUARI 2022

**ROMANTISME
AIRLANGGA**

**ANTARA
SYAHWAT
DAN
POLITIK**



Rp75.000,-